



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 390/DISKOMINFO/2023

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2022-2024

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1829);
11. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselenggarakan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pusat data dan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 6 Juli 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 390 /DISKOMINFO/2023
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2022-2024

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan bukan menjadi suatu pilihan, tapi sudah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan TIK mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Hal ini menjadi tujuan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang di dalamnya memuat pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada pengguna.

Berbagai aspek pengaturan dalam peraturan tersebut diharapkan dapat diterapkan secara efektif dan efisien sehingga diharapkan mampu mewujudkan visi SPBE, yaitu “Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi”. Berbagai penerapan SPBE atau yang dikenal dengan istilah *e-government* (*e-gov*) telah dihasilkan oleh berbagai instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) untuk memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan IPPD.

Kolaborasi dan integrasi antar IPPD ini, dapat dijumpai dengan disusunnya Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar

yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE. Untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Arsitektur SPBE memuat 2 komponen, yaitu:

- a. Referensi arsitektur, yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur;
- b. Domain arsitektur, yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur infrastruktur, dan domain arsitektur keamanan.

Penyusunan dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi sangat penting, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, berkesinambungan serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Sebagai dokumen awal penyusunan arsitektur SPBE, referensi arsitektur SPBE Nasional menjadi sangat penting untuk dapat menjembatani kebutuhan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Untuk itu, dokumen arsitektur SPBE Kabupaten Kubu Raya ini sebagai gambaran dalam memberikan kepastian hukum, pedoman dan dokumen kunci yang dapat menjadi panduan dasar dalam rangka penataan proses bisnis dan penerapan SPBE untuk meningkatkan pengelolaan dan keterpaduan kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan SPBE.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE ini adalah:

- a. mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi; dan
- b. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara menyeluruh.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya memperhatikan keselarasan program pembangunan daerah yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019–2024, pengarusutamaan transformasi digital, kebijakan Satu Data Indonesia, serta arah kebijakan dan strategi SPBE.

2.1. RPJMD 2019-2024

Dalam menyelaraskan program dan kegiatan SPBE dalam Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, maka perlu dipetakan kegiatan dan program dari RPJMD 2019–2024 yang berkaitan dengan transformasi digital dan yang memerlukan dukungan SPBE dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Untuk itu, perlu kiranya memahami secara lebih detail mengenai visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD. Hal ini sangat penting untuk dilakukan untuk memastikan seluruh agenda program dan kegiatan dalam arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sesuai dengan arah RPJMD 2019–2024.

Dalam RPJMD 2019–2024 tertuang visi Bupati yaitu “Terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang Bahagia, Bermartabat, Terdepan, Berkualitas, dan Religius”. Sedangkan misi Bupati dalam RPJMD 2019–2024 antara lain:

- a. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*);
- b. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat;
- c. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Local;
- d. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat;
- e. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi ke depan. Oleh karenanya transformasi digital secara umum dan penerapan SPBE secara khusus diharapkan dapat menjadi katalis pembangunan yang dapat mengoptimalkan pencapaian visi, misi, dan agenda pembangunan daerah.

Peran SPBE sebagai katalisator dalam percepatan pembangunan nasional, memerlukan sinergi dari berbagai kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024, dalam sebuah Arsitektur SPBE yang didalamnya mengatur pengintegrasian dan harmonisasi pelaksanaan bisnis, data dan informasi yang dibutuhkan dan dihasilkan, aplikasi yang dikembangkan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan, dan keamanan yang diterapkan, serta layanan apa yang dihasilkan nantinya. Arsitektur SPBE ini menjadi panduan bagi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi baik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai

bagian dari transformasi digital, untuk mendukung pembangunan daerah termasuk didalamnya berbagai macam proyek prioritas strategis.

2.2. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Transformasi digital dalam pemerintahan bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintahan. Mekanisme kerja baru (*New Ways of Working/NWoW*) perlu diterapkan untuk membangun budaya kerja baru yang lebih relevan di era digital saat ini yang sangat mendukung dalam penerapan pola kerja berbasis digital secara penuh pada layanan administrasi pemerintah. Penerapan layanan digital nasional untuk layanan administrasi pemerintahan pada merupakan bagian dari mewujudkan *Smart City* pada aspek terwujudnya *Smart Government*, disamping 5 aspek lainnya yakni: *Smart Mobility, Smart People, Smart Living, Smart Environment, dan Smart Economy*.

Untuk itu Arsitektur SPBE menjadi alat (tools) yang penting untuk menjalankan proses bisnis pemerintahan dengan baik dalam upaya meningkatkan layanan pemerintah kepada publik dan layanan administrasi

pemerintahan. Layanan yang diberikan oleh pemerintah tersebut, baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, salah satunya adalah peraturan mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang menyampaikan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat;
5. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Upaya dalam mewujudkan berbagai macam layanan pemerintah sesuai dengan standar pelayanan minimal tersebut di atas, sangat terbantu dengan adanya percepatan pelaksanaan transformasi digital dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan terpercaya, dimana sesuai dengan arah kebijakan transformasi digital bahwa transformasi digital di masa pandemi maupun nertpandemi akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya offline dengan kontak lisik menjadi lebih banyak ke online. Perubahan yang terjadi perlu segera diantisipasi, disiapkan, dan direncanakan secara matang. Beberapa arah kebijakan transformasi digital adalah:

1. perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital;
2. perlunya roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, sektor pendidikan, sektor kesehatan, perdagangan, sektor industri, sektor penyiaran;
3. percepat integrasi Pusat Data Nasional;
4. persiapkan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital untuk melakukan transformasi digital; dan
5. berkaitan dengan regulasi perlu disusun skema-skema pendanaan dan pembiayaan transformasi digital secepatnya.

Dengan arah kebijakan dan strategi nasional yang dijelaskan di atas, maka SPBE dapat menjadi pondasi yang kuat sebagai wujud *Government as a*

Platform (GaaP), yang merupakan fondasi berupa ekosistem digital yang memungkinkan pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, netral, profesional, dan berlandaskan hukum, dengan didukung oleh pilar Aparatur Sipil Negara, kelembagaan dan proses bisnis organisasi, dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan pengawasan. Penggambaran ini dapat terlihat pada Gambar 2.1.



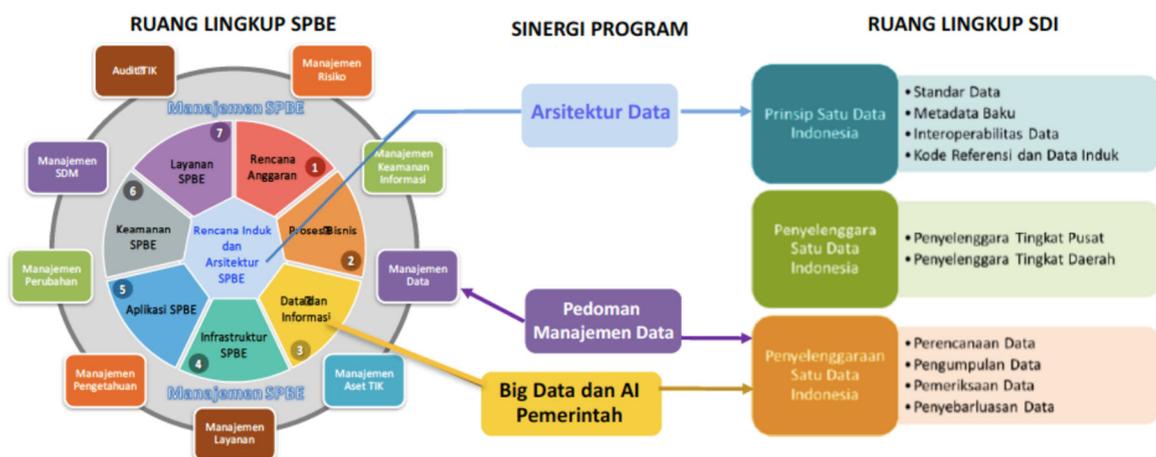
Gambar 2.1. SPBE sebagai *Government as a Platform*

2.3. Kebijakan Satu Data Indonesia

Kebijakan Satu Data Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta menggunakan kode referensi dan data induk. Kebijakan ini bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia, pemerintah dapat mengumpulkan data dalam satu pintu yang akurat, mutakhir, terpadu, serta

mudah diakses, Data yang disediakan antara lain data pangan, energi, infrastruktur, maritim, pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, pariwisata, reformasi birokrasi, serta data lainnya. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antar *stakeholder* terkait.

Pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia sangat erat kaitannya dengan SPBE, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam Peraturan Presiden tersebut diamanatkan bahwa SPBE mendukung pelaksanaan tata kelola data dalam Satu Data Indonesia dengan pemberian dukungan teknologi informasi dan komunikasi baik melalui pembangunan atau pengembangan aplikasi maupun pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berbagai pakai yang dibutuhkan. Untuk itu kolaborasi dan harmonisasi pelaksanaan penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia perlu diwujudkan melalui sinkronisasi pelaksanaan kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia, terlihat ilustrasi pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Keterkaitan Lingkup Kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia diharapkan terwujud melalui kerangka SPBE terkait arsitektur data dan informasi, penerapan manajemen data, dan penerapan Big Data dan Artificial Intelligence pemerintah. Dengan sinergitas antara Satu Data Indonesia dan SPBE dapat diwujudkan penerapan SPBE dan Satu Data Indonesia yang sinergis, karena SPBE yang berkualitas bergantung pada data Satu Data Indonesia yang berkualitas, sedangkan data Satu Data Indonesia yang berkualitas bergantung pada penerapan SPBE yang berkualitas.

2.4. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia SPBE. Keempat arah kebijakan dan strategi dijabarkan dalam beberapa inisiatif strategis dengan penjelasan singkat masing-masing sebagai berikut:

1. Tata Kelola SPBE

Untuk perbaikan tata kelola SPBE dilakukan dengan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat Pemerintah Daerah, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan tata kelola SPBE adalah sebagai berikut:

- a. pembentukan dan penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE, sebagai penyelenggara SPBE;
- b. penguatan kebijakan SPBE;
- c. pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan SPBE;
- d. perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE.

2. Layanan SPBE

Diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas layanan pemerintah dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi layanan, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan layanan SPBE adalah sebagai berikut:

- a. survei pengguna SPBE;
- a. portal pelayanan publik yang terintegrasi;
- b. portal pelayanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi; dan

c. penyelenggaraan manajemen layanan.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi diarahkan untuk pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan pusat data nasional dan jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.

Adapun inisiatif strategis dari teknologi informasi dan komunikasi adalah sebagai berikut:

- b. penyediaan pusat data nasional;
- c. penyediaan jaringan intra pemerintah;
- d. penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah;
- e. penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di seluruh wilayah;
- f. pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai;
- g. pembangunan infrastruktur SPBE portal data nasional;
- h. pembangunan sistem keamanan informasi; dan
- i. pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat.

4. Sumber Daya Manusia SPBE

Sumber daya manusia SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia SPBE. Pengembangan sumber daya manusia SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan sumber daya manusia SPBE adalah sebagai berikut:

- a. promosi literasi SPBE;
- b. peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara penyelenggara SPBE; dan

- c. pembangunan forum kolaborasi SPBE antara pemerintah dengan non pemerintah.

2.5. Kebijakan Pembangunan SPBE

Kebijakan pembangunan SPBE yang dapat digambarkan dalam Arsitektur SPBE diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan pembangunan SPBE nasional. Pembangunan SPBE nasional melalui penerapan Arsitektur SPBE Nasional hingga periode 2024, diarahkan untuk mendukung kebijakan nasional di bidang ekonomi dan industri, pembangunan kewilayahan, kesehatan, sosial, hukum dan keamanan, pendidikan, pemerintahan umum dan Satu Data Indonesia.

1. Ekonomi dan Industri

Kebijakan pembangunan SPBE diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang ekonomi, melalui pembangunan di sektor industri, perdagangan, dan investasi. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang ekonomi ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian layanan perizinan berbasis elektronik. Melalui pengintegrasian layanan perizinan berbasis elektronik, diharapkan mampu meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, sehingga mampu menarik investasi baik dalam maupun luar negeri, serta mendorong daya saing ekonomi Indonesia.

2. Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan SPBE diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, antara lain melalui pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian pembangunan berbagai pekerjaan umum dan perumahan rakyat, sehingga memastikan pembangunan yang dilakukan dapat bersifat integratif dan komprehensif untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan yang komprehensif di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat perlu dipantau melalui sistem yang terpadu untuk dapat memastikan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penyediaan perumahan rakyat terlaksana secara optimal.

3. Kesehatan

Kebijakan pembangunan SPBE melalui penerapan Arsitektur SPBE adalah dalam rangka mendukung pembangunan di bidang kesehatan. Salah satu strategi dalam pembangunan SPBE di bidang kesehatan ini antara lain dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memanfaatkan inovasi dan teknologi dalam pelayanan kesehatan, termasuk didalamnya meliputi perluasan sistem rujukan online termasuk integrasi fasilitas pelayanan kesehatan swasta dalam sistem rujukan, perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis dan rekam medis online; pembangunan sistem personal health care; integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sistem informasi kesehatan pusat dan daerah termasuk penerapan sistem single entry, penguatan data rutin, inovasi serta penerapan Big Data.

4. Sosial

Kebijakan pembangunan SPBE melalui penerapan Arsitektur SPBE diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang kesejahteraan sosial ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian layanan bantuan sosial berbasis elektronik serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu. Pengintegrasian layanan bantuan sosial dan keterpaduan data kesejahteraan sosial yang tentunya akan melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga bantuan sosial yang diberikan dapat tepat sasaran.

5. Hukum dan Keamanan

Kebijakan pembangunan SPBE melalui penerapan Arsitektur SPBE diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang hukum dan keamanan. Salah satu strategi pembangunan SPBE dalam bidang hukum dan keamanan ini dilakukan antara lain melalui pengintegrasian penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pengintegrasian proses bisnis tersebut tentunya akan melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang diharapkan

dapat meningkatkan perlindungan terhadap warga negara. Inisiatif strategis pembangunan SPBE di bidang hukum dan keamanan antara lain dilakukan pada penyelenggaraan sistem penerbitan Surat Izin Mengemudi dan penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terpadu berbasis teknologi informasi.

6. Pendidikan

Kebijakan pembangunan SPBE melalui penerapan Arsitektur SPBE juga diarahkan untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan. Strategi pembangunan SPBE dalam bidang pendidikan ini dilakukan antara lain melalui platform layanan pendidikan berbasis teknologi dan pengembangan konten digital pendidikan. Pemanfaatan teknologi pada penyelenggaraan layanan tersebut diharapkan tidak hanya memberi nilai tambah pada masyarakat, namun juga dapat menghasilkan data dan informasi yang dapat digunakan instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan, dalam hal ini khususnya peningkatan kebijakan pendidikan.

7. Pemerintahan Umum

Salah satu kebijakan pembangunan SPBE lainnya adalah pada sektor pemerintahan umum. Sektor pemerintahan umum ini mencakup urusan pemerintahan dalam negeri, keuangan negara, informasi, komunikasi, perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, dan kesekretariatan negara. Salah satu strategi dalam mewujudkan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain melalui pembangunan portal layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi sebagai sebuah single digital platform Aparatur Sipil Negara. Portal ini dibangun untuk memudahkan Aparatur Sipil Negara mengakses pelayanan administrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan dalam portal ini mencakup perencanaan, penganggaran, keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai Aparatur Sipil Negara, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal surat elektronik

(email), kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung penerapan Teknologi 4.0.

8. Satu Data Indonesia.

Kebijakan pembangunan SPBE lainnya adalah pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Strategi dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah dengan melakukan peningkatan kualitas data dalam kerangka Satu Data Indonesia melalui perbaikan tata kelola data dan pembangunan portal Satu Data Indonesia. Dalam mendukung kebijakan Satu Data Indonesia ini, maka terdapat 4 (empat) inisiatif strategis yang akan dilaksanakan, antara lain tata kelola satu data statistik, tata kelola satu data geospasial, tata kelola satu data keuangan, dan pembangunan portal Satu Data Indonesia sebagai layanan data terbuka.

BAB III

KERANGKA KERJA

3.1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

Kerangka kerja SPBE sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, merupakan kerangka kerja yang digunakan dalam pelaksanaan tata kelola SPBE dan manajemen SPBE. Tata kelola SPBE diterapkan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Unsur-unsur SPBE ini antara lain:

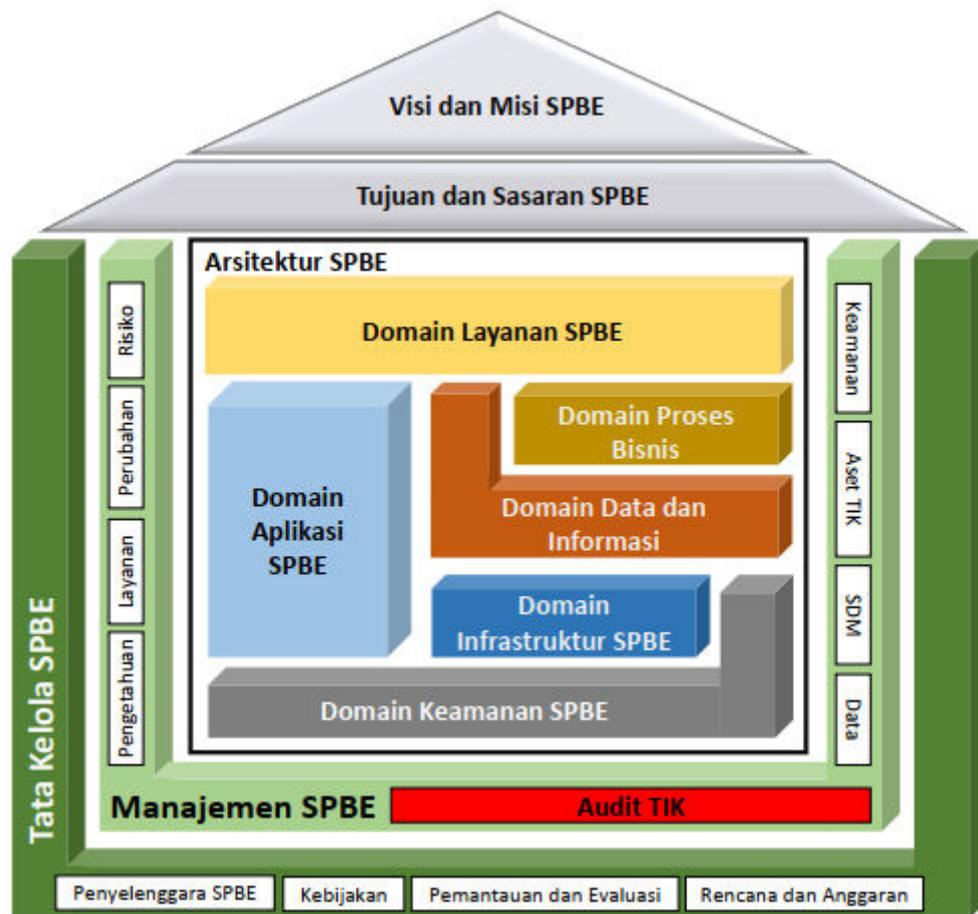
- a. rencana induk SPBE nasional;
- b. arsitektur SPBE;
- c. peta rencana SPBE, memuat rencana SPBE mengenai penerapan tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan audit TIK;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. proses bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. infrastruktur SPBE;
- h. aplikasi SPBE;
- i. keamanan SPBE;
- j. layanan SPBE.

Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE diatas dapat diwujudkan dalam sebuah arsitektur SPBE nasional, yang menggambarkan keterpaduan dari seluruh domain arsitektur SPBE daerah yang terdiri dari:

- a. Domain arsitektur proses bisnis;
- b. Domain arsitektur data dan informasi;
- c. Domain arsitektur layanan;
- d. Domain arsitektur aplikasi;
- e. Domain arsitektur infrastruktur;
- f. Domain arsitektur keamanan.

Gambaran keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE di atas dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE menggambarkan keterpaduan proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Kerangka

kerja Arsitektur SPBE dan kedudukannya dalam kerangka kerja SPBE dapat diilustrasikan pada Gambar 3.1



Gambar 3.1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE

Salah satu komponen utama pada kerangka kerja SPBE adalah Arsitektur SPBE yang menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana melalui Arsitektur SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan.

Arsitektur SPBE memiliki pola yang dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi untuk mewujudkan visi dan misi SPBE, dimulai dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi dari domain proses bisnis, domain data dan informasi, serta domain layanan SPBE, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek teknologi informasi dan komunikasi melalui domain Aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE.

3.2. Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta operasional layanan pemerintah yang berkualitas. Penerapan manajemen SPBE di daerah dilaksanakan antara lain:

- a. manajemen risiko;
- b. manajemen keamanan informasi;
- c. manajemen data; manajemen asset TIK;
- d. manajemen sumber daya manusia
- e. manajemen pengetahuan;
- f. manajemen perubahan; dan
- g. manajemen layanan SPBE.

BAB IV

ARSITEKTUR SPBE

Untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik perlu disusun sebuah pedoman yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada semua tingkatan. Pedoman tersebut disusun dalam bentuk arsitektur SPBE yang terdiri dari proses bisnis data dan informasi, infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan keamanan SPBE yang saling terintegrasi sehingga dapat memberikan layanan SPBE yang lebih baik.

Arsitektur SPBE merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan SPBE. Dengan adanya arsitektur SPBE yang terintegrasi maka penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik akan dapat dilaksanakan untuk setiap tingkatan dan area pemerintahan yang dapat dipantau dan dievaluasi secara terpadu.

Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah disusun dengan berpedoman kepada Arsitektur SPBE Nasional sehingga akan terwujud keterpaduan atau integrasi Arsitektur SPBE dalam penyelenggaraan SPBE secara Nasional.

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah merupakan arsitektur SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah. Dengan pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Arsitektur SPBE Daerah memuat dua komponen pokok, yaitu referensi arsitektur dan domain arsitektur.

4.1. Arsitektur SPBE Nasional

4.1.1. Referensi Arsitektur SPBE Nasional

4.1.1.1. Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

A. Pemahaman RAB

RAB digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian RAB ini harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan dilakukan. Mengingat bahwa SPBE diterapkan pada sebuah organisasi yang memiliki sifat legal formal yang tinggi (sebuah negara) maka RAB disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada.

RAB merupakan klasifikasi jenis fungsi bisnis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta PP Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. RAB ini disusun dengan cara menjabarkan fungsi bisnis dari fungsi-fungsi kementerian berdasarkan standar penamaan bisnis yang umum dibandingkan dari sisi organisasi kementeriannya.

RAB mengelompokkan fungsi bisnis dari setiap kementerian dan lembaga untuk menggambarkan potensi kolaborasi antar IPPD serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan fungsi-fungsi yang diemban. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan TIK pada IPPD dapat mendorong pencapaian tujuan pemerintah dalam menyediakan layanan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas administrasi pemerintahan secara efektif, efisien dan akuntabel serta mengurangi pemborosan anggaran belanja TIK yang diakibatkan karena adanya duplikasi pembelanjaan.

Dikarenakan RAB ini dikembangkan secara umum dan tidak terikat dengan organisasi yang ada, maka diharapkan dapat mengakomodasi setiap fungsi organisasi yang ada setiap IPPD, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan fungsi bisnis dari instansi pemerintah. Dengan tidak membedakan organisasi yang mengemban urusan pemerintahan tertentu, maka RAB SPBE dapat membantu memberikan analisa yang obyektif dalam penyederhanaan birokrasi yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

B. Struktur RAB

Struktur dari RAB SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan fungsi pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai RAB tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Urusan pemerintahan, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai RAB tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya instansi akan mendefinisikan di tingkat bawahnya.

C. Taksonomi RAB

RAB SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu) dan 45 (empat puluh lima) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua). IPPD, dalam menyusun RAB masing-masing mengacu pada RAB SPBE Nasional, serta melengkapi proses bisnis pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 4.1. Daftar RAB, akan menjadi acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) dan Referensi Arsitektur Layanan (RAL). Rincian mengenai taksonomi RAB akan dijelaskan pada Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAB.



Gambar 4.1. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

4.1.1.2. Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD)

A. Pemahaman RAD

RAD ini merupakan acuan dalam mengklasifikasikan data yang terdapat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab RAB. Dengan adanya taksonomi dalam RAD yang selaras dengan RAB, maka memberikan kemudahan dalam menentukan metoda berbagi pakai data (Data Share) dengan menggunakan standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh, menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga dapat terwujud layanan pemerintah yang terintegrasi.

Hal ini perlu diperhatikan untuk memberikan data yang lebih akurat dan berkualitas dalam menghasilkan layanan pemerintah yang diperlukan, di mana hal ini juga menjadi tujuan dalam pelaksanaan SDI. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data dan informasi dalam SPBE memungkinkan adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi acuan dalam pengelolaan data dan informasi SPBE bagi IPPD. Data dan informasi yang laik dan dapat

dipercaya, diperlukan dalam menghasilkan layanan SPBE yang baik. RAD ini merupakan acuan dalam memetakan arsitektur data dalam penerapan SPBE.

Dengan meningkatnya kualitas pengelolaan data dan informasi pemerintah ini, akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan prioritas agenda pembangunan di semua lini, melalui pengambilan keputusan yang tepat sasaran (*Data Driven Government*). Data yang valid, merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara.

B. Struktur RAD

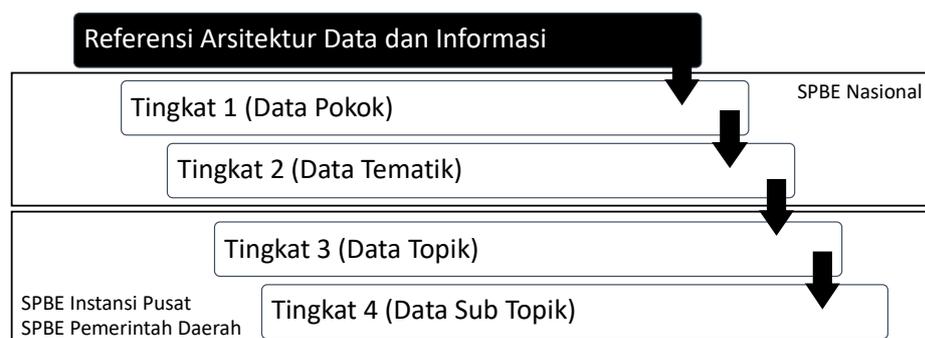
Struktur dari RAD SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai RAD tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh UU, dikelompokkan ke dalam data urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai RAD tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan tingkat dibawahnya.

C. Taksonomi RAD

RAD SPBE Nasional terdiri dari 10 (sepuluh) data pokok di tingkat 1 (satu) dan 49 (empat puluh sembilan) data tematik di tingkat 2 (dua). IPPD, dalam menyusun RAD masing-masing mengacu pada RAD SPBE Nasional, serta melengkapi RAD pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 4.2. Data dan Informasi akan menjadi masukan dalam menjalankan berbagai fungsi pada aplikasi SPBE hingga terbentuknya layanan pemerintah yang diharapkan. Rincian mengenai taksonomi RAD akan dijelaskan pada Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAD.



Gambar 4.2. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

4.1.1.3. Referensi Arsitektur Layanan (RAL)

A. Pemahaman RAL

RAL adalah sistem pengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Sub Bab RAB. RAL yang didasari oleh seluruh fungsi-fungsi yang ada di lingkungan penyelenggaraan pemerintahan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan layanan pemerintah yang ada, sehingga menjadi tematik layanan pemerintah terintegrasi. Dengan adanya pengelompokan yang tepat akan lebih mudah menghindari terjadinya duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu RAL diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan Cipta Kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen/G2C* dan *Government to Business/G2B*) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/G2G*, *Government to Employee/G2E*).

Diharapkan dengan penerapan RAL SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat citizen-centric menuju penerapan Society 5.0.

B. Struktur RAL

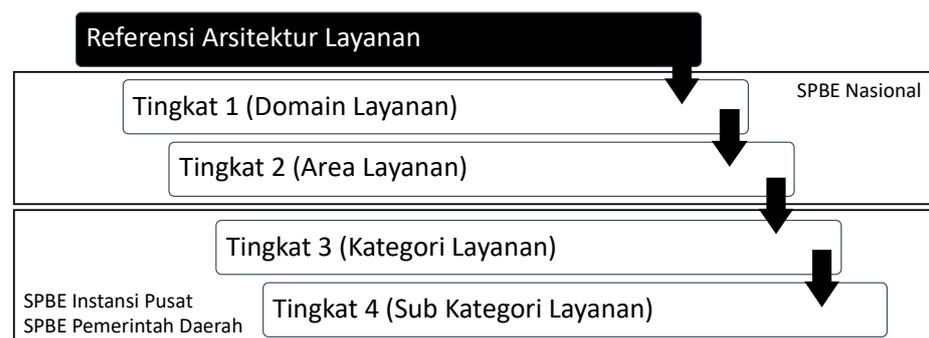
Struktur dari RAL SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai RAL tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai RAL tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya instansi akan mendefinisikan di tingkat bawahnya

C. Taksonomi RAL

RAL terdiri dari 2 (dua) domain layanan di tingkat 1 (pertama) dan 53 (lima puluh tiga) area layanan di tingkat 2 (kedua). IPPD, dalam menyusun RAL masing-masing mengacu pada RAL SPBE Nasional, serta melengkapi RAL pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 4.3 Berbagai layanan yang dapat diklasifikasikan dalam RAL, akan menjawab tujuan dan sasaran SPBE. Rincian mengenai taksonomi RAL akan dijelaskan pada Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAL.



Gambar 4.3. Struktur Referensi Arsitektur Layanan

4.1.1.4. Referensi Arsitektur Aplikasi (RAA)

A. Pemahaman RAA

RAA adalah kerangka kerja untuk mengkategorikan aplikasi untuk membantu dalam identifikasi peluang untuk berbagi, penggunaan kembali, kolaborasi dan konsolidasi dari aplikasi. Definisi dari aplikasi itu sendiri, adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan pemerintah (Perpres SPBE, Pasal 1 ayat 21).

Tujuan dari disusunnya RAA adalah menjadi acuan dalam mengklasifikasikan aplikasi dan komponennya. Dengan demikian pemetaan domain arsitektur aplikasi dapat disusun baik untuk kondisi

saat ini maupun perencanaan pengembangannya. Berdasarkan informasi yang dihasilkan dari proses pemetaan tersebut, akan membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi ataupun redundansi, peluang untuk berbagi pakai, ataupun untuk penggunaan kembali.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAA antara lain:

- 1) Taksonomi RAA disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/baru dalam penyediaan kemampuan TIK;
- 2) Aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- 3) Didefinisikan sebagai hierarki komponen aplikasi;
- 4) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- 5) Berbasis standar terbuka (*open source*);
- 6) Terkorelasi dengan RAL, dan RAD melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung RAK

RAA berlaku secara nasional, sehingga IPPD akan menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan aplikasi yang digunakan. Dengan demikian dapat dilakukan efisiensi. Pemetaan domain aplikasi SPBE yang menggunakan RAA akan dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur TIK nasional.

B. Struktur RAA

Struktur dari RAA SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

- 1) Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam 2 (dua) domain aplikasi sebagai RAA tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi SPBE ke dalam area aplikasi sesuai dengan masing-masing domain aplikasinya sebagai RAA tingkat 2 (kedua).

Selanjutnya IPPD akan mendefinisikan tingkat dibawahnya.

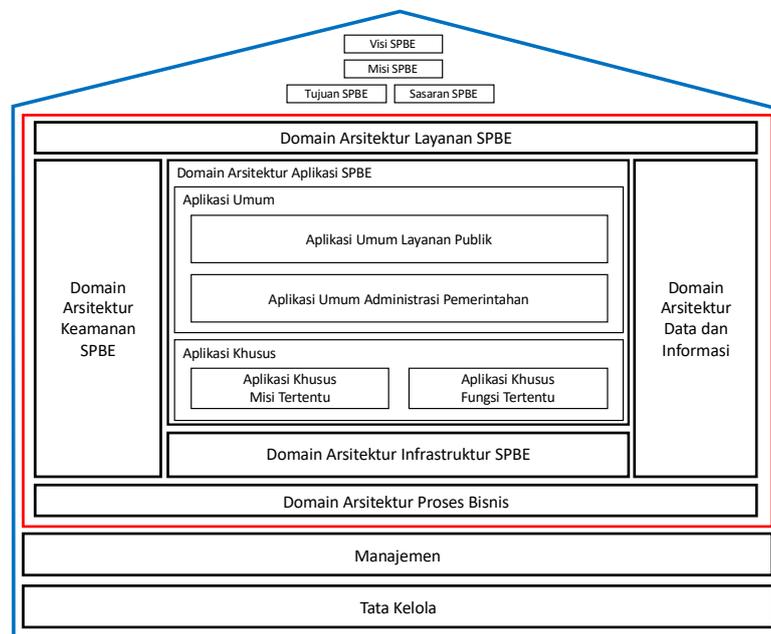
C. Taksonomi RAA

RAA terdiri dari 2 (dua) domain aplikasi di tingkat 1 dan 3 (tiga) area di tingkat 2. RAA menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi baik secara nasional maupun untuk IPPD dan menjadi dasar kebutuhan penyediaan infrastruktur TIK yang selanjutnya didefinisikan pada

Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI). IPPD, dalam menyusun RAA masing-masing mengacu pada RAA SPBE Nasional, serta melengkapi RAA pada tingkat di bawahnya sebagaimana pada Gambar 4.4. Rincian mengenai taksonomi RAA akan dijelaskan pada Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAA.



Gambar 4.4. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi



Gambar 4.5. Arsitektur SPBE pada Domain Aplikasi

4.1.1.5. Referensi Arsitektur Infrastruktur (RAI)

A. Pemahaman RAI

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya (Perpres SPBE, pasal 1 ayat 15).

Tujuan dari disusunnya RAI adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan saat ini dan yang

direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya.

Beberapa prinsip yang digunakan dalam penyusunan RAI adalah:

- 1) Taksonomi RAI harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- 2) Didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur TIK;
- 3) Dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- 4) Memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- 5) Berbasis standar umum (open standard)
- 6) Dapat digunakan untuk mendukung RAA dan RAD melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh RAK.

RAI berlaku secara nasional, sehingga IPPD menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur TIK yang dimiliki. Dengan demikian dapat dilakukan pemerataan infrastruktur TIK yang menjadi prioritas agenda pembangunan.

B. Struktur RAI

Struktur dari RAI SPBE Nasional pada 3 (tiga) tingkat teratas, yaitu:

- 1) Domain, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain sebagai RAI tingkat 1 (pertama);
- 2) Area, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam area sesuai dengan masing-masing domain infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 2 (kedua);

Kategori, yang mengelompokkan infrastruktur SPBE ke dalam kategori sesuai dengan masing-masing area infrastrukturnya sebagai RAI tingkat 3 (ketiga).

C. Taksonomi RAI

RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di tingkat 1 dan 8 (delapan) area di tingkat 2, RAI menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK baik secara nasional maupun untuk IPPD, sebagaimana pada Gambar 4.6. Rincian mengenai taksonomi RAI akan dijelaskan pada Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAI.

pelaksanaan pembangunan di Indonesia dan pada umumnya akan turut melancarkan pelaksanaan pemerataan infrastruktur TIK.

B. Struktur RAK

Struktur dari RAK SPBE Nasional terdiri atas 2 (dua) tingkat, yaitu:

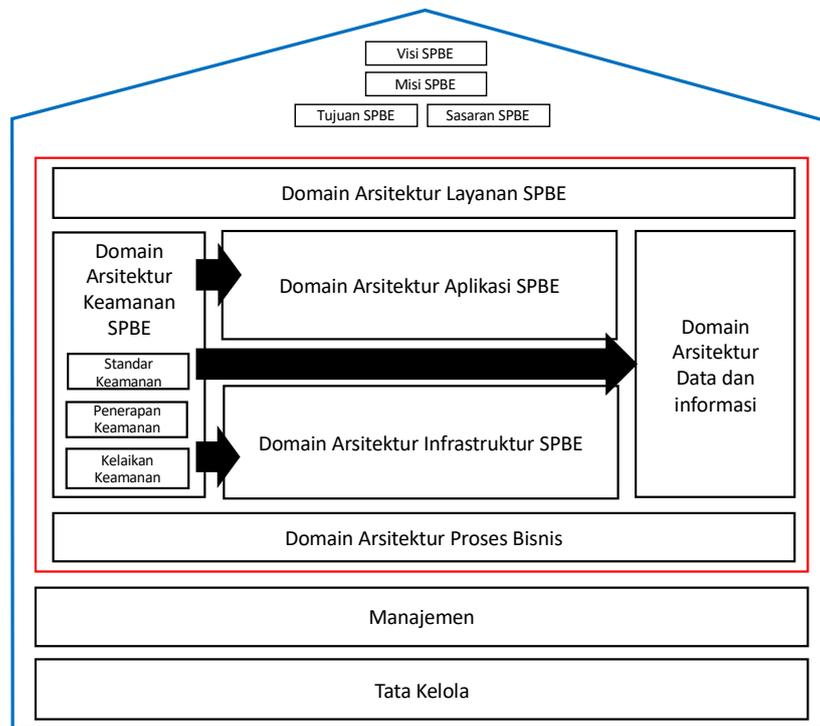
- 1) Domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan pertimbangan kelaikan keamanan, sebagai RAK tingkat 1 (pertama); dan
- 2) Area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur SPBE sebagai RAK tingkat 2 (kedua).

C. Taksonomi RAK

RAK terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat 1 dan 10 (sepuluh) area keamanan di tingkat 2. RAK menjadi acuan bagi penyusunan domain arsitektur keamanan SPBE baik secara nasional maupun untuk IPPD, sebagaimana pada Gambar 4.8. Rincian mengenai taksonomi RAI akan dijelaskan pada Lampiran Referensi Arsitektur - Taksonomi RAK.



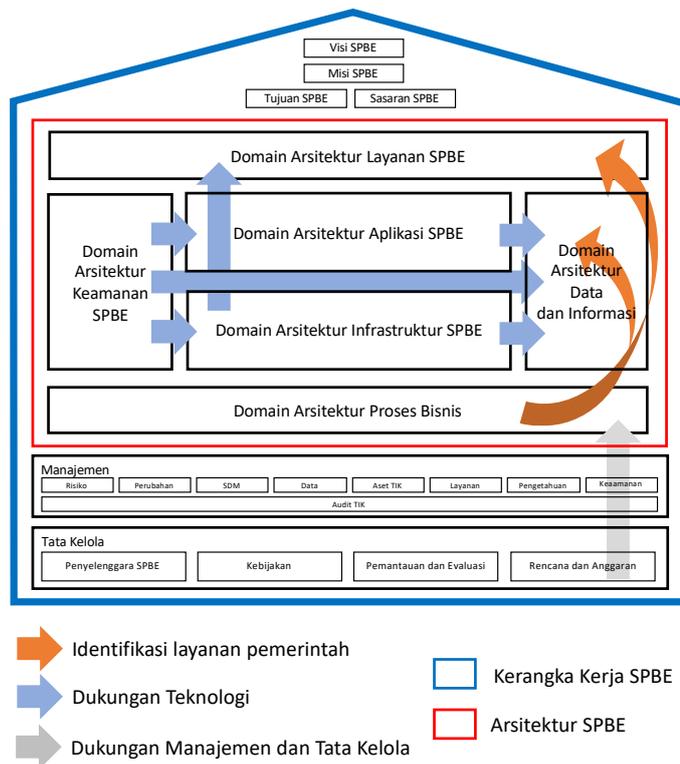
Gambar 4.8. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan



Gambar 4.9. Keterkaitan Keamanan pada Kerangka Kerja SPBE

Keterkaitan Antar Referensi Arsitektur SPBE

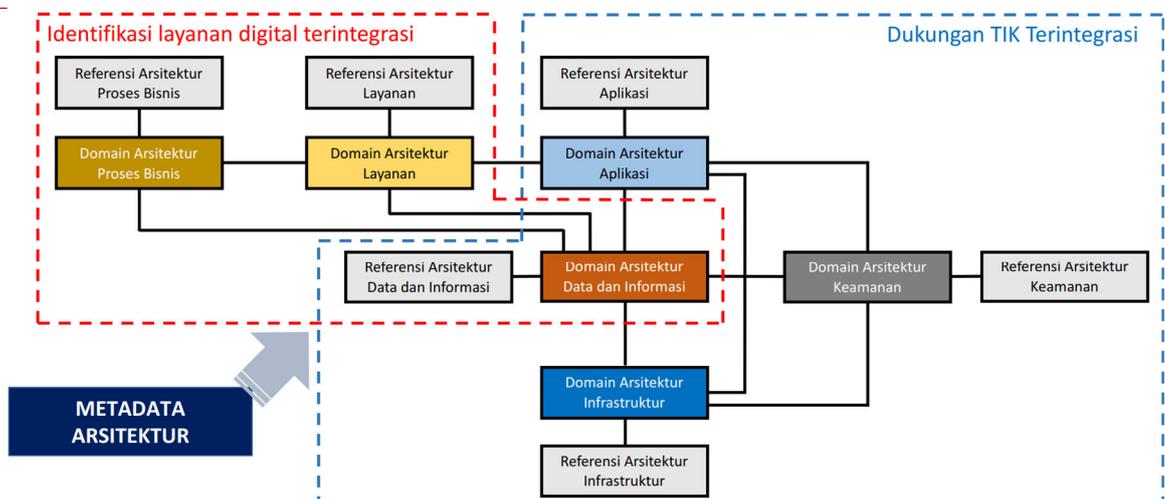
Arsitektur SPBE Nasional memiliki 6 (enam) referensi arsitektur yang mempunyai keterkaitan yang erat satu sama lain dalam domain arsitektur. Keterkaitan antar referensi arsitektur dimulai dari domain proses bisnis, yakni sebuah urusan pemerintah pada dasarnya akan memiliki data dan informasi didalamnya. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah, penggunaan data dan informasi tersebut dilakukan untuk menghasilkan layanan, di mana layanan akan berbasis elektronik, berupa aplikasi yang berjalan di atas infrastruktur TIK berbagi pakai yang handal dan aman. Setiap organisasi pemerintah, perlu mendefinisikan dengan jelas komponen-komponen ataupun entitas yang terkait dalam penyelenggaraan urusan yang diembannya. Dengan demikian, dapat dilakukan pemetaan semua entitas tersebut secara terintegrasi dengan lingkup nasional pada seluruh domain arsitektur SPBE. Kompleksitas yang ada dalam sistem pemerintahan sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pengaturan yang baik secara konvensional (non-digital).



Gambar 4.10. Keterkaitan antar referensi arsitektur SPBE

4.1.2. Domain Arsitektur SPBE Nasional

Sebagai panduan dalam tata keleola SPBE di IPPD, diperlukan domain arsitektur SPBE nasional. Domain arsitektur SPBE ini diharapkan dapat menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan secara nyata pada IPPD. Kolaborasi dan integrasi baik dari sisi aplikasi maupun infrastruktur TIK dalam menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu, dimana hal itu semua didukung oleh pelaksanaan manajemen SPBE yang komprehensif didalamnya termasuk pelaksanaan Audit TIK, serta terselenggara dengan tata kelola SPBE yang baik. Keterkaitan antara domain arsitektur dan referensi arsitektur dapat terlihat pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11. Keterkaitan antar domain dan referensi pada arsitektur SPBE

Tidak hanya dapat melihat adanya redundansi aplikasi maupun infrastruktur saja, dengan penerapan domain arsitektur SPBE yang saling terkait ini, diharapkan dapat memberikan kondisi riil pelaksanaan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi di tingkat nasional, yang dilakukan di IPPD, sehingga dapat menjadi alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya tumpang tindih pelaksanaan proses bisnis dan layanan pemerintahan di IPPD. Hal ini tentu saja dapat menjadi bahan dukung yang penting dalam proses pengambilan keputusan agar dapat mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, menuju terwujudnya *collaborative* dan *smart government*.

4.1.2.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis

Substansi arsitektur pada domain arsitektur proses bisnis yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:

- 1) proses bisnis terkait perizinan dan akreditasi;
- 2) proses bisnis terkait pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- 3) proses bisnis terkait kesehatan;
- 4) proses bisnis terkait bantuan sosial;
- 5) proses bisnis terkait hukum dan keamanan;
- 6) proses bisnis terkait pendidikan;
- 7) proses bisnis terkait pemerintahan umum; dan
- 8) proses bisnis terkait Satu Data Indonesia.

4.1.2.2. Domain Arsitektur Data dan Informasi

Substansi arsitektur pada domain arsitektur data dan informasi yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:

- 1) data terkait perizinan dan akreditasi;
- 2) data terkait pekerjaan umum;
- 3) data terkait kesehatan;
- 4) data terkait bantuan sosial;
- 5) data terkait hukum dan keamanan;
- 6) data terkait pendidikan;
- 7) data terkait pemerintahan umum;

8) data lainnya yang menjadi prioritas dalam Satu Data Indonesia.

4.1.2.3. Domain Arsitektur Layanan

Substansi arsitektur pada domain layanan SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:

- 1) layanan terkait perizinan dan akreditasi;
- 2) layanan terkait pekerjaan umum;
- 3) layanan terkait kesehatan;
- 4) layanan terkait bantuan sosial;
- 5) layanan terkait hukum dan keamanan;
- 6) layanan terkait pendidikan;
- 7) layanan terkait pemerintahan umum; dan
- 8) layanan data terbuka dalam kerangka Satu Data Indonesia.

4.1.2.4. Domain Arsitektur Aplikasi

Substansi arsitektur pada domain Aplikasi SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:

- 1) aplikasi terkait perizinan dan akreditasi;
- 2) aplikasi terkait pekerjaan umum;
- 3) aplikasi terkait kesehatan;
- 4) aplikasi terkait bantuan sosial;
- 5) aplikasi terkait ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) aplikasi terkait pendidikan;
- 7) aplikasi terkait pemerintahan umum; dan
- 8) portal Satu Data Indonesia

4.1.2.5. Domain Arsitektur Infrastruktur

Substansi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan arah kebijakan SPBE setidaknya memuat:

- 1) fasilitas komputasi;
- 2) sistem integrasi; dan
- 3) platform.

4.1.2.6. Domain Arsitektur Keamanan

Substansi arsitektur pada domain keamanan SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan arah kebijakan SPBE setidaknya memuat:

- 1) standar keamanan SPBE;
- 2) penerapan keamanan SPBE;
- 3) kelaikan keamanan SPBE pada Aplikasi Umum SPBE dan Infrastruktur SPBE nasional; dan
- 4) audit keamanan pada Aplikasi Umum SPBE.

4.1.3. Metadata Arsitektur SPBE Nasional

Domain arsitektur SPBE terdiri atas domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur, domain arsitektur aplikasi, domain arsitektur keamanan, dan domain arsitektur layanan, yang saling terkait satu sama lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, baik secara referensi arsitektur maupun pada domain arsitekturnya. Misalnya pada domain proses bisnis yang berelasi secara langsung dengan domain layanan dan secara tidak langsung (mempunyai satu lapisan perantara) dengan domain aplikasi dan domain infrastruktur. Kondisi ini tergambar dari urusan pemerintahan yang menjadi diemban sebuah institusi pemerintah akan menghasilkan layanan sebagai keluaran. Contoh keterkaitan lainnya seperti adalah domain aplikasi yang berelasi dengan domain layanan, data, dan infrastruktur. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebuah layanan yang dikeluarkan oleh sistem aplikasi menggunakan TIK (aplikasi, infrastruktur, dan keamanan TIK) dalam mempermudah dan mengefisienkan layanan tersebut. Aplikasi tersebut dijalankan pada sebuah server/cloud (infrastruktur) menggunakan data yang tersimpan pada media penyimpan di sebuah fasilitas (infrastruktur). Dengan menjalankan fungsi yang diperlukan pada proses bisnis tertentu, aplikasi akan menghasilkan layanan secara elektronik secara mudah dan optimal.

Arsitektur SPBE memiliki metadata arsitektur yang merupakan model terstruktur untuk memudahkan penggambaran hubungan antar domain arsitektur tersebut. Metadata arsitektur memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi, dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap domain arsitekturnya. Masing-masing metadata arsitektur memiliki

beberapa atribut yang merupakan karakteristik/ciri yang mendefinisikan metadata arsitekturnya. Metadata arsitektur ini dapat merepresentasikan entitas yang terdapat pada arsitektur SPBE secara lebih jelas. Oleh karena itu dapat disusun sebuah model metadata (metamodel) yang menggambarkan hubungan antara entitas-entitas yang ada dalam arsitektur SPBE. Model metadata arsitektur SPBE nasional ini dapat dijadikan pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga/daerah dalam menyusun arsitektur SPBE-nya masing-masing.

4.1.3.1. Entitas dalam Metadata Arsitektur SPBE

Sebuah metadata yang merupakan informasi dari sebuah data harus dapat memberikan penjelasan secara ringkas mengenai data tersebut. Dalam rangka menganalisis hubungan antar metadata yang digunakan dalam Arsitektur SPBE, digunakan pemodelan metadata jaringan dari referensi arsitekturnya, di mana setiap metadata arsitektur SPBE memiliki entitas yang dapat mempunyai beberapa induk dan beberapa anak. Untuk mendapatkan hubungan antar metadata yang jelas maka perlu dihindari terjadinya hubungan internal (internal loop) dalam sebuah entitas. Menghadapi hal ini perlu dilakukan analisa setiap entitas metadata apakah terjadi hubungan internal atau tidak. Bila diketahui terdapat hubungan internal, maka entitas tersebut perlu dilakukan dekomposisi (pemecahan entitas yang menyesuaikan referensi arsitektur satu level di bawahnya). Dengan pemahaman seperti di atas, entitas dalam arsitektur SPBE nasional, sebagai berikut:

1) Arsitektur Proses Bisnis

Berisi informasi mengenai urusan pemerintahan yang diselenggarakan. Entitas Metadata Arsitektur proses bisnis dapat mewakili Referensi Arsitektur proses bisnis.

2) Arsitektur Data dan Informasi

Entitas Metadata Arsitektur Data Dan Informasi pada dasarnya hanya terhubung dengan media penyimpan sebelum selanjutnya digunakan dalam aplikasi. Pada entitas ini tidak terdapat hubungan internal sehingga tidak perlu dilakukan dekomposisi.

3) Arsitektur Layanan

Entitas Metadata Arsitektur Layanan akan berisi informasi mengenai luaran atau hasil dari sebuah/beberapa urusan pemerintahan sebagai induknya. Sebagai hubungan anak, arsitektur layanan berhubungan dengan arsitektur aplikasi sebagai perangkat yang memberikan layanan tersebut. Pada entitas ini tidak terdapat hubungan internal sehingga tidak perlu dilakukan dekomposisi.

4) Arsitektur Aplikasi

Entitas Metadata Arsitektur Aplikasi menjadi entitas yang mempergunakan data dan informasi untuk menghasilkan layanan yang diinginkan. Aplikasi memerlukan sebuah platform (domain infrastruktur) untuk dioperasikan. Walaupun memiliki banyak hubungan dengan entitas lain, Metadata Arsitektur Aplikasi tidak mempunyai hubungan internal sehingga tidak perlu dilakukan dekomposisi.

5) Arsitektur Infrastruktur

Entitas Metadata Arsitektur Infrastruktur merupakan metadata yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan. Pada Arsitektur SPBE, infrastruktur dikelompokkan menjadi fasilitas, jaringan dan platform. Dalam penggunaannya dapat dikatakan akan selalu menggunakan ketiga kelompok tadi. Sehingga jelas terjadi hubungan internal dalam Metadata Arsitektur Infrastruktur ini dan perlu dilakukan dekomposisi.

6) Arsitektur Keamanan

Entitas Metadata Arsitektur Keamanan pada tahap awal pembangunan Arsitektur SPBE ini didedikasikan untuk mengamankan domain data dan informasi, aplikasi, serta infrastruktur. Dalam penerapannya, Metadata Arsitektur Manajemen Keamanan merupakan penambahan atribut manajemen keamanan sebagai kelengkapan dari metadata Data dan Informasi, Aplikasi, serta Infrastruktur.

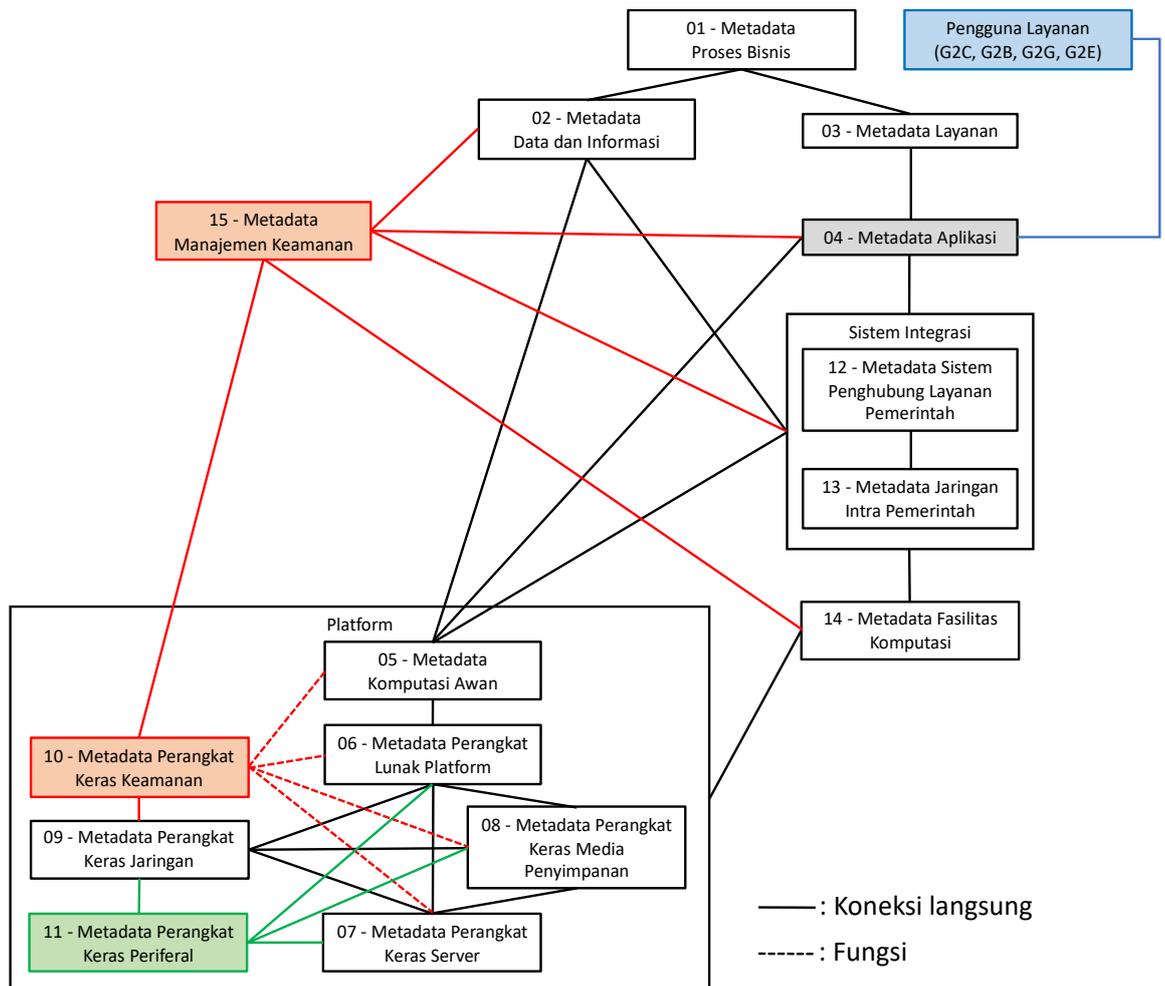
4.1.3.2. Model Relasi Metadata Arsitektur SPBE

Sesuai dengan domain arsitektur, maka setiap domain akan memiliki metadata, dengan daftar sebagai berikut:

- 1) Domain arsitektur proses bisnis dengan metadata proses bisnis (01);
- 2) Domain arsitektur data dan informasi dengan metadata data dan informasi (02);

- 3) Domain arsitektur layanan SPBE dengan metadata layanan (03);
- 4) Domain arsitektur aplikasi SPBE dengan metadata aplikasi (04);
- 5) Domain arsitektur infrastruktur SPBE dengan metadata sebagai berikut:
 - Metadata komputasi awan (05);
 - Metadata perangkat lunak platform (06);
 - Metadata perangkat keras server (07);
 - Metadata perangkat keras media penyimpanan (08);
 - Metadata perangkat keras jaringan (09);
 - Metadata perangkat keras keamanan (10);
 - Metadata perangkat keras periferal (11);
 - Metadata sistem penghubung layanan pemerintah (12);
 - Metadata jaringan intra pemerintah (13);
 - Metadata fasilitas komputasi (14).
- 6) Domain arsitektur keamanan SPBE dengan metadata keamanan (15).

Pada Gambar 4.12 dapat dilihat ilustrasi dari model relasi antar metadata arsitektur SPBE secara keseluruhan.



Gambar 4.12. Relasi Metadata Arsitektur SPBE

4.1.3.3. Atribut Metadata Arsitektur SPBE

Atribut metadata arsitektur SPBE adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan metadata suatu arsitektur SPBE. Atribut tersebut digunakan untuk membedakan metadata arsitektur SPBE dengan metadata lainnya. Rincian mengenai atribut metadata arsitektur SPBE ini akan dijelaskan pada Lampiran Referensi Arsitektur - Metadata.

4.2. Arsitektur SPBE Kabupaten Kubu Raya

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah perlu menyusun arsitektur organisasinya masing-masing dengan mengacu pada arsitektur SPBE nasional.

Perlu diperhatikan dalam penyusunan arsitektur ini adalah arsitektur SPBE instansi pusat ataupun arsitektur SPBE pemerintah daerah merupakan bagian dari arsitektur SPBE nasional. Sehingga wawasan yang perlu dibangun perlu dikembangkan pada lingkup nasional (bukan sektoral). Dengan demikian Pemerintah Daerah yang membangun arsitekturnya perlu memastikan keselarasan arsitektur yang disusun dengan arsitektur SPBE nasional. Dalam hal ini, penggunaan referensi arsitektur sebagai pemersatu bahasa akan sangat membantu untuk melakukan penyelarasan tersebut.

Untuk beberapa referensi arsitektur perlu diurai lebih jauh oleh Pemerintah Daerah yaitu tingkat 3 dan tingkat 4 sesuai dengan referensi arsitektur tingkat di atasnya pada referensi arsitektur berikut ini :

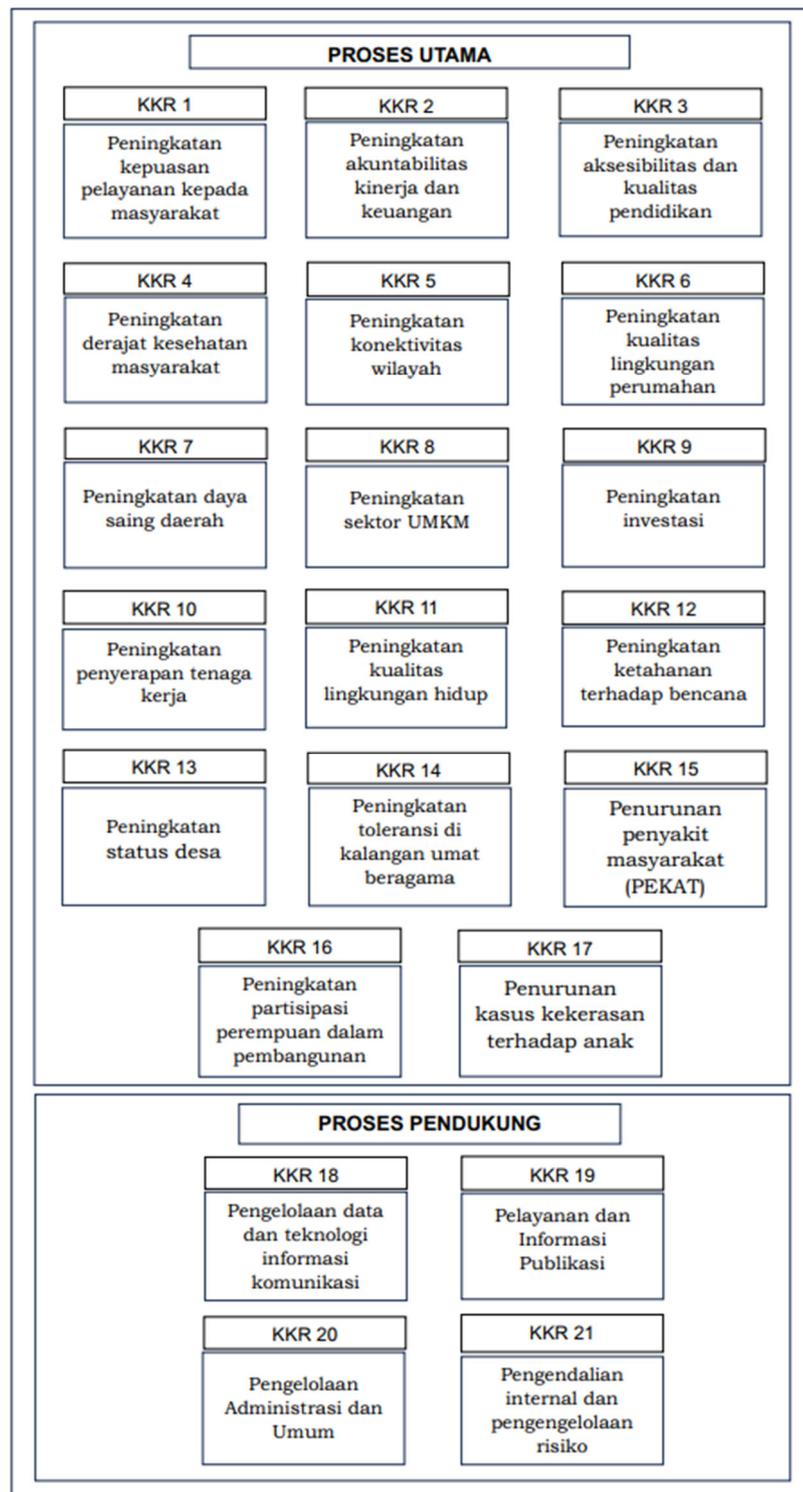
4.2.1 Domain Arsitektur Proses Bisnis

Proses bisnis adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau menghasilkan suatu produk atau layanan tertentu.

Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut.

Secara umum, proses bisnis dalam pemerintahan daerah, sesuai dengan UU No. 23 tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan manajerial. Setiap proses bisnis yang ada dalam ketiga kelompok urusan tersebut menunjang tercapainya visi, misi, tujuan,

dan sasaran pembangunan daerah yang telah dicanangkan dalam RPJMD. Proses-proses bisnis yang dicakup oleh Pemkab Kubu Raya digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.13 Peta Proses Bisnis Utama dan Pendukung Substansi arsitektur pada domain arsitektur proses bisnis yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:

- a. Proses Bisnis terkait Ekonomi dan Industri;
- b. Proses Bisnis terkait Pendidikan;
- c. Proses Bisnis terkait Kesehatan;
- d. Proses Bisnis terkait Pembangunan Kewilayahan;
- e. Proses Bisnis terkait Hukum dan Keamanan;
- f. Proses Bisnis terkait Sosial;
- g. Proses Bisnis terkait Satu Data Indonesia;
- h. Proses Bisnis terkait Pemerintahan Umum.

Rincian dari domain arsitektur proses bisnis yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, pada Tabel 4.1

Tabel 4.1. Identifikasi Target Domain Arsitektur Proses Bisnis.

Kebijakan	Domain Arsitektur Proses Bisnis	Deskripsi Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Proses Bisnis	Kode Domain Arsitektur Terkait
Ekonomi dan Industri	[KKR-DAB01] Peningkatan daya saing daerah	Proses bisnis terkait daya saing daerah	RAB.02 Ekonomi dan Industri RAB.02.03 Pertanian RAB.02.03.06 Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing	[KKR-DAD01] [KKR-DAL01]
	[KKR-DAB02] Peningkatan sektor UMKM	Proses bisnis terkait sektor UMKM	RAB.02 Ekonomi dan Industri RAB.02.10 Usaha Kecil Dan Menengah RAB.02.10.01 Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah	[KKR-DAD02] [KKR-DAL02]

	[KKR-DAB03] Peningkatan investasi	Proses bisnis terkait investasi	RAB.02 Ekonomi dan Industri RAB.02.08 Investasi RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	[KKR-DAD03] [KKR-DAL03]
	[KKR-DAB04] Peningkatan penyerapan tenaga kerja	Proses bisnis terkait penyerapan tenaga kerja	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja RAB.06.02 Ketenagakerjaan RAB.06.02.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	[KKR-DAD04] [KKR-DAL04]
	[KKR-DAB05] Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Proses bisnis terkait partisipasi perempuan dalam pembangunan	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan RAB.04.03.02 Pemberdayaan Perempuan	[KKR-DAD05] [KKR-DAL05]
Pendidikan	[KKR-DAB06] Peningkatan aksesibilitas	Proses bisnis terkait aksesibilitas	RAB.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja	[KKR-DAD06] [KKR-DAL06]

	dan kualitas pendidikan	dan kualitas pendidikan	RAB.06.01 Pendidikan RAB.06.01.01 Pembinaan Pendidikan Regional	
Kesehatan	[KKR-DAB07] Peningkatan derajat kesehatan Masyarakat	Proses bisnis terkait derajat kesehatan masyarakat	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan RAB.04.01 Kesehatan RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	[KKR-DAD07] [KKR-DAL07]
Pembangunan Kewilayahan	[KKR-DAB08] Peningkatan konektivitas wilayah	Proses bisnis terkait konektivitas wilayah	RAB.09 Pemerintahan Umum RAB.09.06 Aparatur Negara RAB.09.01.06 Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah	[KKR-DAD08] [KKR-DAL08]
	[KKR-DAB09] Peningkatan status desa	Proses bisnis terkait status desa	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan RAB.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	[KKR-DAD09] [KKR-DAL09]

			RAB.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	[KKR-DAB10] Peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang sehat	Proses bisnis terkait kualitas lingkungan perumahan yang sehat	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan RAB.03.04 Perumahan RAB.03.04.05 Penyelenggaraan Perumahan	[KKR- DAD10] [KKR- DAL10]
	[KKR-DAB11] Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Proses bisnis terkait kualitas lingkungan hidup	RAB.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam RAB.07.05 Lingkungan Hidup RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	[KKR- DAD11] [KKR- DAL11]
Hukum dan Keamanan	[KKR-DAB12] Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	Proses bisnis terkait kasus kekerasan terhadap anak	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan RAB.04.03 Pemberdayaan Perempuan RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	[KKR- DAD12] [KKR- DAL12]

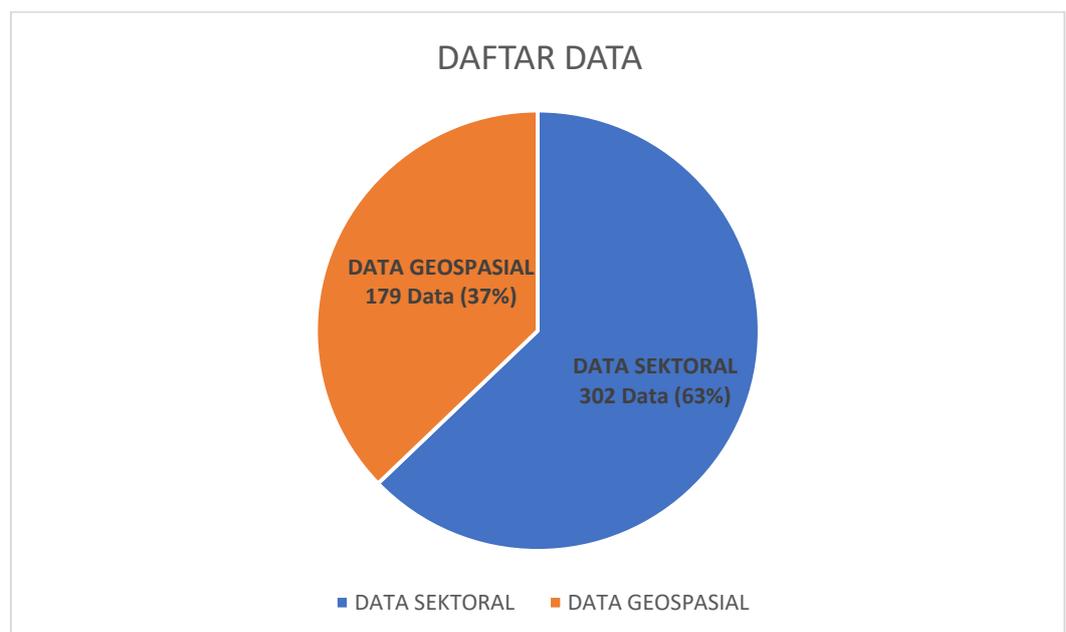
	[KKR-DAB13] Penurunan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Proses bisnis terkait Penyakit Masyarakat (Pekat)	RAB.09 Pemerintahan Umum RAB.09.01 Dalam Negeri RAB.09.01.02 Kebijakan Politik Dan Pemerintahan Umum	[KKR- DAD13] [KKR- DAL13]
Sosial	[KKR-DAB14] Peningkatan ketahanan terhadap bencana	Proses bisnis terkait ketahanan terhadap bencana	RAB.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan RAB.04.02 Sosial RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	[KKR- DAD14] [KKR- DAL14]
	[KKR-DAB15] Peningkatan toleransi di kalangan umat beragama	Proses bisnis terkait toleransi beragama	RAB.08 Budaya dan agama RAB.08.01 Agama RAB.08.01.01 Bimbingan Masyarakat Keagamaan	[KKR- DAD15] [KKR- DAL14]
Satu Data Indonesia	[KKR-DAB16] Pengelolaan data dan teknologi informasi komunikasi (Probis Pendukung)	Proses bisnis terkait Pengelolaan data (statistik sektoral, geospasial dan keuangan)	RAB.09 Pemerintahan Umum RAB.09.03 Informasi RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	[KKR- DAD16] [KKR- DAL15]

		dan teknologi informasi komunikasi		
	[KKR-DAB17] Pelayanan dan Informasi Publikasi (Probis Pendukung)	Proses bisnis terkait Pelayanan dan Informasi Publikasi	RAB.09 Pemerintahan Umum RAB.09.03 Informasi RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	[KKR-DAD17] [KKR-DAL15]
Pemerintahan Umum	[KKR-DAB18] Pengelolaan Administrasi dan Umum (Probis Pendukung)	Proses bisnis terkait Pengelolaan Administrasi dan Umum	RAB.09 Pemerintahan Umum RAB.09.06 Aparatur Negara RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	[KKR-DAD18] [KKR-DAL16]
	[KKR-DAB19] Manajemen Resiko (Probis Pendukung)	Proses bisnis terkait Manajemen Resiko	RAB.09 Pemerintahan Umum RAB.09.06 Aparatur Negara RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	[KKR-DAD19] [KKR-DAL17]

	[KKR-DAB20] Peningkatan kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Proses bisnis terkait kepuasan pelayanan kepada masyarakat	RAB.09 Pemerintahan Umum RAB.09.06 Aparatur Negara RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	[KKR-DAD20] [KKR-DAL18]
	[KKR-DAB21] Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Proses bisnis terkait akuntabilitas kinerja dan keuangan	RAB.09 Pemerintahan Umum RAB.09.06 Aparatur Negara RAB.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja	[KKR-DAD21] [KKR-DAL19]

4.2.2 Domain Arsitektur Data dan Informasi

Berdasarkan Keputusan Bupati Kubu Raya Nomor 527/BAPPEDALITBANG/2022 tentang Daftar Data Sektor dan Data Geospasial Kabupaten Kubu Raya dapat disimpulkan sebagai berikut :



Gambar 4.14 Daftar Data

Substansi arsitektur pada domain arsitektur data dan informasi yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:

- a. Data dan Informasi terkait Ekonomi dan Industri;
- b. Data dan Informasi terkait Pendidikan;
- c. Data dan Informasi terkait Kesehatan;
- d. Data dan Informasi terkait Pembangunan Kewilayahan;
- e. Data terkait Hukum dan Keamanan;
- f. Data terkait Sosial;
- g. Data terkait Satu Data Indonesia;
- h. Data terkait Pemerintahan Umum.

Rincian dari domain arsitektur data dan informasi yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Identifikasi Target Domain Arsitektur Data dan Informasi

Kebijakan	Domain Arsitektur Data dan Informasi	Deskripsi Data dan Informasi	Referensi Arsitektur Data dan Informasi	Kode Domain Arsitektur Terkait
Ekonomi dan Industri	[KKR-DAD01] data ekonomi pendapatan domestik regional bruto	data dan informasi terkait nilai tambah barang dan jasa	RAD.09 Pemerintahan Umum RAD.09.02 Data Keuangan RAD.09.02.05 Penganggaran	[KKR-DAB01] [KKR-DAL01] [KKR-DAA01] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
	[KKR-DAD02] data usaha mikro kecil,	data dan informasi terkait Unit Usaha, Tenaga	RAD.02 Ekonomi dan Industri	[KKR-DAB02] [KKR-DAL02]

	dan menengah	Kerja dan Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah	RAD.02.10 Usaha Kecil Dan Menengah RAD.02.10.03 Pengelolaan Produksi Dan Pemasaran Usaha Kecil Dan Menengah	[KKR-DAA01] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
	[KKR-DAD03] data penanaman modal dalam negeri	data dan informasi terkait Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	RAD.02 Ekonomi dan Industri RAD.02.08 Investasi RAD.02.08.02 Manajemen Penanaman Modal	[KKR-DAB03] [KKR-DAL03] [KKR-DAA01] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
	[KKR-DAD04] Data Pencari Kerja	data dan informasi terkait Pencari Kerja	RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja RAD.06.02 Ketenagakerjaan RAD.06.02.01 Bidang Ketenagakerjaan	[KKR-DAB04] [KKR-DAL04] [KKR-DAA01] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
	[KKR-DAD05] Data Partisipasi	data dan informasi terkait	RAD.04 Perlindungan	[KKR-DAB05]

	Perempuan dalam pembangunan	Partisipasi Perempuan dalam pembangunan	Sosial dan Kesehatan RAD.04.03 Pemberdayaan Perempuan RAD.04.03.02 Pemberdayaan Perempuan	[KKR-DAL05] [KKR-DAA01] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
Pendidikan	[KKR-DAD06] Data sektor pendidikan	data dan informasi terkait Data Sekolah, peserta didik, dan tenaga pendidik	RAD.06 Pendidikan dan Tenaga Kerja RAD.06.01 Pendidikan RAD.06.01.01 Pembinaan Pendidikan Regional	[KKR-DAB06] [KKR-DAL06] [KKR-DAA02] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
Kesehatan	[KKR-DAD07] Data sektor kesehatan	data dan informasi terkait sektor Kesehatan (fasilitas Kesehatan, tenaga Kesehatan, SPM Kesehatan dst)	RAD.04 Perlindungan Sosial dan Kesehatan RAD.04.01 Kesehatan RAD.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	[KKR-DAB07] [KKR-DAL07] [KKR-DAA03] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
Pembangunan	[KKR-DAD08] Data	data dan informasi terkait	RAD.09 Pemerintahan Umum	[KKR-DAB08]

Kewilayah an	infrastruktur wilayah	infrastruktur wilayah	RAD.09.01 Dalam Negeri RAD.09.01.04 Pemerintahan Daerah	[KKR- DAL08] [KKR- DAA04] [KKR- DAI01-03] [KKR- DAK01- 03]
	[KKR-DAD09] Data Desa Membangun	data dan informasi terkait Desa Membangun	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan RAD.03.05 Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal RAD.03.05.03 Pembangunan Desa Dan Kawasan Pedesaan	[KKR- DAB09] [KKR- DAL09] [KKR- DAA04] [KKR- DAI01-03] [KKR- DAK01- 03]
	[KKR-DAD10] Data rumah layak huni	data dan informasi terkait rumah layak huni	RAD.03 Pembangunan Kewilayahan RAD.03.04 Perumahan RAD.03.04.03 Pengembang an Kawasan Permukiman	[KKR- DAB10] [KKR- DAL10] [KKR- DAA04] [KKR- DAI01-03] [KKR- DAK01- 03]

	[KKR-DAD11] Data kualitas lingkungan hidup	data dan informasi terkait kualitas lingkungan hidup	RAD.07 Lingkungan dan Sumber Daya Alam RAD.07.05 Lingkungan Hidup RAD.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	[KKR-DAB11] [KKR-DAL11] [KKR-DAA04] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
Hukum dan Keamanan	[KKR-DAD12] Data kasus kekerasan terhadap anak	data dan informasi terkait kasus kekerasan terhadap anak	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan RAD.04.03 Data Pemberdayaan Perempuan RAD.04.03.04 Perlindungan Anak	[KKR-DAB12] [KKR-DAL12] [KKR-DAA05] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
	[KKR-DAD13] Data Pelanggaran Perda & Perbup	data dan informasi terkait Pelanggaran Perda & Perbup	RAD.05 Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan RAD.05.01 Data Hukum RAD.05.01.01 Penyelenggara an Peraturan Dan	[KKR-DAB13] [KKR-DAL13] [KKR-DAA05] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]

			Perundang- Undangan	
Sosial	[KKR-DAD14] desa tangguh bencana (Destana)	data dan informasi terkait desa tangguh bencana (Destana)	RAD.04 Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan RAD.04.02 Data Sosial RAD.04.02.06 Penanggulang an Bencana	[KKR- DAB14] [KKR- DAL14] [KKR- DAA06] [KKR- DAI01-03] [KKR- DAK01- 03]
	[KKR-DAD15] Peningkatan toleransi di kalangan umat beragama	data dan informasi terkait	RAD.08 Informasi Budaya dan agama RAD.08.01 Data Agama RAD.08.01.01 Bimbingan Masyarakat Keagamaan	[KKR- DAB15] [KKR- DAL14] [KKR- DAA06] [KKR- DAI01-03] [KKR- DAK01- 03]
Satu Data Indonesia	[KKR-DAD16] Pengelolaan data dan teknologi informasi komunikasi	data dan informasi terkait data dan teknologi informasi komunikasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum RAD.09.03 Data Informasi RAD.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	[KKR- DAB16] [KKR- DAL15] [KKR- DAA07] [KKR- DAI01-03]

				[KKR-DAK01-03]
	[KKR-DAD17] data Pelayanan dan Informasi Publikasi	data dan informasi terkait Pelayanan dan Informasi Publikasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum RAD.09.03 Data Informasi RAD.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik	[KKR-DAB17] [KKR-DAL15] [KKR-DAA07] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
Pemerintah an Umum	[KKR-DAD18] Pengelolaan Administrasi dan Umum	data dan informasi terkait Administrasi dan Umum	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum RAD.09.06 Data Aparatur Negara RAD.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara	[KKR-DAB18] [KKR-DAL16] [KKR-DAA08] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
	[KKR-DAD19] Manajemen Resiko	data dan informasi terkait Manajemen Resiko SPBE	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum RAD.09.06 Data Aparatur Negara RAD.09.06.07 Manajemen	[KKR-DAB19] [KKR-DAL17] [KKR-DAA08] [KKR-DAI01-03]

			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	[KKR-DAK01-03]
	[KKR-DAD20] Data kepuasan pelayanan kepada masyarakat	data dan informasi terkait kepuasan masyarakat	RAD.09 Pemerintahan Umum RAD.09.06 Aparatur Negara RAD.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	[KKR-DAB20] [KKR-DAL18] [KKR-DAA08] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
	[KKR-DAD21] Data dokumen perencanaan	data dan informasi terkait perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun	RAD.09 Pemerintahan Umum RAD.09.02 Data Keuangan RAD.09.02.05 Penganggaran	[KKR-DAB21] [KKR-DAL19] [KKR-DAA08] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]

4.2.3 Domain Arsitektur Layanan SPBE

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Secara umum terdapat dua jenis layanan, yaitu layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik.

Berikut ini adalah layanan yang diselenggarakan oleh Pemkab Kubu Raya, sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan ke seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemkab Kubu Raya.

Tabel 4.3. Daftar Layanan

ID	Nama Layanan	Deskripsi Layanan	OPD/Unit Pelaksana	Target Pengguna Layanan
1	Layanan Administrasi Kependudukan	Validasi dan Verifikasi Administrasi (KK, Permohonan KTP, Ket. Pindah Penduduk, Surat Keterangan lainnya)	DISDUKCAPIL	Masyarakat
2	Layanan Arsip Statis	Melakukan Akuisisi Arsip dari Perangkat Daerah, Menginventarisir Arsip dan membuat Guide Arsip	DISARPUS	Seluruh OPD
3	Layanan informasi barang terkena pajak	Sistem yang mengelola data Wajib Pajak dan Objek Pajak	BAPENDA	Wajib Pajak
4	Layanan informasi penanaman modal	Layanan berbantuan bagi pelaku usaha secara Online	DPMPSTP	Pelaku Usaha
5	Layanan informasi produk hukum Kabupaten Kubu Raya	Layanan yang menyediakan data produk-produk hukum yang dapat diakses secara online	SETDA Bagian Hukum	Masyarakat
7	Layanan informasi umum	Menyampaikan Berita, Konten Media dan informasi kegiatan tentang Dinas terkait	Semua OPD	Masyarakat
8	Layanan kepegawaian	Layanan internal kepegawaian, misalkan pengajuan cuti, dll.	BKPSDM	ASN
9	Layanan Pelaporan bencana daerah	Ketika ada bencana, anggota grup dapat melaporkan kejadian	BPBD	Internal
10	Layanan pemberian informasi terkait penyimpanan LB3	Memberikan layanan berupa Pengecekan Tempat Penyimpanan LB3 yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku	DLH	Pelaku Usaha, Masyarakat
11	Layanan <i>dashboard</i> kinerja organisasi pemerintahan	Layanan <i>dashboard</i> untuk melihat capaian kinerja OPD	Setda Bag Organisasi	Seluruh OPD

ID	Nama Layanan	Deskripsi Layanan	OPD/Unit Pelaksana	Target Pengguna Layanan
12	Layanan pembuatan laporan kinerja organisasi pemerintahan	layanan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara dan pengintegrasian informasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja, dilaksanakan melalui penyelenggaraan, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara online di lingkungan Pemerintah Kab. Kubu Raya	SETDA Bag Organisasi	Seluruh OPD
13	Layanan Pemeriksaan SPPL dan Pemberian Rekomendasi terkait UKL-UPL	Memberikan Layanan Pemeriksa SPPL, dan Rekomendasi UKLUPL kepada Badan Usaha	DLH	Badan Usaha
14	Layanan pemerintah pusat terkait dengan jaminan sosial	SIKS-NG adalah aplikasi Data Kemiskinan yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos	DINSOS	Masyarakat
15	Layanan pencarian kerja untuk masyarakat Kabupaten Kubu Raya	Sistem ini mempermudah dalam pencarian lowongan pekerjaan, pengurusan kartu pekerja, serta memberikan informasi seputar keberadaan industri kecil menengah dan perusahaan industri yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya	DISTRANSNAKER	Masyarakat
16	Layanan pendaftaran pasien rawat jalan	Aplikasi yang digunakan untuk masyarakat melakukan pendaftaran	RSUD	Masyarakat
17	Layanan Pendataan anak putus sekolah	Sebagai wadah Pendataan terhadap anak yang putus sekolah	DIKBUD	Masyarakat
18	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Sarana/Layanan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing.	SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaku Usaha, Masyarakat
20	Layanan Penilaian Kinerja Penyedia Barang dan Jasa	Sarana/Layanan untuk Menilai Kinerja Penyedia.	SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaku Usaha, Masyarakat

ID	Nama Layanan	Deskripsi Layanan	OPD/Unit Pelaksana	Target Pengguna Layanan
21	Layanan pengaduan	Sarana bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya dalam menyampaikan aspirasi serta berbagai permasalahan dan keluhan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah.	DISKOMINFO	Masyarakat
22	Layanan pengawasan kinerja Organisasi dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	Aplikasi untuk monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan	Setda Bag Organisasi	Seluruh OPD
23	Layanan penginputan laporan masyarakat	Layanan penginputan laporan harian setiap bidang.	SATPOLPP	Masyarakat
24	Layanan penyediaan informasi terkait pembangunan daerah	Membantu penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah, penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan daerah secara elektronik yang pelaksanaannya oleh pemerintah daerah secara nasional.	BAPPEDALITBANG	Seluruh OPD, Masyarakat
25	Layanan penyediaan informasi terkait pembangunan daerah	System yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengelola data pembangunan daerah	BAPPEDALITBANG	Bakesbangpol
26	Layanan Perencanaan yang diberikan kepada OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Kubu Raya	Membantu Pihak Bappeda dan SKPD dalam merumuskan rencana kerja sesuai dengan usulan yang ada dalam dokumen hasil Musrenbang. Membantu Bappeda dan SKPD dalam menyusun Indikator Kinerja yang terukur, sistematis dan berkelanjutan.	BAPPEDALITBANG	Seluruh OPD

ID	Nama Layanan	Deskripsi Layanan	OPD/Unit Pelaksana	Target Pengguna Layanan
27	Layanan Perizinan	Aplikasi SICANTIK Cloud hadir untuk mempermudah perizinan berusaha mulai dari masyarakat hingga pemerintah.	DPMPTSP	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha
28	Layanan perizinan pembangunan gedung	Pengurusan Izin Bangunan Gedung	PUPR	Dispurpr
29	Layanan Perpustakaan	Untuk Peminjaman masih menggunakan Cara Konvensional yaitu meninggalkan KTP untuk meminjam buku sedangkan untuk baca di tempat hanya mengisi buku tamu	Diperpusip	Masyarakat, Anggota Perpustakaan
30	Layanan sosialisasi Informasi Kepada Masyarakat	Menyampaikan Berita, Konten Media dan informasi kegiatan tentang Dinas terkait	OPD	Masyarakat
31	Layanan supervisi pengawasan Kependidikan	Untuk memudahkan pengawas dalam proses supervisi dan pelayanan	DIKBUD	Pengawas
32	Layanan terkait pengadaan barang dan jasa	Sarana/Layanan untuk Mengumumkan RUP.	SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Masyarakat
33	Layanan Uji KIR Online	Pendaftaran kendaraan yang akan diuji dan langsung terhubung dengan kementerian	DISHUB	Masyarakat
34	Layanan verifikasi dokumen pindah domisili	Memverifikasi surat pindah domisili yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan atau Desa	Kecamatan	Masyarakat
35	P Care	Pelayanan Kesehatan Faskes tingkat pertama	DINKES	Masyarakat
36	Pelayanan UKM	Pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan ke Masyarakat	Puskesmas	Masyarakat

ID	Nama Layanan	Deskripsi Layanan	OPD/Unit Pelaksana	Target Pengguna Layanan
37	Pelayanan UKP	Pelayanan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) yaitu memberikan pelayanan Kesehatan ke pasien (Berobat, Pemeriksaan penunjang Laboratorium, Pelayanan Surat Keterangan Berbadan Kesehatan, pelayanan rawat inap keperawatan dan kebidanan)	Puskesmas	Masyarakat
38	Layanan WBS (Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat)	Layanan Pelaporan masyarakat	Inspektorat	Masyarakat

Substansi arsitektur pada domain layanan SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:

- a. Layanan terkait Ekonomi dan Industri;
- b. Layanan terkait Pendidikan;
- c. Layanan terkait Kesehatan;
- d. Layanan terkait Pembangunan Kewilayahan;
- e. Layanan terkait Hukum dan Keamanan;
- f. Layanan terkait Sosial;
- g. Layanan terkait Satu Data Indonesia;
- h. Layanan terkait Pemerintahan Umum.

Rincian dari domain arsitektur layanan SPBE yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Identifikasi Target Domain Arsitektur Layanan SPBE

Kebijakan	Domain Arsitektur Layanan	Deskripsi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan	Kode Domain Arsitektur Terkait
Ekonomi dan	[KKR-DAL01] Layanan	Layanan terkait	RAL.01 Layanan Publik	[KKR-DAB01]

Industri	Manajemen Ekonomi	Manajemen Ekonomi	RAL.01.05 Industri RAL.01.05.01 Manajemen Ekonomi Kreatif	[KKR- DAD01] [KKR- DAA01]
	[KKR-DAL02] Layanan Koperasi Dan Usaha Mikro	Layanan terkait Koperasi Dan Usaha Mikro	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.13 Koperasi RAL.01.13.01 Koperasi Dan Usaha Mikro	[KKR- DAB02] [KKR- DAD02] [KKR- DAA01]
	[KKR-DAL03] Layanan Pengembang an Sektor Usaha Penanaman Modal	Layanan terkait Pengembang an Sektor Usaha Penanaman Modal	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi RAL.01.16.04 Perizinan Penanaman Modal	[KKR- DAB03] [KKR- DAD03] [KKR- DAA01]
	[KKR-DAL04] Layanan Pengelolaan Ketenagakerj aan	Layanan terkait Pengelolaan Ketenagakerja an	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.32 Ketenagakerjaan RAL.01.32.02 Pengelolaan Ketenagakerjaan	[KKR- DAB04] [KKR- DAD04] [KKR- DAA01]
	[KKR-DAL05] Layanan Pemberdayaa n Perempuan	Layanan Pemberdayaan Perempuan terkait	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan	[KKR- DAB05] [KKR- DAD05] [KKR- DAA01]

			RAL.01.27.03 Perlindungan Hak Perempuan	
Pendidikan	[KKR-DAL06] Layanan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Layanan terkait Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.31 Pendidikan RAL.01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	[KKR- DAB06] [KKR- DAD06] [KKR- DAA02]
Kesehatan	[KKR-DAL07] Layanan Kesehatan Masyarakat	Layanan terkait Kesehatan Masyarakat	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.25 Kesehatan RAL.01.25.02 Kesehatan Masyarakat	[KKR- DAB07] [KKR- DAD07] [KKR- DAA03]
Pembangunan Kewilayahan	[KKR-DAL08] Layanan Pekerjaan Umum	Layanan terkait Pekerjaan Umum	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.17 Pekerjaan Umum RAL.01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis	[KKR- DAB08] [KKR- DAD08] [KKR- DAA04]
	[KKR-DAL09] Layanan Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Layanan terkait Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	[KKR- DAB09] [KKR- DAD09] [KKR- DAA04]

			RAL.01.21.01 Pengembangan Daerah Tertentu	
	[KKR-DAL10] Layanan Perumahan	Layanan terkait Perumahan	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.20 Perumahan RAL.01.20.02 Kawasan Permukiman	[KKR- DAB10] [KKR- DAD10] [KKR- DAA04]
	[KKR-DAL11] Layanan Lingkungan Hidup	Layanan terkait Lingkungan Hidup	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.40 Lingkungan Hidup RAL.01.40.02 Konservasi Alam Dan Pelestarian Ekosistem	[KKR- DAB11] [KKR- DAD11] [KKR- DAA04]
Hukum dan Keamanan	[KKR-DAL12] Layanan Perlindungan Anak	Layanan terkait Perlindungan Anak	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.27 Pemberdayaan Perempuan RAL.01.27.02 Perlindungan Anak	[KKR- DAB12] [KKR- DAD12] [KKR- DAA05]
	[KKR-DAL13] Layanan Keamanan	Layanan terkait Keamanan	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.29 Keamanan RAL.01.29.06 Keamanan Dan	[KKR- DAB13] [KKR- DAB15] [KKR- DAD13]

			Ketertiban Umum	[KKR-DAD15] [KKR-DAA05]
Sosial	[KKR-DAL14] Layanan Penanggulangan Bencana	Layanan terkait Penanggulangan Bencana	RAL.01 Layanan Publik RAL.01.40 Lingkungan Hidup RAL.01.40.06 Penanggulangan Bencana	[KKR-DAB14] [KKR-DAD14] [KKR-DAA06]
Satu Data Indonesia	[KKR-DAL15] Layanan Portal Satu Data Indonesia tingkat daerah	Layanan terkait manajemen data statistik, data keuangan dan data geospasial	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan RAL.02.09.03 Pengelolaan Data Dan Informasi	[KKR-DAB16-17] [KKR-DAD16-17] [KKR-DAA07]
Pemerintahan Umum	[KKR-DAL16] Layanan Pengelolaan Informasi Publik	Layanan terkait Pengelolaan Informasi Publik	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan RAL.02.09.03 Pengelolaan Data Dan Informasi	[KKR-DAB18] [KKR-DAD18] [KKR-DAA08]
	[KKR-DAL17] Layanan Manajemen SPBE	Layanan terkait Manajemen SPBE	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan RAL.02.10 SPBE	[KKR-DAB19] [KKR-DAD19]

			RAL.02.10.02 Manajemen SPBE	[KKR- DAA08]
	[KKR-DAL18] Layanan Survei Kepuasan Masyarakat	Layanan terkait Survei Kepuasan Masyarakat	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan RAL.02.04 Aparatur Negara RAL.02.04.08. Penyelenggaraan Pelayanan Publik	[KKR- DAB20] [KKR- DAD20] [KKR- DAA08]
	[KKR-DAL19] Layanan administrasi pemerintah an	Layanan terkait perencanaan pembangunan	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	[KKR- DAB21] [KKR- DAD21] [KKR- DAA08]
		Layanan terkait penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelola an barang milik negara, dan layanan keuangan negara lainnya	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan RAL.02.02 Keuangan	[KKR- DAB21] [KKR- DAD21] [KKR- DAA08]
		Layanan terkait akuntabilitas kinerja	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan RAL.02.07 Akuntabilitas	[KKR- DAB21] [KKR- DAD21]

			Kinerja	[KKR-DAA08]
		Layanan terkait kearsipan, kepegawaian, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan administrasi pemerintahan lainnya	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan RAL.02.04 Aparatur Negara	[KKR-DAB17] [KKR-DAD17] [KKR-DAA08]

4.2.4 Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Aplikasi saat ini menjadi bagian dari sebagian besar layanan pemerintahan. Aplikasi menjadi alat bantu yang diharapkan meningkatkan efisiensi operasional suatu layanan. Berikut ini adalah daftar aplikasi yang digunakan oleh OPD di lingkungan Pemkab Kubu Raya.

Tabel 4.5. Daftar Aplikasi di Lingkungan Pemkab Kubu Raya

No.	Aplikasi	Fungsi	Pengelola Utama	
1	JDIH	Media Sarana Penyampaian Informasi Secara Elektronik berupa produk hukum	SETDA Hukum	Bagian
2	E-Sakip Reviu	sistem aplikasi yang dibangun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.	SETDA Organisasi	Bagian
3	Mbiz Market	B2B Marketplace dengan solusi terlengkap untuk pebisnis, mulai dari solusi transaksi bisnis, solusi promosi bisnis, solusi e-procurement, hingga solusi pinjaman modal untuk pebisnis.	SETDA Pengadaan dan Jasa	Bagian Barang
4	SPSE	Layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik	SETDA Pengadaan dan Jasa	Bagian Barang
5	Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)	Aplikasi yang mengelola data informasi melalui data kualifikasi Pelaku Usaha dan Riwayat Kinerja Penyedia Barang dan Jasa	SETDA Pengadaan dan Jasa	Bagian Barang

No.	Aplikasi	Fungsi	Pengelola Utama
6	e-katalog	Belanja barang dan jasa pemerintah secara e-purchasing	SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7	SiRUP	Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
8	ANBK (Assesment Nasional berbasis Komputer)	Pendataan dan Pelaporan Asesmen Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9	BIO ANBK (Bio Assesment Nasional berbasis Komputer)	Pendaftaran Peserta Asesmen Nasional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10	SIPD BOS (Sistem Informasi Perencanaan Daerah Bantuan Operasional Sekolah)	Pelaporan Dana BOS di Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11	ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah)	Pelaporan Dana BOS Pusat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	SIPINTAR (Sistem Informasi Indonesia Pintar)	Pengelolaan dan pelaporan PIP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)	Verifikasi, Validasi Data Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14	SIMTUN (Sistem Manajemen Informasi Tunjangan)	Verifikasi, Validasi Data PTK usulan Penerima Tunjangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15	SIM TENDIK (Sistem Manajemen Informasi Tenaga Kependidikan)	Verifikasi, Validasi Data Pengawas usulan Penerima Tunjangan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	AP4SG / VERVAL GTK	Verifikasi, Validasi Data pengusulan sertifikasi baru, penambahan PTK dan Pembuatan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan pengecekan NRG	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	SIMPEG PPPK GURU (Sistem Informasi Manajemen PPPK Guru)	Verifikasi, Validasi Formasi Data Kebutuhan Guru PPPK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Aplikasi	Fungsi	Pengelola Utama
18	PUSPERNAS (Pusat Prestasi Nasional)	Prestasi Akademik dan non akademik anak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19	SIP BOS (Sistem Informasi Pengelolaan BOS)	Pengelolaan BOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20	Sibunda	Layanan aplikasi yang sederhana berbasis online yang berfungsi untuk menampung data-data kehamilan ibu yang ada di kabupaten kubu raya juga mengurangi angka kematian pada ibu hamil	Dinas Kesehatan
21	SIMBER	Sistem Informasi Manajemen Kebersihan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
22	MENANJAK	Media Sarana Penyampaian Informasi Secara Elektronik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
23	SIMBG	Sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
24	SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generations)	Layanan bagi Pemda (leading; Dinsos) mengakses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kubu Raya	Dinas Sosial
25	E-PKH (Elektronik Program Keluarga Harapan)	Layanan bagi pendamping/operator/ Korkab PKH untuk mengakses data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bantuan sosial (PKH)	Dinas Sosial
26	Simpelda	Sistem Informasi Pelayanan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27	Siskeudes	Sistem Tata Kelola Keuangan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
28	Sipades	Sistem pengelolaan Aset Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Aplikasi	Fungsi	Pengelola Utama
29	Smart Desa	Layanan Integrasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kubu Raya. Digitalisasi Desa di Kubu Raya wujudkan desa Mandiri, Tangguh dan Berdikari.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31	Antrian Online	Media Sarana antrian pelayanan Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
32	OSS-RBA	Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
33	Sicantik	Layanan Perizinan Terpadu untuk publik yang dapat digunakan oleh instansi, baik pusat maupun daerah guna mempermudah pemerintah dalam melakukan perizinan.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
34	Ekosistem Data Kubu Raya	Layanan portal integrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses dat bagi warga dan pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Komunikasi dan Informatika
35	Open Data Kubu Raya	Layanan portal integrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses dat bagi warga dan pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Komunikasi dan Informatika
36	Satu Data Kubu Raya	Platform untuk pengelolaan dan berbagi pakai data antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Dinas Komunikasi dan Informatika
37	PPID	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kubu Raya	Dinas Komunikasi dan Informatika
38	Cloud	Layanan penyimpanan file berbasis online atau digital (cloud storage) untuk OPD Kubu Raya	Dinas Komunikasi dan Informatika
39	TTE	Layanan tanda tangan elektronik bagi Instansi dan ASN / PNS	Dinas Komunikasi dan Informatika
40	Statistik	Layanan penyedia data statistik secara elektronik	Dinas Komunikasi dan Informatika
41	Mail	Layanan Email bagi Instansi dan ASN / PNS	Dinas Komunikasi dan Informatika
42	SIGA	sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi keluarga sebagai alat monitoring dan dasar perencanaan, pengukuran kinerja dan peta kerja pada setiap tingkatan wilayah program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Aplikasi	Fungsi	Pengelola Utama
43	SIMFONI PPA	sebuah aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak, yang dapat diakses di semua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara up to date, real time dan akurat, untuk menuju satu data, data kekerasan nasional.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
44	SIMDAGESIT	sistem yang memuat tentang data gender, data pelaku industri rumahan, data kelompok organisasi.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
45	SIPEMUDA Online	Layanan untuk mengurus Administrasi Kependudukan secara online	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
46	SIMPEL	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
47	Siak Terpusat	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
48	Srikandi	Aplikasi layanan Arsip Nasional RI untuk memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online serta terintegrasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
49	SIKN	Sistem Informasi Kearsipan Nasional untuk mengolah informasi kearsipan yang dimiliki dalam rangka membantu temu balik arsip baik dalam format digital maupun lokasi fisik arsip di tempat penyimpanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
50	Marketing Business Center	Marketing Business Center Kubu Raya merupakan sebuah usaha untuk membantu para Pelaku UMKM dan Profesional Kewirausahaan dalam hal pemasaran secara online.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
51	SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Tata cara penyampaian data Industri, kawasan industri, data lain dan informasi layanan industri	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
52	Kartu AK.1	Layanan untuk dapat membuat kartu AK.1 secara online	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
53	Sistem Informasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Siskotkn)	Layanan Penerbitan Nomor ID dan Surat Rekomendasi Paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
54	Bursa Kerja Khusus (BKK)	Sarana Pendaftaran dan Pendataan Bursa Kerja Khusus serta laporan penempatan	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No.	Aplikasi	Fungsi	Pengelola Utama
55	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (LPTKDN)	Sarana Pendataan dan Pelaporan hasil penempatan LPTKDN	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
56	Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Layanan untuk Memvalidasi Pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
57	Sistem Perizinan Berusaha Berintegrasi secara Elektronik	Proses Verifikasi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
58	Valnas	Layanan Validasi Nasional Data Produksi Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
59	Satudata KKP	Layanan Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) dan Validasi Nasional Data Produksi Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
60	Geoportal Kubu Raya	Portal berbagipakai katalog data spasial dengan format asli maupun format saji	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
61	WebGIS Kepong Bakol	Portal website GIS yang untuk menyajikan hasil visualisasi, analisis data spasial, dan irisan antar data, baik data spasial dasar maupun tematik	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
62	Geoinformasi	Sistem informasi pendataan berbasis web yang digunakan oleh TPDIGD dan Operator SKPD untuk keperluan pemutakhiran data spasial dan tematik.	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
63	Android Kepong Bakol	Aplikasi pembantu untuk para TPDIGD dalam pengambilan data spasial & data tematik hasil survey, berupa titik koordinat dan foto yang terdapat di lapangan	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
64	SPPD	Aplikasi terkait perjalanan dinas, dengan tujuan mempermudah administrasi dan pengarsipan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
65	SIMPLE	Aplikasi terkait surat-surat kedinasan, dengan tujuan mempermudah pen-disposisi-an dan pengarsipan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
66	SIMAKDA	Aplikasi keuangan dengan output berupa komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
67	SIMAKDA SKPD	Aplikasi keuangan dengan output berupa komponen Laporan Keuangan SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
68	e-PERSEDIAAN	Aplikasi untuk mencatat persediaan dan stock opname aset daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

No.	Aplikasi	Fungsi	Pengelola Utama
69	e-RKBMD	Aplikasi untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
70	e-SSH	Aplikasi untuk menyusun Standar Satuan Harga Belanja di APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
71	e-GAJI	Aplikasi untuk pembayaran gaji ASN Pemerintah Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
72	e-SPM	Aplikasi untuk memverifikasi kelengkapan dokumen belanja Bendahara SKPD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
73	e-KONTRAK	Aplikasi untuk memverifikasi kelengkapan dokumen kontrak untuk keperluan pembayaran kontrak pihak ketiga	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
74	SIPD	Sistem milik Kemendagri yang digunakan untuk penganggaran APBD 2023	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
75	SIPD RI	Sistem milik Kemendagri yang digunakan untuk penganggaran APBD 2024	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
76	SIMDA BMD	Sistem milik BPKP yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan aset daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
77	SIKD	Sistem milik Kemenkeu yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
78	SIAP	Aplikasi menyimpan berkas secara digital ASN Kabupaten Kubu Raya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
79	SIKARYA	Aplikasi mengelola data ASN Kubu Raya yang diharapkan dapat terintegrasi dengan SI ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
80	E-ABSEN	Aplikasi mencatat waktu masuk dan pulang ASN Kubu Raya	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
81	SIMPEG	Aplikasi mengelola data ASN Kalbar	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
82	MYSAPK	Menginformasikan data ASN yang tercatat pada BKN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Aplikasi	Fungsi	Pengelola Utama
83	Human Resourch SAPK	Mengelola nomenklatur	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
84	SIASN	Mengelola layanan kepegawaian pangkat, pensiun, perbaikan SKK, perubahan jabatan dll	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
85	E-KINERJA	Pengelolaan kinerja kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
86	I-DIS BKN	Layanan Pelaporan pelanggaran / kedisiplinan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
87	SIPINTER	Menjawab pertanyaan dan menyampaikan eviden	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
88	NSPK	Menjawab pertanyaan dan menyampaikan eviden	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
89	SIJAPTI	Usulan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
90	SIDARA	Usulan Jabatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
91	E-MUTASI	Proses Mutasi PNS	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
92	FORMASI MENPAN	Formasi PNS dan PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
93	GURU PPPK KEMENDIKBUD	Usulan Formasi Guru PPPK	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
94	RENBUT KEMENKES	Usulan Formasi Tenaga Kesehatan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No.	Aplikasi	Fungsi	Pengelola Utama
95	SSCN BKN	Proses Rekrutment	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
96	SIONDEL BKN	Kenaikan Pangkat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
97	SWAJAR	orientasi P3K	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
98	SIPENDAR	Pendaftaran peserta PKN TK. II	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
99	SIORMAS	SIORMAS adalah singkatan dari Sistem Informasi Ormas. Sistem ini merupakan seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
100	Sikemas	Media Sarana Penyampaian Informasi Indeks Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik	RSUD Kubu Raya

Substansi arsitektur pada domain Aplikasi SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional setidaknya memuat:

- a. Aplikasi terkait Ekonomi dan Industri;
- b. Aplikasi terkait Pendidikan;
- c. Aplikasi terkait Kesehatan;
- d. Aplikasi terkait Pembangunan Kewilayahan;
- e. Aplikasi terkait Hukum dan Keamanan;
- f. Aplikasi terkait Sosial;
- g. Aplikasi terkait Satu Data Indonesia;
- h. Aplikasi terkait Pemerintahan Umum.

Tabel 4.6. Identifikasi Target Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Kebijakan	Domain Arsitektur Aplikasi SPBE	Deskripsi Aplikasi SPBE	Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
Ekonomi dan Industri	[KKR-DAA01] Aplikasi Perizinan Terintegrasi	Aplikasi perizinan yang mengintegrasikan seluruh aplikasi perizinan sektor (OSS, SiCantik, SIMBG, antrian online, MBC, SIINAS)	RAA.01 Aplikasi Umum RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	[DAD01-05] [DAL01-05] [DAI01-03] [DAK01-03]
Pendidikan	[KKR-DAA02] Aplikasi Pendidikan	Aplikasi layanan pendidikan dan Aplikasi penyediaan konten digital	RAA.01 Aplikasi Umum RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	[KKR-DAD06] [KKR-DAL06] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
Kesehatan	[KKR-DAA03] Aplikasi Kesehatan Terpadu	Aplikasi terkait layanan telemedicine, digitalisasi rekam medis, penyelenggaraan sistem rujukan online,	RAA.01 Aplikasi Umum RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	[KKR-DAD07] [KKR-DAL07] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]

		rekam medis online, dan sistem personal health care (SiBunda, Simkesda)		
Pembangunan Kewilayahan	[KKR-DAA04] Aplikasi Pemantauan Pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Aplikasi terkait pemantauan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat (Simber)	RAA.02 Aplikasi Khusus RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	[KKR-DAD08-11] [KKR-DAL08-11] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
Hukum dan Keamanan	[KKR-DAA05] Aplikasi Administrasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi	Aplikasi administrasi penanganan perkara tindak pidana terkait proses penyidikan, penuntutan, persidangan, eksekusi, dan pemyarakatan (JDIH, Inpres BNN)	RAA.02 Aplikasi Khusus RAA.02.02 Aplikasi Fungsi Tertentu	[KKR-DAD12] [KKR-DAL12] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
	[KKR-DAA06] Aplikasi Pengaduan	Aplikasi terkait Pengaduan		[KKR-DAD13]

		(WBS, Menanjak)		[KKR- DAL13] [KKR- DAI01-03] [KKR- DAK01-03]
Sosial	[KKR-DAA06] Aplikasi Bantuan Sosial Terintegrasi	Aplikasi terkait bantuan sosial terintegrasi, termasuk didalamnya berupa kegiatan layanan bantuan listrik, bantuan pendidikan, bantuan sosial, dan bantuan kesehatan, serta pengelolaan data kesejahteraan sosial yang terpadu (Sim-Hibah Bansos)	RAA.01Aplikasi Umum RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	[KKR- DAD14-15] [KKR- DAL14-15] [KKR- DAI01-03] [KKR- DAK01-03]
Satu Data Indonesia	[KKR-DAA07] Portal	Aplikasi terkait	RAA.01Aplikasi Umum	[KKR- DAD16-17]

	Satu Data Indonesia tingkat daerah	manajemen data statistik, data keuangan negara, dan data geospasial (Ekosistem Data)	RAA.01.01 Aplikasi Layanan Publik	[KKR-DAL15] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]
Pemerintahan Umum	[KKR-DAA08] Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi terkait <ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan (Pangeran) - Penganggaran keuangan (SIPD, Sirup, E-Gaji, Simakda, Sidak, CMS Bank Kalbar, E-SPM, SPPD, E-Sakip) - Pengadaan barang dan jasa (Mbiz, SPSE, e-katalog) - kearsipan (Srikandi, Simpel) 	RAA.01 Aplikasi Umum RAA.01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	[KKR-DAD18-21] [KKR-DAL16-19] [KKR-DAI01-03] [KKR-DAK01-03]

		<ul style="list-style-type: none"> - kepegawaian (simpegnas, sikarya, simpeg, Mysapk, Siap, E-Absen, Human Resource SAPK, SIASN, E-Kinerja, I-Dis BKN, Sipinter, Sijapti, E-Mutasi, Formasi Mempan, SSCN BKN, Siondel BKN, SWAJAR, Sipendar) - pengelolaan barang milik negara (E-persediaan, E-RKBMD, E-SSH) - pengawasan akuntabilita 		
--	--	--	--	--

		s kinerja (SiKAP) – dan layanan administras i pemerintah an lainnya (PPID, Mail, Cloud, Sipemuda, SIAK, Sidara)		
--	--	--	--	--

4.2.5 Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Arsitektur Jaringan SPBE merupakan pedoman dalam penyediaan layanan infrastruktur SPBE ataupun rancangan arus komunikasi media eletronik pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya, meliputi :

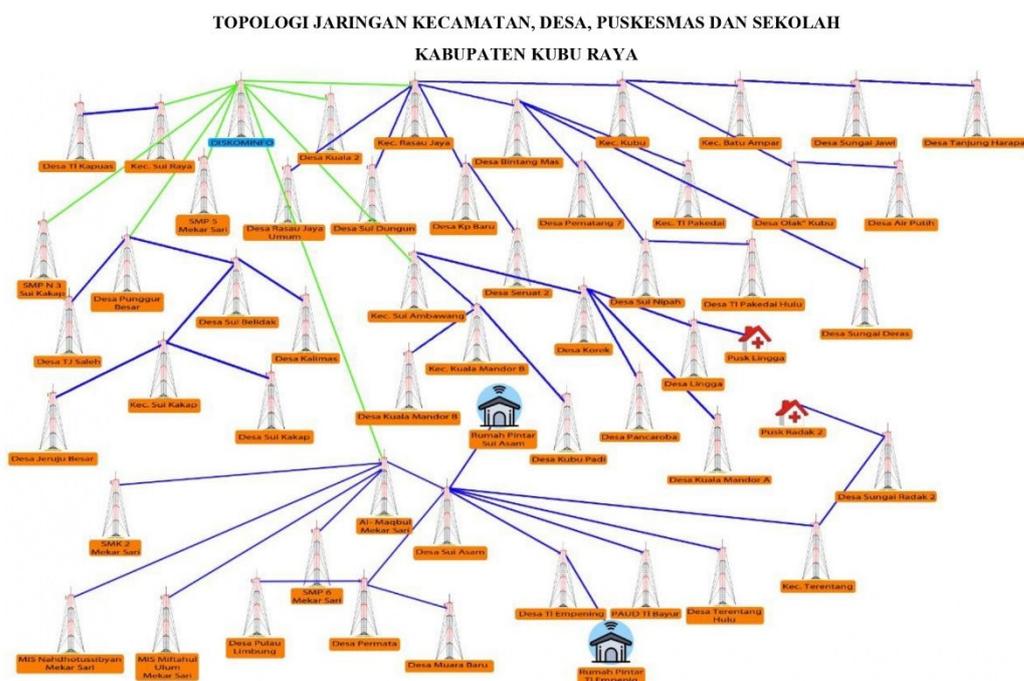
- a. Jaringan intra Perangkat Daerah merupakan jaringan internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan perangkat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ada pada satu perangkat daerah, yang dibangun menghubungkan sistem elektronik antar Perangkat Daerah melalui jaringan terpadu yang aman dan handal sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data. Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Intra Perangkat Daerah.
- b. Jaringan antar Perangkat Daerah juga merupakan jaringan internal Pemerintah Daerah sebagai sarana komunikasi data yang menghubungkan semua Perangkat Daerah, unit kerja, dan

unit layanan dengan pusat layanan yang ada pada Pemerintah Daerah.

- c. Jaringan Internet digunakan untuk menghubungkan Jaringan Intra Pemerintah dengan Jaringan eksternal dan/atau sebagai media perantara untuk menghubungkan jaringan antar Perangkat Daerah melalui tunneling atau *Virtual Private Network (VPN)*.

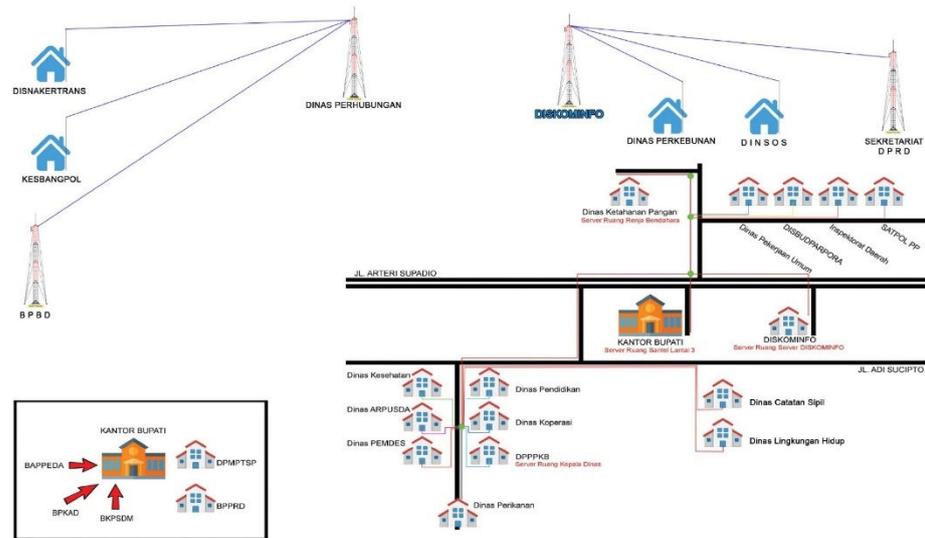
Dalam melaksanakan pelayanan komunikasi data, Pemerintah Daerah memiliki akses jaringan dan internet broadband yang terdiri atas:

- a. Intranet dan Internet Fiber Optik yang menghubungkan antar OPD sampai ke Kecamatan. Untuk 19 OPD Sudah terkoneksi dengan Fiber Optik sedangkan 8 OPD, 9 Kecamatan, 38 Desa terkoneksi dengan *wireless* yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Intranet LAN/Wifi yang menghubungkan antar perangkat daerah di Ibukota Kabupaten (Sungai Raya).
- c. Jaringan Fiber Optic dan Intranet LAN/Wifi juga sudah terhubung ke jaringan internet, sehingga biaya operasional internet sudah terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika.



Gambar 4.15 Topologi Jaringan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

**TOPOLOGI JARINGAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA**



Gambar 4.16 Topologi Jaringan SKPD

Rekapitulasi Bandwidth lokal maupun Internet pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Rekapitulasi Jaringan Kabupaten Kubu Raya

No	Item	Bandwidth	Alamat
1.	Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kubu Raya	15 Mbps	Jl. Arteri Supadio
2.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kubu Raya	30 Mbps	Jl. Arteri Supadio
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kubu Raya	10 Mbps	Jl. Arteri Supadio
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kubu Raya	20 Mbps	Jl. Arteri Supadio
5.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kubu Raya	10 Mbps	Jl. Adi Sucipto
6.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Kubu Raya	15 Mbps	Jl. Angkasa Pura 2
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kubu Raya	20 Mbps	Jl. Adi Sucipto
8.	Dinas Kesehatan Kab. Kubu Raya	15 Mbps	Jl. Adi Sucipto
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kubu Raya	20 Mbps	Jl. Arteri Supadio
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian	15 Mbps	Jl. Adi Sucipto

	dan Perdagangan Kab. Kubu Raya		
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Kubu Raya	20 Mbps	Jl. Angkasa Pura 2
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Kubu Raya	15 Mbps	Jl. Adi Sucipto
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kubu Raya	15 Mbps	Jl. Adi Sucipto
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kubu Raya	25 Mbps	Jl. Arteri Supadio
15.	Badan Pendapatan Daerah Kab. Kubu Raya	25 Mbps	Jl. Arteri Supadio
16.	Dinas Perhubungan Kab. Kubu Raya	10 Mbps	Jl. Adi Sucipto
17.	Dinas Perikanan Kab. Kubu Raya	10 Mbps	Jl. Adi Sucipto
18.	Dinas Perkebunan Kab. Kubu Raya	10 Mbps	Jl. Adi Sucipto
19.	Dinas Pertanian Kab. Kubu Raya	10 Mbps	Jl. Angkasa Pura 2
20.	Dinas Sosial Kab. Kubu Raya	10 Mbps	Jl. Adi Sucipto
21.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10 Mbps	Jl. Adi Sucipto
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Kubu Raya	10 Mbps	Jl. Adi Sucipto
23.	Inspektorat Kab. Kubu Raya	10 Mbps	Jl. Angkasa Pura 2
24.	Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kubu Raya	10 Mbps	Jl. Angkasa Pura 2
25.	Sekretariat DPRD Kab. Kubu Raya	15 Mbps	Jl. Arteri Supadio
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kubu Raya	10 Mbps	Jl. Arteri Supadio

Substansi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan arah kebijakan SPBE setidaknya memuat:

- a. fasilitas komputasi;
- b. sistem integrasi; dan
- c. platform.

Rincian dari domain arsitektur infrastruktur SPBE yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada Tabel 4.8

Tabel 4.8. Identifikasi Target Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE	Deskripsi Infrastruktur SPBE	Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[KKR-DAI01] Fasilitas Komputasi	Penyelenggaraan fasilitas komputasi, berupa infrastruktur Pusat Data Nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	RAI.01 Fasilitas Komputasi RAI.01.01 Pusat Data Nasional RAI.01.02 Pusat Komputasi RAI.01.03 Pusat Kendali	[KKR-DAD01-21] [KKR-DAA01-08] [KKR-DAK01-03]
[KKR-DAI02] Sistem Integrasi	Penyelenggaraan sistem integrasi, berupa Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, yang menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	RAI.02 Sistem Integrasi RAI.02.01 Jaringan Intra Pemerintah RAI.02.02 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	[KKR-DAD01-21] [KKR-DAA01-08] [KKR-DAK01-03]

[KKR-DAI03] Platform	Penyelenggaraan platform berupa kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan, untuk mewujudkan <i>government cloud</i> , menjadi infrastruktur berbagi pakai yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah	RAI.03 Platform RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi RAI.03.02 Komputasi Awan	[KKR-DAD01-21] [KKR-DAA01-08] [KKR-DAK01-03]
-------------------------	--	--	--

4.2.6 Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Keamanan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan ketika membangun suatu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), tujuan keamanan SPBE adalah penjaminan keamanan yang terpadu terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE terhadap risiko serangan-serangan keamanan yang menghambat layanan SPBE.

Hal penanggulangan serangan-serangan tersebut dibutuhkan penetapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan pada berbagai Aspek Keamanan SPBE, yaitu:

1. Keamanan Data dan Informasi SPBE

Keamanan secara umum diartikan sebagai kondisi yang terbebas dari ancaman atau bahaya. Keamanan Data dan Informasi yang dimaksud adalah suatu upaya atau usaha khusus diperuntukkan untuk melindungi, mengamankan aset-aset informasi terhadap ancaman yang mungkin akan timbul serta membahayakan aset informasi tersebut, seperti terkena ancaman dari internal maupun eksternal.

Penerapan Teknologi Informasi (TI) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TI yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance). Dalam penyelenggaraan TI, keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan mengingat kinerja TI akan terganggu bila data/informasi yang merupakan output utama TI mengalami masalah terhadap kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dari data/informasi itu sendiri.

Untuk membantu Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar memiliki suatu sistem keamanan informasi yang sesuai dengan standar ISO/IEC 27001 sehingga berbagai risiko penggunaan TI untuk menunjang kegiatan pemerintahan Kabupaten bisa diminimalisir, maka disusunlah Arsitektur Keamanan Informasi ini demi menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dari data/informasi Pemerintah Daerah. Arsitektur Keamanan Informasi untuk Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Arsitektur Keamanan Defensif (*Defensive Security Architecture*) mencakup rancangan ideal yang sebaiknya diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan perlindungan terhadap keamanan data/informasi dari berbagai ancaman terhadap pelanggaran kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) dari data/informasi yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Arsitektur Keamanan Defensif memiliki 7 lapis perlindungan (*defensive layer*), yaitu Data, Aplikasi, Host, Jaringan Internal, Perimeter, Keamanan Fisik, Kebijakan, Prosedur, dan Kesadaran.
- b. Arsitektur Keamanan *Ofensif* (*Offensive Security Architecture*) mencakup rancangan ideal yang sebaiknya diterapkan oleh

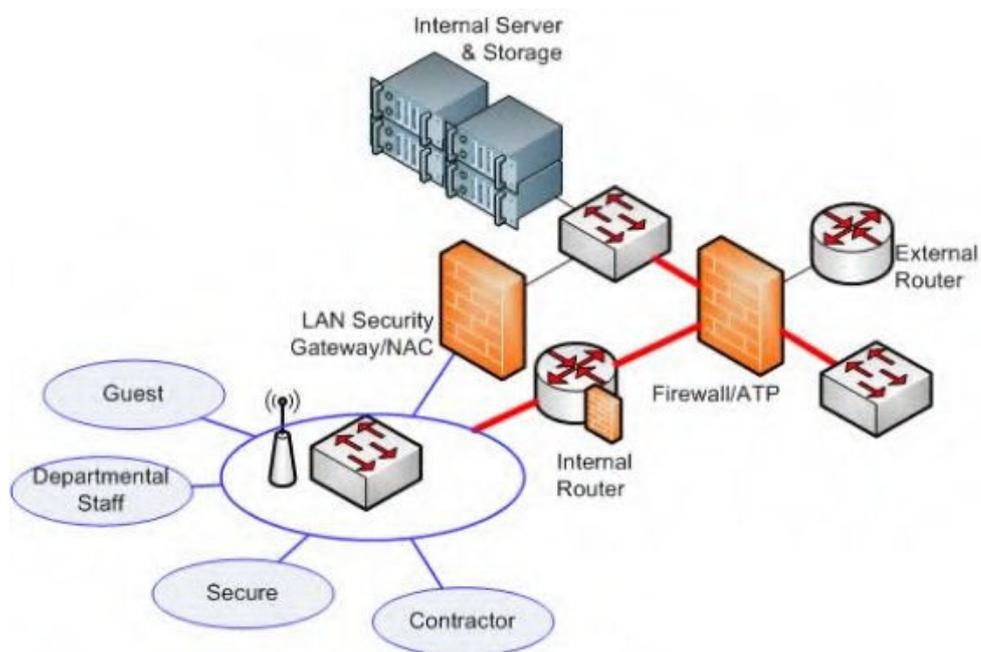
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap implementasi arsitektur keamanan defensif (*defensive security architecture*) serta kegiatan penanganan terhadap serangan *ofensif* (*offensive attack*) yang telah terjadi. Arsitektur Keamanan *Ofensif* mencakup pelaksanaan berbagai kegiatan berikut :

1. *IT Security Audit*: Melakukan kegiatan audit terhadap Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari sisi tata kelola keamanan informasi atau sisi nonteknis berbasis standar internasional ISO 27001.
2. *Vulnerability Assessment & Penetration Test (VAPT)*: Melakukan kegiatan asesmen lubang keamanan dan tes penetrasi untuk menguji ketahanan terhadap kendali keamanan defensif (*defensive security control*) secara teknis serta menemukan lubang-lubang keamanan yang masih ada sehingga bisa dilakukan perbaikan untuk menutup berbagai lubang keamanan yang ditemukan.
3. *Computer Security Incident Handling*: Melibatkan pemantauan dan deteksi kejadian keamanan di komputer atau jaringan komputer, dan pelaksanaan tanggapan yang tepat terhadap kejadian tersebut oleh anggota CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) sehingga dampak insiden pelanggaran keamanan informasi bisa diminimalisir dan instansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dapat kembali menggunakan system informasi untuk menunjang proses bisnis pemerintahan Kabupaten.
4. *Computer Hacking Forensic Readiness*: Memastikan instansi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memiliki kemampuan dan kesiapan untuk pelaksanaan kegiatan forensik bila terkena serangan yang melanggar kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), atau ketersediaan (*availability*) terhadap data/informasi milik instansi pemerintah Kabupaten sehingga berbagai bukti

dapat dihimpun, dianalisis, dan dipresentasikan dalam pengadilan untuk mempidanakan pelaku sehingga memberi efek jera.

Arsitektur Keamanan Informasi ini akan direvisi sesuai kebutuhan dan tingkat kematangan penerapan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

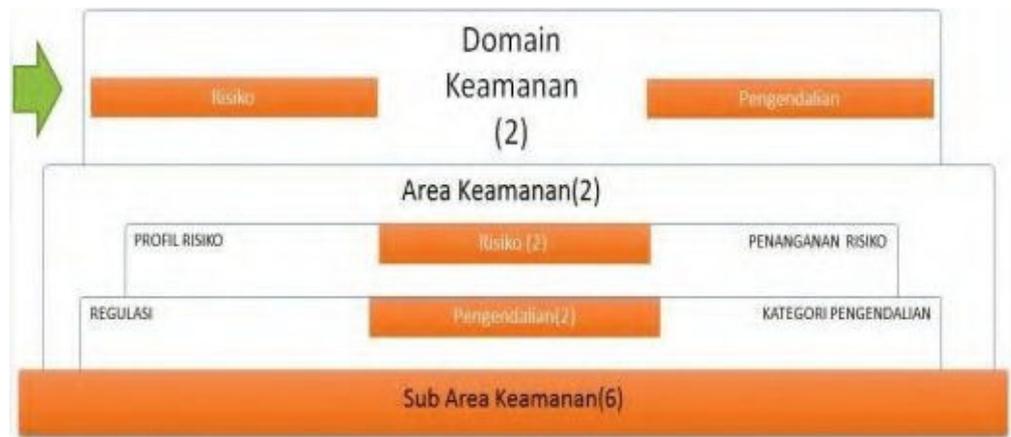
2. Keamanan Infrastruktur SPBE



Gambar 4.17 Topologi Pengamanan Jaringan

3. Keamanan Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk memberikan layanan SPBE, dimana aplikasi terdiri atas aplikasi umum, dan aplikasi khusus. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum. Sementara itu instansi pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus, namun harus didasarkan pada arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE pemerintah daerah masing-masing.



Gambar 4.18 Keamanan SPBE

Substansi arsitektur pada domain keamanan SPBE yang menjadi target arsitektur sampai dengan tahun 2024, sesuai dengan arah kebijakan SPBE setidaknya memuat:

- a. standar keamanan SPBE;
- b. penerapan keamanan SPBE;
- c. kelaikan keamanan SPBE pada Aplikasi Umum SPBE dan Infrastruktur SPBE nasional; dan
- d. audit keamanan pada Aplikasi Umum SPBE.

Rincian dari domain arsitektur infrastruktur SPBE yang menjadi target penerapan arsitektur sampai dengan tahun 2024, terdapat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9. Identifikasi Target Domain Keamanan SPBE

Domain Arsitektur Keamanan SPBE	Deskripsi Keamanan SPBE	Referensi Arsitektur Keamanan SPBE	Kode Domain Arsitektur Terkait
[KKR-DAK01] Standar Keamanan	Persyaratan keamanan yang diacu oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Standar keamanan Memastikan penerapan fungsi	DAK.01 Standar Keamanan DAK.01.01 Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE DAK.01.02 Standar	[KKR-DAD01-21] [KKR-DAA01-08] [KKR-DAI01-03]

	keamanan pada data dan informasi, Aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE sesuai dengan Persyaratan keamanan yang telah ditetapkan.	nasional/internasional terkait keamanan APBE DAK.01.03 Regulasi lainnya	
[KKR-DAK02] Penerapan Keamanan	Penyelenggaraan keamanan SPBE melalui program kerja kesadaran keamanan, identifikasi kerentanan keamanan, dan peningkatan keamanan, penanganan insiden keamanan SPBE serta Audit Keamanan SPBE.	DAK.02 Penerapan Keamanan DAK.02.01 Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE DAK.02.02 Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE DAK.02.03 Peningkatan Keamanan SPBE DAK.02.04 Penanganan Insiden Keamanan SPBE DAK.02.05 Audit Keamanan SPBE	[KKR- DAD01-21] [KKR- DAA01-08] [KKR- DAI01-03]
[KKR-DAK03] Kelaikan Keamanan SPBE	Pemberian rekomendasi kelaikan keamanan aplikasi umum SPBE dan	DAK.03 Kelaikan Keamanan	[KKR- DAD01-21] [KKR- DAA01-08]

	infrastruktur SPBE Nasional	DAK.03.01 Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum DAK.03.02 Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	[KKR-DAI01-03]
--	-----------------------------	---	----------------

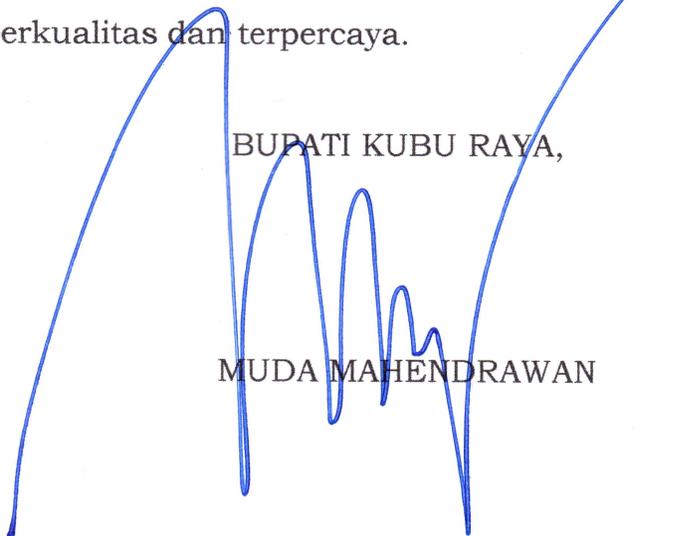
4.2.7 Metadata Arsitektur SPBE Kabupaten Kubu Raya

Atribut metadata arsitektur SPBE adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan metadata suatu arsitektur SPBE. Atribut tersebut digunakan untuk membedakan metadata arsitektur SPBE dengan metadata lainnya. Rincian mengenai atribut metadata arsitektur SPBE ini akan dijelaskan pada Lampiran Metadata Arsitektur SPBE Kabupaten Kubu Raya

BAB V
PENUTUPAN

Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ini merupakan panduan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Mengenai berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, diatur dalam keputusan tersendiri tentang peta rencana SPBE. Reviu dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Dengan adanya pengintegrasian antara Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintahan Daerah ke dalam Arsitektur SPBE Nasional, diharapkan tercipta sinergi dan pengintegrasian penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.



BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN
REFERENSI ARSITEKTUR SPBE NASIONAL

Taksonomi Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB - 01)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, penanggulangan ancaman, pertahanan siber.
01.02	Urusan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang penumbuh-kembangan industri dalam negeri, termasuk di dalamnya pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, dan perdagangan berjangka.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta keamanan hayati.
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan termasuk di dalamnya pengembangan bio energi dan keberlanjutan usaha perkebunan
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan termasuk di dalamnya kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan budidaya.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat perikanan serta pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan penanaman modal antara lain manajemen penanaman modal, manajemen perizinan penanaman modal, dan litigasi penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan koperasi.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.10	Usaha Kecil Dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan dan penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional.
Pembangunan Kewilayaan (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan Atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, P4GN, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pengawasan obat dan makanan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial termasuk di dalamnya manajemen pencarian dan pertolongan, pembangunan manusia, penanganan fakir miskin, dan penanggulangan bencana.
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum termasuk di dalamnya pengelolaan masyarakat dan penyelenggaraan keimigrasian.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak atas kekayaan intelektual.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan termasuk di dalamnya pembinaan perpustakaan dan manajemen tenaga pendidikan.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya manajemen pekerja migran Indonesia serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
06.03	Ilmu Pengetahuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan.
06.04	Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang teknologi.
06.05	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi termasuk di dalamnya ketenagalistrikan dan konservasi energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan termasuk di dalamnya peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung serta perlindungan kawasan hutan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan termasuk di dalamnya pembinaan arsip nasional, dan pembinaan perfilman nasional.
08.03	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam urusan dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan, manajemen ekonomi makro, dan dukungan strategis program/kebijakan.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya manajemen pelayanan publik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, kearsipan nasional, pengawasan, dan kerjasama antar instansi.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariat negara termasuk di dalamnya hubungan dengan Lembaga Negara, manajemen ketahanan nasional, dan pengawasan pemerintah.
09.08	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan termasuk di dalamnya litigasi pertanahan dan pengelolaan infrastruktur pertanahan.
09.09	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan termasuk di dalamnya pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.

Taksonomi Referensi Arsitektur Data Dan Informasi (RAD - 02)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data pertahanan	Data yang mempresentasikan bidang pertahanan negara, termasuk di dalamnya pengelolaan instalasi strategis dan potensi pertahanan, strategi pertahanan, penanggulangan ancaman, pertahanan siber.
01.02	Data urusan luar negeri	Data yang mempresentasikan bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data industri	Data yang mempresentasikan bidang penumbuh-kembangan industri dalam negeri, termasuk di dalamnya pengelolaan ekonomi kreatif dan produk digital.
02.02	Data perdagangan	Data yang mempresentasikan pengelolaan perdagangan termasuk di dalamnya perdagangan dalam negeri, ekspor impor, dan perdagangan berjangka.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.03	Data pertanian	Data yang mempresentasikan bidang pertanian termasuk di dalamnya peningkatan produksi pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, ketahanan pangan, serta keamanan hayati.
02.04	Data perkebunan	Data yang mempresentasikan bidang perkebunan termasuk di dalamnya pengembangan bio energi dan keberlanjutan usaha perkebunan
02.05	Data peternakan	Data yang mempresentasikan bidang peternakan termasuk di dalamnya kesehatan masyarakat veteriner dan perikanan budidaya.
02.06	Data perikanan	Data yang mempresentasikan bidang perikanan termasuk di dalamnya pemberdayaan masyarakat perikanan serta pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut.
02.07	Data badan usaha milik negara	Data yang mempresentasikan pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Data investasi	Data yang mempresentasikan pembinaan penanaman modal antara lain manajemen penanaman modal, manajemen perizinan penanaman modal, dan litigasi penanaman modal.
02.09	Data koperasi	Data yang mempresentasikan pembinaan koperasi antara lain manajemen kelembagaan koperasi, manajemen produksi dan pemasaran koperasi, pemberdayaan pembiayaan koperasi, serta pembinaan dan pengawasan koperasi.
02.10	Data usaha kecil dan menengah	Data yang mempresentasikan pembinaan usaha kecil dan menengah antara lain manajemen kelembagaan usaha kecil dan menengah, manajemen produksi dan pemasaran usaha kecil dan menengah, dan pemberdayaan pembiayaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Data pariwisata	Data yang mempresentasikan bidang kepariwisataan termasuk di dalamnya pengelolaan faktor pendukung kepariwisataan dan penyusunan rencana induk kepariwisataan nasional.
Informasi Pembangunan Daerah (03)		
03.01	Data pekerjaan umum	Data yang mempresentasikan bidang pekerjaan umum antara lain manajemen infrastruktur pekerjaan umum, pembinaan jasa konstruksi,

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		pengelolaan air limbah domestik, dan pengelolaan sumber daya air.
03.02	Data transmigrasi	Data yang mempresentasikan bidang transmigrasi antara lain pendidikan dan pelatihan ketransmigrasian, penelitian dan pengembangan transmigrasi, serta pengembangan kawasan transmigrasi.
03.03	Data transportasi	Data yang mempresentasikan bidang transportasi antara lain pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi, pengelolaan pelayanan transportasi, serta pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.
03.04	Data perumahan	Data yang mempresentasikan bidang perumahan antara lain manajemen infrastruktur perumahan, pengelolaan lingkungan perumahan, pengembangan kawasan permukiman, pengembangan sarana dan prasarana strategis, dan penyelenggaraan perumahan.
03.05	Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	Data yang mempresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal antara lain pembangunan daerah tertinggal, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan daerah tertentu.
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Data kesehatan	Data yang mempresentasikan bidang kesehatan termasuk di dalamnya kefarmasian dan alat kesehatan, P4GN, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta pengawasan obat dan makanan.
04.02	Data sosial	Data yang mempresentasikan bidang sosial termasuk di dalamnya manajemen pencarian dan pertolongan, pembangunan manusia, penanganan fakir miskin, dan penanggulangan bencana.
04.03	Data pemberdayaan perempuan	Data yang mempresentasikan bidang pemberdayaan perempuan antara lain kesetaraan gender, perlindungan anak, perlindungan hak perempuan, dan manajemen pertumbuhan dan perkembangan anak.
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
05.01	Data hukum	Data yang mempresentasikan bidang hukum termasuk di dalamnya pengelolaan masyarakat dan penyelenggaraan keimigrasian.
05.02	Data keamanan	Data yang mempresentasikan bidang keamanan antara lain manajemen keamanan, manajemen ketertiban, penanggulangan transnasional dan terorisme, penegakan hukum, pengayoman masyarakat, dan pemeliharaan ketentraman masyarakat.
05.03	Data hak asasi manusia	Data yang mempresentasikan bidang hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak atas kekayaan intelektual.
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Data pendidikan	Data yang mempresentasikan bidang pendidikan termasuk di dalamnya pembinaan perpustakaan dan manajemen tenaga pendidikan.
06.02	Data ketenagakerjaan	Data yang mempresentasikan bidang ketenagakerjaan termasuk di dalamnya manajemen pekerja migran Indonesia serta pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja.
06.03	Data ilmu pengetahuan	Data yang mempresentasikan bidang ilmu pengetahuan antara lain penelitian ilmu dasar, penelitian inter dan multi disiplin terfokus, penelitian ilmu pengetahuan sektor tertentu, dan pengkoordinasian sistem nasional ilmu pengetahuan.
06.04	Data teknologi	Data yang mempresentasikan bidang teknologi antara lain manajemen investasi dan inovasi, manajemen penginderaan jauh, manajemen teknologi penerbangan dan antariksa, manajemen tenaga nuklir, pengelolaan pengkajian dan penerapan teknologi, serta pengkoordinasian sistem nasional teknologi.
06.05	Data pemuda	Data yang mempresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data pertambangan	Data yang mempresentasikan bidang pertambangan
07.02	Data energi	Data yang mempresentasikan bidang energi termasuk di dalamnya ketenagalistrikan dan konservasi energi.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
07.03	Data kehutanan	Data yang mempresentasikan bidang kehutanan termasuk di dalamnya peningkatan daya dukung DAS dan hutan lindung serta perlindungan kawasan hutan.
07.04	Data kelautan	Data yang mempresentasikan bidang kelautan antara lain manajemen kemaritiman, tata ruang laut, pemberdayaan masyarakat kelautan, dan pengelolaan sumber daya kelautan.
07.05	Data lingkungan hidup	Data yang mempresentasikan bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya manajemen iklim dan cuaca dan pengelolaan sarana dan prasarana iklim dan cuaca.
Informasi Budaya dan agama (08)		
08.01	Data agama	Data yang mempresentasikan bidang agama antara lain bimbingan masyarakat keagamaan, pendidikan agama dan pelatihan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umroh, dan produk halal.
08.02	Data kebudayaan	Data yang mempresentasikan bidang kebudayaan termasuk di dalamnya pembinaan arsip nasional, dan pembinaan perfilman nasional.
08.03	Data olahraga	Data yang mempresentasikan bidang keolahragaan.
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data dalam negeri	Data yang mempresentasikan urusan dalam negeri antara lain kebijakan politik, pemerintahan umum, pembinaan otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan program prioritas nasional.
09.02	Data keuangan	Data yang mempresentasikan bidang keuangan negara
09.03	Data informasi	Data yang mempresentasikan bidang informasi termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya dan perangkat informatika, penyiaran radio publik, dan penyiaran televisi publik.
09.04	Data komunikasi	Data yang mempresentasikan bidang komunikasi antara lain komunikasi publik, penyelenggaraan pos, dan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos.
09.05	Data perencanaan pembangunan nasional	Data yang mempresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional termasuk di dalamnya pengawasan penyimpangan pembangunan,

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		manajemen ekonomi makro, dan dukungan strategis program/kebijakan.
09.06	Data aparatur negara	Data yang mempresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara termasuk di dalamnya manajemen pelayanan publik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, kearsipan nasional, dan kerjasama antar instansi.
09.07	Data kesekretariatan negara	Data yang mempresentasikan bidang kesekretariatan negara termasuk di dalamnya hubungan dengan Lembaga Negara, manajemen ketahanan nasional, dan pengawasan pemerintah.
09.08	Data pertanahan	Data yang mempresentasikan bidang pertanahan termasuk di dalamnya litigasi pertanahan dan pengelolaan infrastruktur pertanahan.
09.09	Data kependudukan	Data yang mempresentasikan bidang kependudukan termasuk di dalamnya pendampingan hukum dalam rangka pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan partisipasi masyarakat.
Data Pendukung Umum (10)		
10.01	Kebijakan Pemerintah	Data yang mempresentasikan informasi terkait kebijakan pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang mempresentasikan informasi terkait kegiatan.
10.03	Data Kewilayahan	Data yang mempresentasikan informasi kewilayahan.
10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang mempresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

Taksonomi Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL - 03)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Layanan Publik (01)		
01.01	Informasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi antara lain pengelolaan aplikasi sistem, pengelolaan sumberdaya dan perangkat informatika, pertahanan siber, dan penyelenggaraan penyiaran.
01.02	Komunikasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan komunikasi antara lain pos dan sistem komunikasi.
01.03	Kebudayaan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kebudayaan antara lain kearsipan nasional, kebijakan kebudayaan, perfilman dan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		kesenian, sastra dan bahasa Indonesia, dan cagar budaya.
01.04	Usaha	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait dunia usaha antara lain manajemen bisnis, investasi, kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, koperasi dan usaha mikro, serta pajak dan cukai.
01.05	Pendidikan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pendidikan antara lain perpustakaan, manajemen pendidik dan manajemen tenaga kependidikan.
01.06	Energi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait energi antara lain kelistrikan dan konservasi energi.
01.07	Lingkungan Hidup	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait lingkungan hidup antara lain meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
01.08	Industri	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait dunia industri antara lain pelayanan penerimaan negara bukan pajak dan standar nasional.
01.09	Hubungan Internasional	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait hubungan antar negara.
01.10	Kesehatan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan antara lain farmasi dan alat kesehatan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan tenaga kesehatan, penanggulangan narkotika, pengawasan obat dan makanan, pengendalian penyakit, pengujian bahan adiktif, dan rehabilitasi.
01.11	Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pertanian, perkebunan, dan peternakan.
01.12	Ketenagakerjaan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan ketenagakerjaan antara lain jaminan sosial tenaga kerja, keselamatan kerja, pengelolaan ketenagakerjaan, pengelolaan pekerja migran Indonesia, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan penempatan tenaga kerja.
01.13	Agama	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait agama antara lain haji dan umroh, kehidupan beragama, dan produk halal.
01.14	Permukiman	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait permukiman antara lain infrastruktur permukiman, kawasan permukiman, pertanahan, perumahan rakyat, serta sarana dan prasarana strategis.
01.15	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait penelitian, pengembangan,

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
01.16	Perlindungan Sosial	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perlindungan sosial antara lain intelijen keamanan, keamanan dan ketertiban umum, jaminan sosial, penanganan fakir miskin, penanggulangan ancaman terorisme, penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan, pengelolaan lalu lintas, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
01.17	Perdagangan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perdagangan antara lain perdagangan berjangka komoditi dan perlindungan konsumen.
01.18	Pariwisata	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kepariwisataan.
01.19	Transportasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait transportasi antara lain keamanan dan keselamatan transportasi.
01.20	Kesejahteraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kesejahteraan masyarakat antara lain kesetaraan gender, olahraga, perlindungan anak, perlindungan hak perempuan, dan pemberdayaan pemuda.
01.21	Ekonomi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan perekonomian antara lain ekonomi kreatif dan ekonomi digital.
01.22	Hukum dan Peraturan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait hukum dan peraturan antara lain keimigrasian dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
01.23	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan antara lain kelembagaan negara, nilai-nilai kebangsaan, pemasyarakatan UUD 45 dan Pancasila, pembangunan manusia Indonesia, pertahanan negara, dan politik.
01.24	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.25	Kependudukan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kependudukan.
01.26	Pemerintahan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum antara lain pembangunan nasional, otonomi daerah, hubungan masyarakat, pengayoman masyarakat, dan program prioritas nasional.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.01	Perencanaan dan Program	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perencanaan dan program.

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.02	Keuangan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait keuangan negara antara lain pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan barang milik negara, dan perbendaharaan.
02.03	Sumber Daya Manusia	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait sumber daya aparatur sipil negara.
02.04	Kearsipan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kearsipan dan persandian.
02.05	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung operasional organisasi/instansi.
02.06	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja.
02.07	Dukungan Umum Organisasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang mendukung organisasi/instansi secara umum.
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan.
02.09	Kebijakan Organisasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kebijakan organisasi/instansi.
02.10	Data dan Informasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi termasuk didalamnya pengelolaan perangkat keras, pengelolaan sistem informasi, dan pembinaan kepastakaan.
02.11	Manajemen SPBE	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik.
02.12	Layanan Terintegrasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengintegrasian layanan antara lain perencanaan, penganggaran, pengkoordinasian layanan.
02.13	Lintas Organisasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengkoordinasian kegiatan lintas organisasi/instansi.
02.14	Kerja Sama	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kerjasama baik antar instansi ataupun dengan pihak lain.

Taksonomi Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA - 04)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Aplikasi Umum (01)		

01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh IPPD untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan IPPD lain, untuk mendukung misi tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh IPPD tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi IPPD lain.

Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI - 05)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Fasilitas Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan
Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi <i>cloud</i> untuk lingkungan kerja aplikasi

Taksonomi Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK - 06)

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Standar atau Peraturan Pemerintah yang digunakan untuk penerapan Keamanan SPBE.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan Keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan Keamanan SPBE.
Penerapan Keamanan (02)		
02.01	kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	penanganan insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di IPPD untuk menanggulangi, memulihkan dan memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi Umum	Uji kelaikan keamanan terhadap aplikasi umum yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar aplikasi umum yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Uji kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional yang dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di IPPD dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Infrastruktur SPBE Nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.

METADATA ARSITEKTUR SPBE KABUPATEN KUBU RAYA

1. Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis

ID	Nama Bisnis/Urusan (Daftarkan semua proses bisnis/urusan pemerintahan yang diselenggarakan hingga proses bisnis level-n)	Uraian Bisnis/Urusan (Merupakan deskripsi dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan)	Kode Model Referensi	Sasaran Strategis (Isikan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud)	Indikator Kinerja Utama (IKU) -- (Tuliskan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dari sasaran strategis yang bersesuaian)	Nilai IKU Target (Nilai IKU yang ditargetkan)	Nilai IKU Terealisasi (Nilai realisasi IKU yang dicapai)	ID metadata terkait
KKR-DAB.01	Peningkatan kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	RAB.09.06.06 Manajemen Pelayanan Publik	1 Meningkatkan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (88.00)	Baik (84,80)	TBD
KKR-DAB.02	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	RAB.09.06.05 Akuntabilitas Kinerja	2 Meningkatkan nilai SAKIP pada unit kerja	Nilai SAKIP, Opini BPK	BB (71.50) WTP	BB (61.95) WTP	TBD
				3 Menerapkan kinerja keuangan yang akuntabel	Nilai SAKIP, Opini BPK	BB (71.50) WTP	BB (61.95) WTP	TBD
				4 Meningkatkan pengendalian internal di semua SKPD/Unit Kerja	Nilai SAKIP, Opini BPK	BB (71.50) WTP	BB (61.95) WTP	TBD
				5 Meningkatkan pembangunan zona integritas pada unit kerja	Nilai SAKIP, Opini BPK	BB (71.50) WTP	BB (61.95) WTP	TBD
				6 Meningkatkan kompetensi APIP	Nilai SAKIP, Opini BPK	BB (71.50) WTP	BB (61.95) WTP	TBD
KKR-DAB.03	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	RAB.06.01.01 Pembinaan Pendidikan Regional	7 Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	14.41 7.2	13.88 7.02	TBD

				8	Meningkatkan insentif tenaga kependidikan di daerah terpencil, kepulauan dan pedalaman	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	14.41 7.2	13.88 7.02	TBD
				9	Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	14.41 7.2	13.88 7.02	TBD
				10	Meningkatkan tata kelola dan pemenuhan standar sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	14.41 7.2	13.88 7.02	TBD
				11	Mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam mendukung pendidikan non formal atau kesetaraan	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	14.41 7.2	13.88 7.02	TBD
KKR-DAB.04	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	RAB.04.01.03 Kesehatan Masyarakat	12	Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana, prasarana pelayanan kesehatan	Angka Usia Harapan Hidup	71.25 tahun	70.95	TBD
				13	Meningkatkan status kesehatan serta gizi masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71.25 tahun	70.95	TBD
				14	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan seperti TB, HIV/AIDS dan Covid-19	Angka Usia Harapan Hidup	71.25 tahun	70.95	TBD
				15	Meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan	Angka Usia Harapan Hidup	71.25 tahun	70.95	TBD

					kesehatan serta sumber daya manusia kesehatan				
				16	Meningkatkan kualitas sistem penjamin kesehatan bagi masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	71.25 tahun	70.95	TBD
KKR-DAB.05	Peningkatan konektivitas wilayah	Meningkatnya konektivitas wilayah	RAB.09.01.06 Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah	17	Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Indeks Konektivitas, Indeks Moblitas	5 0,48	4.44 0.45	TBD
				18	Meningkatkan kualitas infrastruktur dermaga dengan mensinergikan pembangunan dermaga dengan pembangunan jalan penghubung serta sarana dan prasarana pendukung dermaga lainnya sesuai tingkat fungsional dermaga	Indeks Konektivitas, Indeks Moblitas	5 0,48	4.44 0.45	TBD
				19	Meningkatkan kualitas jaringan internet di desa	Indeks Konektivitas, Indeks Moblitas	5 0,48	4.44 0.45	TBD
KKR-DAB.06	Peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang sehat	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan yang sehat	RAB.03.04.05 Penyelenggara n Perumahan	20	Mengembangkan kawasan pemukiman dan perumahan layak huni	Persentase Rumah Layak Huni	93,00%	88,29%	TBD
				21	Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana serta pengelolaan sanitasi	Persentase Daerah Bebas Genangan	50%	31,19%	TBD

				22	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang terhubung dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Daerah Bebas Genangan	50%	31,19%	TBD
KKR-DAB.07	Peningkatan daya saing daerah	Meningkatnya daya saing daerah	RAB.02.03.06 Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing	23	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian	Pertumbuhan PDRB	6,59%	5,48%	TBD
				24	Meningkatkan populasi dan produksi ternak serta skala usaha peternakan	Pertumbuhan PDRB	6,59%	5,48%	TBD
				25	Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung	Pertumbuhan PDRB	6,59%	5,48%	TBD
				26	Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan industri	Pertumbuhan PDRB	6,59%	5,48%	TBD
				27	Peningkatan dan pengembangan perdagangan serta perlindungan konsumen	Pertumbuhan PDRB	6,59%	5,48%	TBD
				28	Mengembangkan destinasi wisata dan promosi pariwisata/keunikan daerah	Pertumbuhan PDRB	6,59%	5,48%	TBD
				29	Peningkatan kemampuan potensi kesejahteraan sosial	Pertumbuhan PDRB	6,59%	5,48%	TBD
KKR-DAB.08	Peningkatan sektor UMKM	Meningkatnya sektor UMKM	RAB.02.10.01 Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah	30	Peningkatan kualitas koperasi serta pemberdayaan dan	Laju pertumbuhan UMKM	66.514.960,02	63.216.692.915	TBD

					pengembangan pelaku UMKM				
KKR-DAB.09	Peningkatan investasi	Meningkatnya investasi	RAB.02.08.01 Pembinaan Penanaman Modal Regional	31	Memberikan kemudahan dan insentif dalam investasi penanaman modal daerah	Nilai investasi	17.355.990,10	14.899.410,54	TBD
KKR-DAB.10	Peningkatan penyerapan tenaga kerja	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	RAB.06.02.02 Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	32	Meningkatkan perluasan lapangan kerja, produktivitas, pelatihan kerja dan mutu tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka	5,31	6,87	TBD
KKR-DAB.11	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	RAB.07.05.02 Pelestarian Lingkungan Hidup	33	Meningkatkan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,3	70,94	TBD
				34	Meningkatkan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah sesuai pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW Kabupaten	84,25	70,72	TBD
KKR-DAB.12	Peningkatan ketahanan terhadap bencana	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	RAB.04.02.06 Penanggulangan Bencana	35	Meningkatkan pembinaan dan pemahaman mengenai kebencanaan	Indeks Resiko Bencana	164,92	168,4	TBD
KKR-DAB.13	Peningkatan status desa	Meningkatnya status desa	RAB.03.05.04 Pemberdayaan Masyarakat Desa	36	Meningkatkan kualitas dan kuantitas desa berstatus mandiri	Jumlah Desa Mandiri	75	52	TBD
KKR-DAB.14	Peningkatan toleransi di kalangan umat beragama	Meningkatnya toleransi di kalangan umat beragama	RAB.08.01.01 Bimbingan Masyarakat Keagamaan	37	Meningkatkan kehidupan toleransi umat beragama	Jumlah kasus konflik antar agama	0	0	TBD

KKR-DAB.15	Penurunan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Menurunnya Penyakit Masyarakat (Pekat)	RAB.09.01.02 Kebijakan Politik Dan Pemerintahan Umum	38	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama dengan lembaga/aparat penegak hukum	Jumlah kasus Pekat	20	24	TBD
KKR-DAB.16	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan	RAB.04.03.02 Pemberdayaan Perempuan	39	Meningkatkan proporsi anggaran responsivitas gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,44	73,04	TBD
				40	Meningkatkan kompetensi perempuan pada sektor publik	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,44	73,04	TBD
KKR-DAB.17	Penurunan kasus kekerasan terhadap anak	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	RAB.04.03.04 Perlindungan Anak	41	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pemenuhan hak anak	Status Kabupaten Layak Anak	Pratama (650)	Pratama (512,6)	TBD
				42	Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap anak	Status Kabupaten Layak Anak	Pratama (650)	Pratama (512,6)	TBD
KKR-DAB.18	Pengelolaan data dan teknologi informasi komunikasi		RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik						TBD
KKR-DAB.19	Pelayanan dan Informasi Publikasi		RAB.09.03.05 Pengelolaan Informasi Publik						TBD
KKR-DAB.20	Pengelolaan Administrasi dan Umum		RAB.09.06.02 Manajemen Aparatur Sipil Negara						TBD
KKR-DAB.21	Manajemen Resiko		RAB.09.06.07 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)						TBD

2. Atribut Metadata Arsitektur Data dan Informasi

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	← Penghasil Data/ Produsen Data	→ Penanggung Jawab Data/Wali Data (Dependency)	Informasi yang Terkait (Input)	Informasi yang Terkait (Output)	Inter operabilitas
KKR-DAD.01	Penerima Insentif bagi petugas fardhu kifayah dan guru ngaji	Jumlah orang yang menerima insentif Petugas Fardhu Kifayah dan Guru Ngaji di Kab. Kubu Raya Tahun 2022	Penerima Insentif	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Sekretariat Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.02	Rupa bumi wilayah laut	Nama Rupabumi wilayah laut di Kabupaten Kubu Raya	Nama Rupabumi	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Sekretariat Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.03	Nama Rupa Bumi Pulau-Pulau	Nama Rupabumi Pulau Di Kabupaten Kubu Raya	Nama Rupabumi	TBD	Terbuka	Data Sektoral		Sekretariat Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.04	MOU/Per Janjian Kerja Sama	Reka Pitulasi MOU Dan Kerjasama	Jumlah MOU dan Kerjasama	TBD	Terbuka	Data Sektoral		Sekretariat Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.05	Data Rumah Ibadah	Data Rumah Ibadah (Mesjid) Di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah data rumah ibadah	TBD	Terbuka	Data Sektoral		Sekretariat Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.06	Data Kebutuhan Listrik	Rekap Data Kebutuhan Listrik	Jumlah Rekap data kebutuhan listrik	TBD	Terbuka	Data Sektoral		Sekretariat Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.07	Data Rumah Tangga Miskin Belum Berlistrik Yang Terdapat Dlm Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Rekap Data Rumah Tangga Belum Memiliki Listrik	Jumlah Rekap Data Rumah Tangga Belum Memiliki Listrik	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Sekretariat Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.08	Hasil Kelitbangan	Kelitbangan Adalah Rangkaian Kegiatan Ilmiah Yang Bertujuan Menghasilkan Pemahaman Baru Dan Mengembangkan Penerapan Praktis Nilai Dan Konteks Ilmu Pengetahuan Yang Baru, Atau Cara Baru Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dan Pemerintahan Daerah. Didalam Kegiatan Kelitbangan Terdapat Beberapa Tahapan Pengkajian Yang Meliputi Penelitian Daerah, Pengembangan Daerah Dan Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.09	inovasi daerah kabupaten kubu raya	Inovasi daerah di wilayah Kabupaten Kubu Raya merupakan sarana Pemerintah	Jumlah Inovasi Daerah	TBD	Terbuka	Data Sektoral	tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		Kabupaten Kubu Raya untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif										
KKR-DAD.10	Perhutanan Sosial	Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan	Berisi data perhutanan sosial di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.11	Sistem Pusat Kegiatan	Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Kubu Raya tercantum di Peraturan Daerah	Sistem Pusat Kegiatan Tahun 2016-2036	TBD	Terbuka	Data Sektoral		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036										
KKR-DAD.12	Kawasan Hutan Produksi	Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi)	Kawasan Hutan Produksi	TBD	Terbuka	Data Sektoral		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.13	Distribusi Pendapatan domestik regional bruto (atas dasar harga berlaku)	PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar	Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya										
KKR-DAD.14	Distribusi Pendapatan domestik regional bruto (atas dasar harga konstan)	PDRB penggunaan atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.15	Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Domestik Regional Bruto	PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.16	Dokumen Perencanaan	Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode renstra biasanya adalah 5 tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	Dokumen RENSTRA Perubahan Bappeda Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Periode Jangka Tertentu	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 17	Data Dasar Rumah Tangga (Kepala Keluarga)	Berisi Pendataan Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) yang dilakukan oleh Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Desa (per 14 Oktober 2022)	untuk mendapatkan informasi karakteristik rumah tangga yang ada di suatu wilayah serta untuk menyediakan peta dasar.	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 18	Profil Tenaga Penggerak Data Dan Informasi Geospasial Desa (TPDIGD)	Berisi informasi mengenai profil Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Desa (TPDIGD) 2022 (Per Oktober 2022)	Berisi informasi mengenai profil Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Desa (TPDIGD) 2022 (Per Oktober 2022)	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 19	Akses Layanan Listrik Rumah Tangga	Berisikan informasi mengenai layanan listrik yang telah dimuktahirkan Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Desa (TPDIGD) di Kabupaten Kubu Raya	Berisikan informasi mengenai layanan listrik yang telah dimuktahirkan Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Desa (TPDIGD) di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 20	Akses Sanitasi Ruma Tangga	Snitasi merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi	informasi mengenai akses sanitasi rumah tangga	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 21	Sebaran Dusun	Dusun merupakan bagian wilayah dalam desa/kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan (INDAH-Indonesia Data Hub, BPS)	informasi mengenai sebaran dusun di Kabupaten Kubu Raya dirinci per kecamatan Tahun 2022 yang telah di muktahirkan oleh Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Desa	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 22	Sebaran Kantor Desa	Berisi data informasi sebaran kantor desa di Kabupaten Kubu Raya yang telah dimukhtahirkan oleh Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Daerah (TPDIGD)	Berisi data informasi sebaran kantor desa di Kabupaten Kubu Raya yang telah dimukhtahirkan oleh Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Daerah (TPDIGD)	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.23	Sebaran Rukun Warga	Rukun Warga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan	Berisi informasi mengenai sebaran Rukun Warga (RW) yang didata oleh Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Desa	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.24	Sebaran Rukun Tetangga	Berisi data informasi mengenai sebaran Rukun Tetangga (RT) per desa di Kabupaten Kubu Raya yang telah dimukhtahirkan oleh Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Desa (TPDIGD)	Berisi data informasi mengenai sebaran Rukun Tetangga (RT) per desa di Kabupaten Kubu Raya yang telah di mukhtahirkan oleh Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Desa (TPDIGD)	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 25	Sebaran Tempat Ibadah	tempat ibadah adalah tempat ibadah yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum	Berisi informasi mengenai jumlah tempat ibadah yang telah dimuktahirkan oleh Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Desa (TPDIGD) di Kabupaten Kubu Raya yang dirinci per wilayah desa	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 26	Kantor Pemerintahan Daerah	Kantor Pemerintahan daerah merupakan wadah aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tempat wakil rakyat mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan di segala sektor kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 27	Kantor Pemerintahan Pusat	Kantor Pemerintahan merupakan wadah aktifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, tempat wakil rakyat mengatur jalannya pemerintahan dan pembangunan di segala sektor kehidupan untuk	Kantor Pemerinthan Pusat	TBD	terbatas	Data Sektoral	tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		meningkatkan kesejahteraan masyarakat										
KKR-DAD.28	Kartu Inventaris Barang (KIB) A	Aset Tanah	Jumlah Aset Tanah	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.29	Kartu Inventaris Barang (KIB) C	Aset Gedung dan Bangunan	Jumlah Aset Gedung dan Bangunan	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan aset	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.30	Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab Kubu Raya 2021	Struktur Organisasi atau Peta Jabatan BKPSDM Kabupaten Kubu Raya	Struktur Organisasi atau Peta Jabatan BKPSDM	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	BKPSDM	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.31	data pegawai ASN	Data PNS di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	Data PNS di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	TBD	terbatas	Data Sektoral	Setiap ada pembaharuan	BKPSDM	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.32	Pajak Hotel	Realisasi pajak hotel	Jumlah Realisasi pajak hotel	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.33	Pajak Restoran	Realisasi pajak restoran	Jumlah Realisasi pajak restoran	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.34	Pajak Sarang Burung Walet	Realisasi pajak sarang burung walet	Jumlah Realisasi pajak sarang burung walet	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 35	Pajak Parkir	Realisasi pajak parkir	Jumlah Realisasi pajak parkir	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 36	Pajak Reklame	Realisasi pajak reklame	Jumlah Realisasi pajak reklame	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 37	Pajak Air Tanah	Realisasi pajak air tanah	Jumlah Realisasi pajak air tanah	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 38	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Buatan	Realisasi pajak mineral bukan logam dan buatan	Jumlah Realisasi pajak mineral bukan logam dan buatan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 39	Pajak Bumi Dan Bangunan	Realisasi pajak bumi dan bangunan	Jumlah Realisasi pajak bumi dan bangunan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Badan Pendapatan Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 40	Pajak Penerangan Jalan	Realisasi pajak penerangan jalan	Jumlah Realisasi pajak penerangan jalan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	tahunan	Badan Pendapatan Daerah	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 41	Data Angin Puting Beliung	Data Terdampak Puting Beliung	Data Terdampak Puting Beliung	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	BPBD	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 42	Data Banjir	Data Banjir di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	Data Banjir di Wilayah Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	BPBD	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 43	Data Karhutla	Data Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	Data Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	BPBD	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 44	Data <i>Animal / Rescue</i>			TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	BPBD	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 45	Data Kebakaran Gedung/ Rumah	Data Kejadian Kebakaran Gedung/Rumah Di wilayah Kabupaten Kubu Raya	Data Kejadian Kebakaran Gedung/Rumah Di wilayah Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	BPBD	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 46	Data Pasca Bencana	Data Pasca Bencana adalah Data yang Bersifat Pembangunan yang di Akibatkan Bencana Alam	Data Pasca Bencana adalah Data yang Bersifat Pembangunan yang di akibatkan Bencana Alam	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	BPBD	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 47	Desa Tangguh Bencana (Destana)	Program Pembentukan Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Kubu Raya	Program Pembentukan Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	BPBD	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 48	Partai Politik	Data Partai Politik yang menduduki DPRD di Kabupaten Kubu Raya dan banyaknya jumlah suara yang di dapatkan oleh Partai tersebut	Data Partai Politik	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 49	Organisasi Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Dan Yayasan	Banyaknya Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Dan LSM Menurut Kecamatan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.50	Jalan Usaha Tani	Rekapitulasi Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) per tahun dirinci per Kecamatan di Kabupten Kabupaten Kubu Raya	Informasi Rekapitulasi Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) per tahun dirinci per Kecamatan di Kabupten Kabupaten Kubu Raya	TBD	tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.51	<i>Long Stronge</i>	Rekapitulasi Jumlah Pembangunan Long Storage per tahun dirinci per Kecamatan di Kabupten Kabupaten Kubu Raya	Informasi Rekapitulasi Jumlah Pembangunan Long Storage per tahun dirinci per Kecamatan di Kabupten Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.52	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	Rekapitulasi Jumlah Pembangunan Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) per tahun dirinci per Kecamatan di Kabupten Kabupaten Kubu Raya	Informasi Rekapitulasi Jumlah Pembangunan Jumlah Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) per tahun dirinci per Kecamatan di Kabupten Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.53	Jembatan Usaha Tani	Rekapitulasi Jumlah Pembangunan Jembatan Usaha Tani per tahun dirinci per Kecamatan di Kabupten Kabupaten Kubu Raya	Informasi Rekapitulasi Jumlah Pembangunan Jembatan Usaha Tani per tahun dirinci per Kecamatan di Kabupten Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.54	Jaringan Irigasi Air Tanah	Rekapitulasi Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah per tahun dirinci per Kecamatan di Kabupten Kabupaten Kubu Raya	Informasi Rekapitulasi Jumlah Jaringan Irigasi Air Tanah per tahun dirinci per Kecamatan di Kabupten Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.55	Embung	Jumlah Pembangunan Embung dirinci per Kecamatan di Kabupten Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah Pembangunan Embung dirinci per Kecamatan di Kabupten Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.56	Pintu Air	Jumlah Pembangunan Pintu Air per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah Pembangunan Pintu Air per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.57	Dam Parit	Jumlah Pembangunan DAM Parit per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah Pembangunan DAM Parit per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.58	Saung pertanian	Jumlah Pembangunan Saung per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah Pembngunan Saung per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.59	Pompa air	Jumlah unit pengadaan Pompa Air per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah unit pengadaan Pompa Air per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.60	<i>Hand sprayer</i>	Jumlah unit pengadaan Hand Sprayer per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah unit pengadaan Hand Sprayer per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.61	<i>Combine harvester</i>	Jumlah unit pengadaan Combine Harvester per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah unit pengadaan Combine Harvester per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.62	<i>Power Thresher</i>	Jumlah unit pengadaan Power Thresher per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah unit pengadaan Power Thresher per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.63	<i>Corn Sheller</i>	Jumlah unit pengadaan Corn Sheller per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah unit pengadaan Corn Sheller per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.64	Traktor	Jumlah unit pengadaan Traktor/Hand Traktor per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah unit pengadaan Traktor/Hand Traktor per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.65	Unit Pengolahan Pupuk Organik	umlah paket pengadaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi umlah paket pengadaan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) per tahun di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.66	Mobil Box	Data Jumlah Pengadaan Mobil Box di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Data Jumlah Pengadaan Mobil Box di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.67	Gudang Pangan	Rekapitulasi Jumlah Pengadaan Gudang Pangan di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Rekapitulasi Jumlah Pengadaan Gudang Pangan di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.68	Perkarangan Pangan Lestari	Rekapitulasi Jumlah Paket Pengadaan Pekarangan Pangan Lestari di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Rekapitulasi Jumlah Paket Pengadaan Pekarangan Pangan Lestari di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.69	Penyuluhan Pertanian Lapangan	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.70	Gabungan kelompok tani	jumlah Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi jumlah Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.71	Kelompok tani	Jumlah Kelompok Tani Menurut Jenis Keahlian Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah Kelompok Tani Menurut Jenis Keahlian Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.72	Sebaran petani	Rekapitulasi data jumlah Sebaran Petani di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Rekapitulasi data jumlah Sebaran Petani di rinci per Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.73	Akses air minum perkotaan	Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum	Informasi AKSES AIR MINUM PERKOTAAN	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas PUPRPRKP	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.74	Bangunan gedung pemerintahan	Proses, cara, pembuatan membangun	Informasi bangunan gedung pemerintahan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas PUPRPRKP	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.75	Akses air minum perdesaan dan sarana sanitasi rumah tangga	Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum	Informasi akses air minum perdesaan dan sarana sanitasi rumah tangga	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas PUPRRPKP	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.76	Jalan lingkungan	Suatu sistem untuk mobilitas pergerakan dan aksesibilitas logistik barang dan manusia dalam kawasan industri yang menghubungkan jalan utama menuju kaveling industri dan infrastuktur lainnya	Informasi Banyaknya Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas PUPRRPKP	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.77	Rumah tidak layak huni	Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya Derajat kelayakan rumah tempat tinggal	Informasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) PerDesa di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas PUPRRPKP	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.78	Jaringan irigasi permukiman	Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.	Informasi jaringan irigasi permukiman	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Periode jangka tertentu	Dinas PUPRRPKP	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.79	Jaringan irigasi rawa	Kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.	Informasi jaringan irigasi rawa	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Periode jangka tertentu	Dinas PUPRRPKP	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.80	Layanan pengelolaan persampahan	Kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.	Informasi layanan pengelolaan persampahan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Periode jangka tertentu	Dinas PUPRRPKP	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.81	Sebaran makam dan taman	sebaran makam dan taman	Informasi sebaran makam dan taman	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Periode jangka tertentu	Dinas PUPRRPKP	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.82	Indeks kualitas lingkungan hidup	data indeks kualitas lingkungan hidup	Informasi data indeks kualitas lingkungan hidup	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.83	Persetujuan lingkungan		Informasi	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.84	Surat kelaikan operasional		Informasi	TBD	tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.85	Pengaduan yang ditangani	Laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan	Informasi Jumlah pengaduan yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Per semester	Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan/atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara										
KKR-DAD. 86	Sekolah adiwijaya		Informasi	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 87	Bank sampah	Tempat pemilhan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau di guna ulang yang memiliki nilai ekonomi	Informasi bank sampah	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 88	Batas desa	Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi desa perdesaan		TBD	Terbuka	Data Sektoral	Me-nyesuaikan Perbup	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 89	Rukun tetangga	Berkumpulnya sekelompok orang yang tinggal di lingkungan RT/RW/Dusun/Desa atau berkumpulnya warga di lingkungan RT/RW/Dusun/Desa untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan	Jumlah Desa, Dusun, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		kesejahteraan masyarakat di lingkungan RT/RW/Dusun/Desa										
KKR-DAD.90	Rukun Warga	Berkumpulnya sekelompok orang yang tinggal di lingkungan RT/RW/Dusun/Desa atau berkumpulnya warga di lingkungan RT/RW/Dusun/Desa untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan kesejahteraan masyarakat di lingkungan RT/RW/Dusun/Desa	Jumlah Desa, Dusun, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.91	Badan Usaha Milik Desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 92	Pos Pelayanan Terpadu	Jumlah Posyandu Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Posyandu Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 93	Karang Taruna	Jumlah Karang Taruna Kabupaten Kubu Raya	Jumlah Karang Taruna Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 94	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Data lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa mencakup RT RW PKK POSYANDU LPM Karang Taruna Dan Lembaga Adat	Data lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa mencakup RT RW PKK POSYANDU LPM Karang Taruna Dan Lembaga Adat	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 95	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga			TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 96	Indeks Desa Membangun	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan	Jumlah Index Desa Membangun (IDM) Menurut Tingkatan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.										
KKR-DAD.97	Aset desa	Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.		TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.98	Keuangan desa	Dana yang berasal dari APBN diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat		TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 99	Sebaran Populasi Ruminansia Besar	Bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih	Berisikan Data Sebaran Populasi Ruminansia Besar	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 100	Sebaran Populasi Ruminansia Kecil	Bagian dari tubuh ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar, dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta lemak yang berlebih	Berisi Data Sebaran Populasi Rumansia Kecil	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 101	Sebaran Populasi Unggas	Jenis hewan ternak peliharaan kelompok burung yang dimanfaatkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk hobi	Berisi Data Sebaran Populasi Unggas	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 102	Perusahaan pangan asal hewan breeding farm		Perusahaan Pangan Hasil Hewan Breeding farm	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 103	Event pemuda	Data Event Pemuda	informasi Data Event Pemuda	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 104	Pemuda pelopor	Data Pemuda Pelopor	informasi Data Pemuda Pelopor	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 105	Wirausaha muda	Data Wirausaha Muda	informasi Data Wirausaha Muda	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 106	Event olahraga	Data Event Olahraga	informasi Data Event Olahraga	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 107	Atlet berprestasi	Data Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi	Informasi Data Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 108	Data organisasi olahraga	Data Organisasi Olahraga	Informasi Data Organisasi Olahraga	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 109	Event wisata	Data Event Pariwisata	Informasi Data Event Pariwisata	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 110	Sebaran obyek wisata	Data Sebaran Obyek Wisata	Informasi Data Sebaran Obyek Wisata	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 111	Jasa akomodasi dan penginapan	Data Jasa Akomodasi dan Penginapan	Informasi Data Jasa Akomodasi Dan Penginapan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 112	Jasa kecantikan	Data Jasa Kecantikan	Informasi Data Jasa Kecantikan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 113	Jasa usaha makan dan minum ekonomi kreatif	Data Makan dan Minum Ekonomi Kreatif	Informasi Data Makan Dan Minum Ekonomi Kreatif	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 114	Usaha pusat souvenir ekonomi kreatif	Data Pusat Aksesoris/Souvenir	Informasi Data Pusat Aksesoris/Souvenir	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 115	Pusat kesenian	Data Pusat Kesenian	Informasi Data Pusat Kesenian	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Ke-pemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 116	Data dasar menara komunikasi dan informatika	Dataset ini berisi tentang Data Dasar Menara Kominfo di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Dataset Ini Berisi Tentang Data Dasar Menara Kominfo Di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 117	Kondisi menara komunikasi dan informatika	Dataset ini berisi tentang informasi tentang kondisi menara yang di kelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kubu Raya	Informasi Dataset Ini Berisi Tentang Informasi Tentang Kondisi Menara Yang Di Kelola Oleh Dinas Komunikasi Dan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

			Informatika Kabupaten Kubu Raya									
KKR-DAD. 118	Hosting server VPS aplikasi SPBE	Dataset ini berisi tentang Hosting Server Vps Aplikasi SPBE di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Dataset Ini Berisi Tentang Hosting Server Vps Aplikasi SPBE Di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 119	Menara komersial	Dataset ini berisi tentang Menara Komersial di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Dataset Ini Berisi Tentang Menara Komersial Di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 120	Portal website perangkat daerah	Dataset ini berisi tentang portal website satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Dataset Ini Berisi Tentang Portal Website Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 121	Portal sistem informasi desa	Dataset ini berisi tentang portal sistem informasi desa di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Dataset Ini Berisi Tentang Portal Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 122	Sebaran usaha mikro kecil, dan menengah	Sebaran UMKM	Informasi Sebaran UMKM	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 123	Sebaran industri	Sebaran Industri Berdasarkan Klasifikasi Industri	Informasi Sebaran Industri Berdasarkan Klasifikasi Industri	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Per-industrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 124	Sebaran koperasi	Sebaran Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi	Informasi Sebaran Koperasi Berdasarkan Jenis Koperasi	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Per-industrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 125	Sebaran pasar tradisional	Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan	Informasi Sebaran Pasar Tradisional	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Per-industrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 126	Sebaran toko modern	Sebaran Pasar Modern di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya	Informasi Sebaran Pasar Modern Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Per-industrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 127	Data agen liquefied petroleum gas	Bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.	Informasi Jumlah Agen LPG	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Per-industrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 128	Data sub penyalur bahan bakar minyak	Bahan atau barang yang dipakai untuk menimbulkan api (panas), seperti minyak, batu bara	Informasi Data Sub Penyalur Bahan Bakar Minyak	Tbd	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 129	Data pergudangan	Jumlah pergudangan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah Pergudangan Di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 130	Data pusat perbelanjaan	Jumlah Pusat Perbelanjaan di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah Pusat Perbelanjaan Di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 131	Data unit pelaksana teknis dinas metrologi legal		Informasi	Tbd	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 132	Daftar calon penerima bantuan pelaku usaha mikro	Jumlah UMKM Penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)	Informasi Jumlah UMKM Penerima Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.133	Daftar nominatif calon peserta calon lokasi pendaftaran tanah sistematis lengkap mandiri		Informasi	Tbd	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Per-industrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.134	Daftar pelaku usaha penerima bantuan sertifikasi halal	Jumlah UMKM Penerima Bantuan Sertifikasi Halal	Informasi Jumlah UMKM Penerima Bantuan Sertifikasi Halal	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Per-industrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.135	Data gudang sembako	Jumlah Gudang Sembako di Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah Gudang Sembako Di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Per-industrian Dan Perdagangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.136	Organisasi Wanita	Data Organisasi Wanita	Data Organisasi Wanita	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.137	Organisasi Kemasyarakatan Penerima Hibah	Semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri	Data Organisasi kemasyarakatan penerima hibah	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.138	Kekerasan Perempuan	Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan	Data Kasus Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.139	Kekerasan anak	Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum	Data Kasus Kekerasan pada Anak di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.140	Forum anak daerah	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.	Data Forum Anak Daerah Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.141	Replikasi kelompok perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.		TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.142	Pelayanan keluarga berencana metode kontrasepsi jangka panjang	Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas	Data Pelayanan Peserta KB MKJP (Pelayanan KB gratis)	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.143	Kelompok tribina dan usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor	Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut	Data Kelompok Kegiatan Masyarakat Bina Keluarga (Tri Bina) Dan UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 144	Kelompok pusat informasi dan konseling remaja	Kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun.	Data Nama Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 145	Nama balai penyuluhan	Data Nama Balai Penyuluhan KB Kubu Raya	Data Nama Balai Penyuluhan KB Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 146	Kampung keluarga berkualitas	Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut	Data Kampung KB (Keluarga Berkualitas)	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 147	Penanaman modal dalam negeri	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.	Realisasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 148	Penanaman modal asing	Kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia	Realisasi Proyek Penanaman Modal Asing (PMA) di	TBD	terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri	Kabupaten Kubu Raya					Terpadu Satu Pintu				
KKR-DAD. 149	Data dasar pendidikan anak usia dini	Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.	Daftar Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mendapatkan pelatihan dasar parenting di Kabupaten Kuburaya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Per Semester	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 150	Data dasar sekolah dasar	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.	Data dasar sekolah menurut tingkat pendidikan SD, SMP, PAUD, PKBM berdasarkan desa di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Per Semester	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 151	Data Dasar Sekolah Menengah Pertama	Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.	Data Peserta Didik Aktif Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kabupaten Kuburaya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Per Semester	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 152	Data Dasar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Dan Sanggar Kegiatan Belajar	Data Peserta Didik Aktif Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kabupaten Kubu Raya	Data Peserta Didik Aktif Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kabupaten Kuburaya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Per Semester	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 153	Kondisi Ruang Kelas	Suatu ruangan di dalam bangunan sekolah atau kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM)	Jumlah Ruang dan Kondisi Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah berdasarkan Tingkat Pendidikan SD, SMP, PAUD, PKBM	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 154	Kondisi ruang guru	Suatu ruangan di dalam bangunan sekolah atau kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk	Jumlah Ruang dan Kondisi Ruang Kelas, Ruang Guru, Ruang Kepala Sekolah	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM)	berdasarkan Tingkat Pendidikan SD, SMP, PAUD, PKBM									
KKR-DAD. 155	Kondisi lab sekolah	Suatu ruangan di dalam bangunan sekolah atau kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM)	Jumlah Ruang dan Kondisi Lab IPA, Lab Bahasa, Lab Komputer berdasarkan tingkat pendidikan SD, SMP, PAUD, DAN PKBM	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 156	Kondisi <i>water closet</i> guru	Suatu ruangan di dalam bangunan sekolah atau kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM)	Jumlah dan kondisi WC murid dan WC Guru berdasarkan tingkat pendidikan SD, SMP, PAUD, PKBM	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 157	Kondisi <i>water closet</i>	Suatu ruangan di dalam bangunan sekolah atau kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM)	Jumlah dan kondisi WC murid dan WC Guru berdasarkan tingkat pendidikan SD, SMP, PAUD, PKBM	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.158	Kondisi perpustakaan sekolah	Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.	Jumlah ruang dan kondisi perpustakaan sekolah berdasarkan tingkat pendidikan SD, SMP, PAUD, PKBM	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.159	Jumlah meja, kursi, papan tulis dan komputer	Suatu ruangan di dalam bangunan sekolah atau kampus, yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM)	Jumlah meja, kursi, papan tulis dan komputer menurut tingkat pendidikan SD, SMP, PAUD, PKBM berdasarkan desa di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.160	Data kepala sekolah	Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku.	Data Kepala Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri dari Nama, NIP, Email, dan Status di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.161	Akreditasi sekolah	Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku.	Jumlah Sekolah Berdasarkan Akreditasi menurut tingkat pendidikan SD, SMP, PAUD, PKBM	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.162	Peserta didik putus	Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu	Data Peserta Didik putus Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kabupaten Kubu raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Per Semester	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.163	Peserta didik aktif	Anggota Masyarakat Yang Berusaha Mengembangkan Potensi Diri Melalui Proses Pembelajaran Yang Tersedia Pada Jalur, Jenjang, Dan Jenis Pendidikan Tertentu	Data Peserta Didik Aktif Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Di Kabupaten Kubu raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Per Semester	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.164	Rencana kerja tahun 2022	Rencana Kerja Tahun 2023	Rencana Kerja Tahun 2024	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 165	Siswa berprestasi, kompetensi olahraga siswa nasional	Siswa Berprestasi, Kompetensi Olahraga Siswa Nasional	Siswa Berprestasi, Kompetensi Olahraga Siswa Nasional	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 166	Penerima program indonesia pintar	Data Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Kuburaya	Data Peserta Didik Sekolah Dasar yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kabupaten Kubu raya	TBD	terbatas	Data Sektoral	tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 167	Usulan dan rekap analisa kerusakan sarana prasarana sekolah	Banyaknya Rehabilitasi Rehab Ruang Kelas Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Tingkat Kerusakan Ruang Kelas di Kabupaten Kubu Raya	Banyaknya Rehabilitasi Rehab Ruang Kelas Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan dan Tingkat Kerusakan Ruang Kelas di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 168	Peserta dan laporan kelulusan paket A,B dan C	Data Agregat Jumlah Peserta yang Lulus Ujian Paket A, B, DAN C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan SKB di Kabupaten Kuburaya	Data Agregat Jumlah Peserta yang Lulus Ujian Paket A, B, DAN C pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan SKB di Kabupaten Kubu raya	TBD	tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.169	Guru sertifikat	Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	Data Guru Sertifikasi yang mendapat honor	TBD	tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.170	Guru penggerak	Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	Data calon guru penggerak berdasarkan asal sekolah, guru kelas/mapel, pangkat/golongan, jenis kelamin, dan status kepegawaian.	TBD	terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.171	Sekolah penggerak	Data sekolah penggerak berdasarkan nama satuan pendidikan, NPSN, bentuk pendidikan, status sekolah, alamat, desa, kecamatan, koordinat dan jumlah guru	Data sekolah penggerak berdasarkan nama satuan pendidikan, NPSN, bentuk pendidikan, status sekolah, alamat, desa, kecamatan, koordinat dan jumlah guru	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.172	Calon guru inti	Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	Data Guru Pusat Belajar Guru (PBG) Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.173	Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja	Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	Data guru PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan Juni 2022 berdasarkan nama, NUPTK, Tempat lahir, tanggal lahir, status tugas, tempat tugas, kecamatan	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.174	Guru honorer bantuan operasioanl sekolah daerah	Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,	Data Guru Honor Sekolah dan Guru Honor Daerah Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.										
KKR-DAD.175	Guru pegawai negeri sipil	Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	Data Guru PNS berdasarkan nama, NUPTK, Tempat Tugas, Kecamatan, TMT pengangkatan, Jenis PTK, Pendidikan, Bidang Studi dan Golongan/ Pangkat	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.176	Guru honorer kategori 2	Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	Data Guru K2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kubu Raya berdasarkan nama, unit kerja, jabatan, NIK, NUPTK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir dan pendidikan terakhir	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.177	Usulan dan penetapan cagar dan warisan budaya	Warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.	Data Usulan dan Penetapan Cagar Budaya Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.178	Data pemilik / pengawasan sekolah	Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang berlaku.	Data pengawas Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 179	Data guru yang mendapatkan pelatihan dasar parenting	Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	Daftar Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mendapatkan pelatihan dasar parenting di Kabupaten Kuburaya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 180	Sebaran terminal	Prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.	Data Jumlah Traffick Light, Terminal dan Halte	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 181	Koordinasi parkir		Data Target Realisasi Retribusi Parkir	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 182	Sebaran rambu lalu lintas		Data Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.183	Sebaran pita pengaduh jalan	Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	Data Pita Pengaduh	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.184	Sebaran dermaga		Daftar Pelabuhan / Dermaga Dalam Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.185	Lokasi penerangan jalan umum	Listrik diusahakan oleh pemerintah jika penerangan jalan diusahakan/dibiayai oleh pemerintah. Listrik diusahakan oleh non pemerintah jika penerangan jalan yang diusahakan/dibiayai oleh masyarakat (swadaya) atau perusahaan walaupun sumbernya dari	Data Jumlah Penerangan Jalan Umum	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		PLN juga dikategorikan sebagai listrik non pemerintah.										
KKR-DAD.186	Halte sekolah		Halte Sekolah Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.187	Pagar pengaman jalan	Prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.	Pagar Pengaman Jalan (Guadriel) Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.188	Kendaraan bermotor diatas air	Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang di atas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel.	Kendaraan Bermotor di Atas Air	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.189	Pelabuhan penyeberangan	Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.	Rute Penyeberangan Pelayaran/Trayek Dalam/Luar Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
-------------	-------------------------	---	--	-----	---------	---------------	---------	-------------------	------------	-----	-----	----

KKR-DAD.190	Pelabuhan sungai	Tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.	Pelabuhan Sungai Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.191	Muatan kapal	Kapal yang datang di pelabuhan baik untuk berlabuh di perairan maupun bersandar di dermaga.	Data Muatan Kapal Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.192	Trayek angkutan sungai dan danau	Lintasan/rute/jalur angkutan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang yang mempunyai asal, tujuan, dan lintasan perjalanan yang tetap. Tidak termasuk yang hanya mengangkut barang saja.	Trayek Angkutan Sungai dan Danau Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perhubungan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.193	Perahu / kapal penangkapan ikan	Kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.	Perahu atau Kapal Penangkap Ikan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.194	Alat penangkapan ikan	sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan	Data Sektoral Agregat Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.195	Rumah tangga perikanan tangkap	Rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual.	Rumah Tangga Perikanan (RTP) Tangkap di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.196	Nelayan kecil	Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan Kapal Penangkap Ikan sampai dengan 5 GT maupun yang tidak menggunakan Kapal Penangkap Ikan.	Nelayan Kecil di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.197	Penangkapan ikan di perairan umum	Kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.	Data Sektoral Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum Kab. Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.198	Lahan budidaya ikan	Segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.	Data Sektoral Lahan Budidaya Ikan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.199	Kelompok pembudidaya ikan kecil	Segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.	Data Sektoral Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.200	Rumah tangga perikanan budidaya	Segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan atau usaha pergaraman.	Data Sektoral Rumah Tangga Perikanan (RTP) Budidaya di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.201	Produksi perikanan budidaya	Seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh usaha perikanan berbadan hukum, perorangan maupun usaha perikanan lainnya.	Produksi Perikanan Laut, Perairan Umum dan Budidaya di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.202	Unit pengolahan ikan	Tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.	Data Sektoral Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 203	Kelompok pengolahan ikan	Tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.	Data Sektoral Kelompok Pengolah Ikan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 204	Kelompok pemasar ikan	Tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.	Data Sektoral Kelompok Pemasar Ikan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 205	Massa dan nilai produksi pengolahan perikanan	Kegiatan penyaluran Ikan mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi hingga pemasaran.	Data Sektoral Massa dan Nilai Produksi Pemasaran Hasil Perikanan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 206	Massa dan nilai produksi pemasaran hasil perikanan	Kegiatan penyaluran Ikan mulai dari pengadaan, penyimpanan, transportasi hingga pemasaran.	Data Sektoral Massa (Volume) Dan Nilai Produksi Pemasaran Hasil Perikanan	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 207	Pelaku usaha perikanan	Usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan Pengolahan Ikan.		TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perikanan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 208	Arsip statis yang dibuat daftar arsip dalam simpul jaringan kearsipan nasional	Arsip simpul jaringan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya	Arsip simpul jaringan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 209	Pengawasan kearsipan daerah	Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan	Pengawasan Kearsipan Dinas Perpustakaan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perpustakaan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		Kearsipan Dinas Kabupaten Kubu Raya	dan Kearsipan Dinas Kabupaten Kubu Raya					an Dan Kearsipan				
KKR-DAD. 210	Layanan publik	Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik	Layanan publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 211	Perpustakaan	Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.	Daftar perpustakaan daerah dan sekolah	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.212	Program keluarga harapan	Program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin dengan memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga/keluarga miskin dan rumah tangga/keluarga sangat miskin. Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.	Data Program Keluarga Harapan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaruan	Dinas Sosial	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.213	Penyandang disabilitas dewasa anak	Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.	Data penyandang disabilitas di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Sosial	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 214	Data terpadu kesejahteraan sosial	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kubu Raya	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Sosial	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 215	Penerima bantuan iuran	Peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayar oleh pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.	Data Rekap PBI (Penerima Bantuan Iuran) Dengan Data Kemiskinan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Per Bulan	Dinas Sosial	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 216	Anak berhadapan hukum	Pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.	Data Anak Berhadapan Dengan Hukum di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Sosial	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 217	Struktural perangkat daerah	Data Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	Data Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Sosial	Diskominfo	TBD	TBD	
KKR-DAD. 218	Ke- pendudukan menurut jenis kelamin	Data Agregat Kependudukan Menurut Jenis Kelamin	Data Agregat Kependudukan Menurut Jenis Kelamin	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 219	Ke- pendudukan menurut perkawinan	Data Agregat Kependudukan Menurut perkawinan	Data Agregat Kependudukan Menurut perkawinan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.220	Ke- pendudukan menurut agama	Data Agregat Kependudukan Menurut agama	Data Agregat Kependudukan Menurut agama	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.221	Ke- pendudukan menurut golongan darah	Data Agregat Kependudukan Menurut golongan darah	Data Agregat Kependudukan Menurut golongan darah	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.222	Ke- pendudukan menurut umur	Data Agregat Kependudukan Menurut umur	Data Agregat Kependudukan Menurut umur	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.223	Ke- pendudukan menurut pendidikan	Data Agregat Kependudukan Menurut pendidikan	Data Agregat Kependudukan Menurut pendidikan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.224	Ke- pendudukan menurut wajib ktp	Data Agregat Kependudukan Menurut wajib KTP	Data Agregat Kependudukan Menurut wajib KTP	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.225	Ke- pendudukan menurut pekerjaan	Data Agregat Kependudukan Menurut pekerjaan	Data Agregat Kependudukan Menurut pekerjaan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.226	Ke- pendudukan menurut kepala keluarga	Data Agregat Kependudukan Menurut keluarga	Data Agregat Kependudukan Menurut keluarga	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.227	Ke- pendudukan menurut wajib kia	Data Agregat Kependudukan Menurut wajib KIA	Data Agregat Kependudukan Menurut wajib KIA	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 228	Ke- pendudukan menurut usia anak 0-18 tahun	Data Agregat Kependudukan Menurut usia anak 0-18 tahun	Data Agregat Kependudukan Menurut usia anak 0-18 tahun	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 229	Ke- pendudukan menurut status kawin tdk tercatat	Data Agregat Kependudukan Menurut kawin tdk tercatat	Data Agregat Kependudukan Menurut kawin tdk tercatat	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 230	Ke- pendudukan menurut belum tamat sd	Data Agregat Kependudukan Menurut belum tamat SD	Data Agregat Kependudukan Menurut belum tamat SD	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 231	Ke- pendudukan menurut belum tamat smp	Data Agregat Kependudukan Menurut belum tamat SMP	Data Agregat Kependudukan Menurut belum tamat SMP	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 232	Kerja sama	Kerja Sama Disdukcapil Kabupaten Kubu Raya	Kerja Sama Disdukcapil Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 233	Data warga negara asing	Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kubu Raya Menurut Warga Negara Asing (WNA)	Data Agregat Kependudukan Kabupaten Kubu Raya Menurut Warga Negara Asing (WNA)	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kependu- kan Dan Pencatatan Sipil	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 234	Data pusat kesehatan masyarakat	Data Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Data Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharu- an	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 235	Puskesmas pembantu, pos kesehatan masyarakat, pondok bersalin desa	Data Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Data Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 236	Pos pelayanan terpadu	Data Lokasi Posyandu di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Data Lokasi Posyandu di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 237	Pos upaya kesehatan kerja	Jumlah Pos UKK di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Pos UKK di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 238	Pos pelayanan terpadu lansia	POSYANDU LANSIA	INFORMASI POSYANDU LANSIA	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 239	Covid 19 kecamatan	COVID KECAMATAN	INFORMASI COVID KECAMATAN	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 240	Rumah singgah isolasi pasien covid 19	Jumlah Rumah Singgah Isolasi Pasien Covid-19 di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Rumah Singgah Isolasi Pasien Covid-19 di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 241	Perdagangan besar farmasi dan penyalur alat kesehatan		INFORMASI	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 242	Pelayanan kefarmasian rumah sakit	Jumlah Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 243	Apotek	Jumlah Apotek di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Apotek di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 244	Toko obat	Jumlah Toko Obat di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Toko Obat di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 245	Wilayah kerja dan sasaran puskesmas	Data Wilayah Kerja dan Sasaran Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Data Wilayah Kerja dan Sasaran Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 246	Kondisi bangunan dan fasilitas puskesmas	Kondisi Bangunan dan Fasilitas Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Kondisi Bangunan dan Fasilitas Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 247	Pos kesehatan pasentren		INFORMASI	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 248	Pegawai puskesmas	Jumlah Pegawai Puskesmas, RSUD dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Kubu	INFORMASI Jumlah Pegawai Puskesmas, RSUD dan Dinas Kesehatan di Kabupaten Kubu	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 249	Status gizi balita wasting bulan agregrat	Status Gizi Balita Wasting 0-59 Bulan Agrerat di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Status Gizi Balita Wasting 0-59 Bulan Agrerat di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 250	Status gizi balita underweight bulan agregat	Status Gizi Balita Underweight 0-59 Bulan Agrerat di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Status Gizi Balita Underweight 0-59 Bulan Agrerat di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 251	Status gizi balita stunting bulan agregat	Status Gizi Balita Stunting	Informasi Status Gizi Balita Stunting	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 252	Jabatan fungsional agregat	Jumlah Pegawai ASN Menurut Jafung Agrerat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	Informasi Jumlah Pegawai ASN Menurut Jafung Agrerat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharu-an	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 253	Honor daerah agregat	Jumlah Honor Daerah Agrerat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Honor Daerah Agrerat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharu-an	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 254	Pegawai ASN agregat	Jumlah Pegawai ASN Agrerat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Pegawai ASN Agrerat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharu-an	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 255	Ibu hamil agregat	Jumlah Ibu Hamil Agrerat Menurut Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Ibu Hamil Agrerat Menurut Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Data Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 256	Pos binaan terpadu	JUMLAH POSBINDU	INFORMASI JUMLAH POSBINDU	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 257	Si BUNDA	Jumlah Sasaran Bumil Berdasarkan Data Si Bunda di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Sasaran Bumil Berdasarkan Data Si Bunda di Kabupaten Kubu Raya	TBD	terbatas	Data Sektoral	Setiap Ada Pembaharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 258	Bayi lahir 2022 agregat	Jumlah Bayi Lahir Agrerat Menurut Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Bayi Lahir Agrerat Menurut Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 259	Industri rumah tangga pangan yang mendapat izin pangan industri rumah tangga		INFORMASI	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 260	Tempat pengelolaan makanan dan depot	Jumlah Laik Sehat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Depot di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Laik Sehat Tempat Pengolahan Makanan (TPM) dan Depot di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 261	Klinik	Jumlah Klinik di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Klinik di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 262	Pencegahan penularan dari ibu ke anak sifilis	Jumlah Penularan Penyakit Ibu Anak Sifilis Menurut Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Penularan Penyakit Ibu Anak Sifilis Menurut Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 263	Pencegahan penularan dari ibu ke anak hepatitis B		INFORMASI	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 264	Target imunisasi bayi	Target Imunisasi Bayi di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Target Imunisasi Bayi di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 265	Rekap kasus human immunodeficiency virus	Jumlah Penularan Penyakit Ibu Anak (PPIA) HIV Menurut Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Penularan Penyakit Ibu Anak (PPIA) HIV Menurut Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 266	Kasus human immunodeficiency virus per bulan agregat	Rekap Kasus HIV di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Rekap Kasus HIV di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 267	Pencegahan penularan dari ibu ke anak		INFORMASI	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 268	Ibu hamil bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Agrerat Menurut Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Jumlah Ibu Bersalin Agrerat Menurut Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 269	Capaian 12 standar pelayanan minimal th 2021	Capaian Pelaksanaan 12 SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Capaian Pelaksanaan 12 SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 270	Sebaran angka kematian ibu	ANGKA KEMATIAN IBUQ	INFORMASI ANGKA KEMATIAN IBUQ	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 271	Sebaran angka kematian bayi	ANGKA KEMATIAN BAYI	INFORMASI ANGKA KEMATIAN BAYI	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 272	Standar pelayanan masyarakat 3	Pelayanan Bayi Baru Lahir	INFORMASI Pelayanan Bayi Baru Lahir di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 273	Standar pelayanan masyarakat 4	Pelayanan Balita	INFORMASI Pelayanan Balita di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 274	Standar pelayanan masyarakat 5	Pelayanan Anak Usia Dasar	INFORMASI Pelayanan Anak Usia Dasar di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 275	Standar pelayanan masyarakat 6	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Informasi Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 276	Standar pelayanan masyarakat 7	Pelayanan Lansia	Informasi Pelayanan Lansia Di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 277	Standar pelayanan masyarakat 8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Informasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 278	Standar pelayanan masyarakat 9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Informasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 279	Standar pelayanan masyarakat 10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa	INFORMASI Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 280	Standar pelayanan masyarakat 11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB Tuberkulosis di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB Tuberkulosis di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 281	Standar pelayanan masyarakat 12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Manusia (Human Immunodeficiency)	INFORMASI Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Manusia (Human Immunodeficiency di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 282	Stunting	Data Stunting di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Data Stunting di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 283	Vaksinasi	Data Vaksinasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Data Vaksinasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Tertutup	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 284	Akreditasi puskesmas	Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	INFORMASI Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pem-baharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 285	Strata posyandu	Strata Posyandu	Informasi Strata Posyandu	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pem-baharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 286	Desa <i>open defecation free</i>	Desa Odf	Informasi Desa Odf	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Setiap Ada Pem-baharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 287	PBI dari anggaran pendapatan dan belanja daerah	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	INFORMASI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	TBD	Terbatas	Data Sektoral	Setiap Ada Pem-baharuan	Dinas Kesehatan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 288	Lembaga pelatihan kerja	Instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang ada di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 289	Kartu pencari kerja	Bagian dari pencari kerja yang terdaftar dan/atau didaftarkan dalam sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perseorangan, pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau pemberi kerja	Kartu Pencari Kerja (Ak. 1) Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 290	Desa migran produktif	Penduduk yang melakukan perpindahan tempat tinggal melewati batas wilayah administratif dan telah tinggal atau bermaksud tinggal satu tahun atau lebih.	Desa Migran Produktif (Desmigratif) Yang Ada Dikabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 291	Tenaga kerja asing	Warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.	Tenaga Kerja Asing Yang Ada Dilingkungan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 292	Perseroan terbatas	Perseroan Terbatas (PT) Dan CV Yang Ada Dikabupaten Kubu Raya	Perseroan Terbatas (PT) Dan CV Yang Ada Dikabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 293	Kawasan perkotaan baru	Bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.	Kawasan Perkotaan Baru Di Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 294	Peraturan perusahaan	Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.	Peraturan Perusahaan Yang Ada Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 295	Serikat pekerja/ serikat buruh	Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.	Serikat Pekerja/Serikat Buruh Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.296	Lembaga kerja sama bipartit	Setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Lembaga Kerjasama Bipartit Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.297	Perjanjian kerja	Perjanjian Kerja Bersama merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak	Perjanjian Kerja Bersama Perusahaan	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 298	Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 299	Hasil penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah	Tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.	Data Pelanggaran Perda & Perbup	TBD	terbatas	Data Sektoral	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 300	Hasil pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Hasil Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Hasil Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 301	Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat	Proses penerapan suatu metode tertentu untuk melindungi kondisi fisik dari warisan budaya dan alam dengan menjaganya agar tidak rusak,	Data Pengaman Masyarakat	TBD	Terbuka	Data Sektoral	Tahunan	Satuan Polisi Pamong Praja	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

		hilang maupun hancur.										
KKR-DAD. 302	Tutupan Lahan Magrove	utupan lahan merupakan kenampakan fisik dan biologis yang menutupi permukaan tanah, termasuk air, vegetasi, tanah kosong dan bangunan.	hasil identifikasi peta tutupan lahan, Kabupaten Kubu Raya didominasi oleh kawasan perkebunan dan kawasan hutan rawa sekunder	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 303	Sebaran Pembangkit Listrik	Berisikan informasi mengenai layanan listrik yang telah dimuktahirkan Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Desa (TPDIGD) di Kabupaten Kubu Raya yang dirinci per wilayah desa	Berisikan informasi mengenai layanan listrik yang telah dimuktahirkan Tenaga Penggerak Data Informasi Geospasial Desa (TPDIGD) di Kabupaten Kubu Raya yang dirinci per wilayah desa	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 304	Verifikasi <i>Fishing Ground</i> Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 305	Habitat Pesut Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 306	Kabel Bawah Laut			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 307	Alur Pelayaran			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.308	Alur Migrasi Penyu			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.309	Tempat Pelelangan Ikan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.310	Destinasi wisata			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.311	Pulau-pulau			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.312	Rawan bencana pesisir			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.313	Sebaran mangrove			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.314	Batimetri			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.315	Dermaga			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.316	Kawasan konservasi perairan daerah			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.317	Indeks desa membangun pesisir			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.318	Lokasi Kantor Desa Kabupaten Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.319	Sebaran Lokasi Kantor Kecamatan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.320	Kerawanan Banjir			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.321	Garis Pantai			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.322	Daerah Aliran Sungai			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.323	Tutupan lahan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.324	Irigasi			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.325	Sistem pengolahan air minum			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.326	Ekoregion			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.327	Morfologi			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.328	Jembatan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.329	Batas desa			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.330	Sekolah dasar sistem identitas cerdas/smart identity system			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.331	Tower telekomunikasi			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.332	Destinasi wisata			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.333	Infrastruktur lingkungan tahun anggaran 2020			TBD	Terbuka	Data geospasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.334	Sekolah menengah pertama			TBD	Terbuka	Data geospasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.335	Sekolah dasar			TBD	Terbuka	Data geospasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.336	Jenis pertanian			TBD	Terbuka	Data geospasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.337	Garis kontur			TBD	Terbuka	Data geospasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.338	Tipe perkerasan jalan kabupaten			TBD	Terbuka	Data geospasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.339	Kondisi jalan			TBD	Terbuka	Data geospasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.340	Kantor desa			TBD	Terbuka	Data geospasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.341	Kantor kecamatan			TBD	Terbuka	Data geospasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.342	Jaringan jalan			TBD	Terbuka	Data geospasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.343	Kawasan mangrove			TBD	Terbuka	Data geospasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.344	Tubuh air			TBD	Terbuka	Data geospasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 345	Jenis tanah			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 346	Pelabuhan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 347	Batas administrasi desa			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 348	Geologi			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 349	Batas administrasi kecamatan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 350	Penutupan lahan 50k			TBD	terbatas	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 351	Sistem lahan 50k			TBD	Terbatas	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 352	Informasi jumlah penduduk kelompok umur kec. Terentang			TBD	Terbuka	Data geo-spasial	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 353	Informasi jumlah penduduk kelompok umur kec. Teluk pakedai			TBD	Terbuka	Data geo-spasial	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 354	Informasi jumlah penduduk kelompok umur kec. Sungai raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 355	Informasi Jumlah Penduduk Kelompok Umur Kec. Sungai Kakap			TBD	Terbuka	Data geo-spasial	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 356	Informasi Jumlah Penduduk Kelompok Umur Kec. Sungai Ambawang			TBD	Terbuka	Data geo-spasial	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 357	Informasi Jumlah Penduduk Kelompok Umur Kec. Rasau Jaya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 358	Informasi Jumlah Penduduk Kelompok Umur Kec. Kubu			TBD	Terbuka	Data geo-spasial	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 359	Informasi Jumlah Penduduk Kelompok Umur Kec. Kuala Mandor B			TBD	Terbuka	Data geo-spasial	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 360	Informasi Jumlah Penduduk Kelompok Umur Kec. Batu Ampar			TBD	Terbuka	Data geo-spasial	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.361	Informasi Jumlah Penduduk Kelompok Umur Kec. Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.362	Informasi Satuan Wilayah Kecamatan Terentang			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.363	Informasi Satuan Wilayah Kecamatan Teluk Pakedai			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.364	Informasi Satuan Wilayah Kecamatan Sungai Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.365	Informasi Satuan Wilayah Kecamatan Sungai Kakap			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.366	Informasi Satuan Wilayah Kecamatan Sungai Ambawang			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.367	Informasi Satuan Wilayah Kecamatan Rasau Jaya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.368	Informasi Satuan Wilayah Kecamatan Kubu			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.369	Informasi Satuan Wilayah Kecamatan Kuala Mandor B			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.370	Informasi Satuan Wilayah Kecamatan Batu Ampar			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.371	Informasi Satuan Wilayah Kecamatan Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.372	Peta Administrasi Kab Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.373	Peta Daerah Aliran Sungai Kab. Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.374	Peta Jaringan Jalan Kab Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.375	Peta Jenis Tanah Kab Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.376	Peta Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin			TBD	Terbuka	Data geo-spasial	Tahunan	Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.377	Peta Kerentanan Air Pemukiman Kab Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.378	Peta Kondisi Jaringan Jalan Kab Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.379	Peta Rencana Pola Ruang Kab Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.380	Peta Rencana Struktur Ruang Kab. Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.381	Peta Tipe Perkerasan Jalan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.382	Peta Administrasi Kec Batu Ampar			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.383	Peta Jenis Tanah Kab Kubu Raya			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.384	Peta Kelas Lereng Kec Batu Ampar			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.385	Peta Penggunaan Lahan Kec Batu Ampar			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.386	Peta Administrasi Kec Kubu			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.387	Peta Jenis Tanah Kec Kubu			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.388	Peta Kelas Lereng Kec Kubu			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD. 389	Peta Penggunaan Lahan Kec Sungai Kakap			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 390	Peta Administrasi Kec Teluk Pakedai			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 391	Peta Jenis Tanah Kec Teluk Pakedai			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 392	Peta Kelas Lereng Kec Teluk Pakedai			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 393	Peta Penggunaan Lahan Kec Teluk Pakedai			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 394	Rencana Tata Ruang Wilayah Kab Kubu Raya 2016-2036			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 395	Peta Kerentanan Air Permukaan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 396	Peta curah hujan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 397	Peta ekoregion			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 398	Peta geologi			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 399	Peta kawasan konservasi perairan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD. 400	Peta kemampuan lahan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.401	Peta kemiringan lereng			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.402	Peta kerawanan bencana karhutla			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.403	Peta kerawanan bencana pesisir			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.404	Peta sebaran mangrove			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.405	Peta tutupan lahan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Bappeda litbang	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.406	Peta rawan bencana			TBD	Terbatas	Data geo-spasial	Periode Jangka Tertentu	BPBD	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.407	Kantor balai penyuluhan pertanian		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.408	Jenis pertanian		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.409	Roadmap sayuran tanaman obat bawang daun		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.410	Roadmap sayuran tanaman obat bawang merah		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.411	Roadmap sayuran tanaman obat bayam		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.412	Roadmap sayuran tanaman obat buncis		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.413	Roadmap sayuran tanaman obat cabai besar		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.414	Roadmap sayuran tanaman obat cabai rawit		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.415	Roadmap sayuran tanaman obat delingo		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.416	Roadmap sayuran tanaman obat jahe		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.417	Roadmap sayuran tanaman obat kacang panjang		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.418	Roadmap sayuran tanaman obat kangkung		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.419	Roadmap sayuran tanaman obat ikeji beling		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

								Dan Pertanian				
KKR-DAD.420	Roadmap sayuran tanaman obat kencur		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.421	Roadmap sayuran tanaman obat ketimun		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.422	Roadmap sayuran tanaman obat kunyit		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.423	Roadmap sayuran tanaman obat laos/lengkuas		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.424	Roadmap sayuran tanaman obat lempuyang		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.425	Roadmap sayuran tanaman obat lidah buaya		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.426	Roadmap sayuran tanaman obat mahkota dewa		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.427	Roadmap sayuran tanaman obat mengkudu		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.428	Roadmap sayuran tanaman obat petsai/sawi		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.429	Roadmap sayuran tanaman obat sambiloto		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.430	Roadmap sayuran tanaman obat temukunci		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.431	Roadmap sayuran tanaman obat temulawak		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.432	Roadmap sayuran tanaman obat terung		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.433	Roadmap sayuran tanaman obat tomat		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.434	Inventarisasi Lahan Kering Hortikultura-Overlay Lahan Kering Dan Gambut Kec Rasau Jaya		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.435	Inventarisasi Lahan Kering Hortikultura-Overlay Lahan Kering Dan Gambut Kec Sungai Kakap		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.436	Inventarisasi Lahan Kering Hortikultura-Overlay Lahan Kering Dan Gambut Kec Sungai Raya		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.437	Inventarisasi Lahan Kering Hortikultura-Overlay Lahan Kering Dan Gambut Kec Terentang		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.438	Pemanfaatan Lahan Kering Kec Rasau Jaya		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.439	Pemanfaatan Lahan Kering Kec Sungai Ambawang		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.440	Pemanfaatan Lahan Kering Kec Sungai Kakap		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.441	Pemanfaatan Lahan Kering Kec Sungai Raya		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.442	Pemanfaatan Lahan Kering Kec Terentang		Informasi	TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.443	Pensil			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang , Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.444	Peta Saluran Daerah Irigasi Dan Daerah Irigasi Rawa			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang , Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.445	Peta Sebaran Jembatan 2022			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang , Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.446	Peta Jalan Kab Kubu Raya 2022			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang , Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.447	Jalan Kab Eksisting			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang , Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.448	Peta Jalan Kab Berdasarkan Surat Keputusan			TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang , Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.449	Peta Topografi Bagian Wilayah Perkotaan Kab Kubu Raya			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.450	Peta Jenis Tanah Pola Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.451	Peta Kesatuan Hidrologi Gambut Terhadap Pola Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.452	Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Lahan			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.453	Peta Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Penyedia Air			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.454	Peta Sebaran Suhu Berdasarkan Urban Heat Island			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.455	Peta Daya Dukung KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Kakap			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.456	Peta Daya Dukung Penyediaan Air Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.457	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.458	Peta Jasa Ekosistem Pemurnian Air Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

	Perkotaan Sungai Kakap											
KKR-DAD.459	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.460	Peta Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.461	Peta Kerentanan Perubahan Iklim Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.462	Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.463	Peta Kerapatan Vegetasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.464	Peta Rawan Bencana Banjir Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.465	Peta Rawan Bencana Cuaca Ekstrim Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.466	Peta Rawan Bencana Kekeringan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungai Kakap			TBD	Tertutup	Data geo-spasial		Dinas Lingkungan Hidup	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.467	Batas Desa	Status suatu wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan yang memenuhi kriteria klasifikasi desa perdesaan		TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.468	Perusahaan Perkebunan Swasta	Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.		TBD	Terbatas	Data geo-spasial		Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.469	Perusahaan Pengolahan Hasil Perkebunan	Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.		TBD	Terbatas	Data geo-spasial		Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

KKR-DAD.470	Perusahaan Perkebunan Kelapa	Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.		TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.471	Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Mandiri	Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.		TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.472	Perusahaan Perkebunan Karet	Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.		TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.473	Perusahaan Perkebunan Pinang	Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.		TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya
KKR-DAD.474	Perusahaan Perkebunan Kopi	Perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum.		TBD	Terbuka	Data geo-spasial		Dinas Perkebunan Dan Peternakan	Diskominfo	TBD	TBD	Ya

3. Atribut Metadata Arsitektur Layanan

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Model Referensi Layanan	Unit Pelaksana	Kementerian/ Lembaga terkait	Urusan Pemerintahan Terkait	Target Pengguna Layanan	Metode Layanan	Potensi manfaat	Potensi ekonomi	potensi risiko	mitigasi risiko	ID Meta-data terkait
KKR-DAL-01	Layanan Administrasi Kependudukan	untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses	Validasi dan Verifikasi Administrasi (KK, Permohonan KTP, Ket. Pindah Penduduk, Surat Keterangan lainnya)	RAL.01.23 Kependudukan	DISDUKCAPIL	Kementerian Dalam Negeri	RAB.09.09 Kependudukan	Masyarakat	Langsung	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL-02	Layanan Arsip Statis	Memberikan Akses Arsip kepada Publik, untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa	Melakukan Akuisisi Arsip dari Perangkat Daerah, Menginventarisir Arsip dan membuat Quide Arsip	RAL.01.44 Informasi	Diperpusip	ANRI	RAB.09.06 Aparatur Negara	Seluruh OPD	Langsung	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

KKR-DAL.03	Layanan Perpustakaan	Memberikan informasi untuk penelitian, rekreasi, dan mengembangkan pendidikan	Untuk Peminjaman masih menggunakan Cara Konvensional yaitu meninggalkan KTP untuk meminjam buku sedangkan untuk baca di tempat hanya mengisi buku tamu	RAL.01.44 Informasi	Diperpusip	PerpusNas	RAB.06.01 Pendidikan	Masyarakat, Anggota Perpustakaan	Langsung	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.04	Layanan informasi barang terkena pajak	Sistem yang mengelola data Wajib Pajak dan Objek Pajak	Sistem yang mengelola data Wajib Pajak dan Objek Pajak	RAL.02.02 Keuangan	BAPENDA	Dirjen Pajak	RAB.09.02 Keuangan	Wajib Pajak	Website/ SisMIOP	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.05	Layanan informasi penanaman modal	Agar masyarakat memperoleh kemudahan untuk melakukan pengajuan permohonan perizinan dengan proses yang terintegrasi dan terpusat di suatu tempat pelayanan	Layanan berbantuan bagi pelaku usaha secara Online	RAL.01.44 Informasi	DPMPSTP	BKPM	RAB.02 Ekonomi dan Industri	Pelaku Usaha	Website/ MPP	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.06	Layanan Perizinan	Agar masyarakat memperoleh kemudahan untuk melakukan pengajuan permohonan perizinan dengan proses yang terintegrasi dan terpusat di suatu tempat pelayanan	Aplikasi SICANTIK Cloud hadir untuk mempermudah perizinan berusaha mulai dari masyarakat hingga pemerintah.	RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi	DPMPSTP	BKPM	RAB.02 Ekonomi dan Industri	Masyarakat, Pemerintah, Pelaku Usaha	Website/ MPP	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

KKR-DAL.07	Layanan informasi produk hukum Kabupaten Kubu Raya	untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum menyangkut produk hukum, sekaligus untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi,men yangkut produk hukum serta untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum	Layanan yang menyediakan data produk-produk hukum yang dapat diakses secara online	RAL.01.44 Informasi	SETDA Bagian Hukum	Kemenkum Ham	RAB.05.01 Hukum	Masyarakat	Website/ JDIH	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.08	Layanan kepegawaian	Untuk memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai	Layanan internal kepegawaian, misalkan pengajuan cuti, dll.	RAL.09.04 Aparatur Negara	BKPSDM	BKN	RAB.09.06 Aparatur Negara	ASN	SIAP ASN	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

KKR-DAL.09	Layanan Pelaporan bencana daerah	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pengurangan risiko bencana, yang terintegrasi dalam dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat	Ketika ada bencana, anggota grup dapat melaporkan kejadian	RAL.01.45 Komunikasi	BPBD	Kementrian Lingkungan Hidup, BPBN	RAB.09.04 Komunikasi	Internal	Website/ bpbdd.kub urayakab.go.id	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.10	Layanan pemberian informasi terkait penyimpanan LB3	rekomendasi kelayakan penyimpanan LB3	Memberikan layanan berupa Pengecekan Tempat Penyimpanan LB3 yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku	RAL.01.41 Lingkungan Hidup	DLH	KLHK	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	Pelaku Usaha, Masyarakat	Website	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.11	Layanan Pemeriksaan SPPL dan Pemberian Rekomendasi terkait UKL-UPL	memeriksa SPPL, dan rekomendasi UKL-UPL	Memberikan Layanan Pemeriksaan SPPL, dan Rekomendasi UKLUPL kepada Badan Usaha	RAL.01.41 Lingkungan Hidup	DLH	KLHK	RAB.07.05 Lingkungan Hidup	Badan Usaha	OSS	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.12	Layanan dashboard kinerja organisasi pemerintahan	melihat capaian kinerja OPD	Layanan dashboard untuk melihat capaian kinerja OPD	RAL.09.07 Akuntabilitas Kinerja	Setda Bag Organisasi	Kemenpan-RB	RAB.09.07 Kesekretariat Negara	Seluruh OPD	E-Sakip	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

KKR-DAL.13	Layanan Capaian Kinerja	pelayanan fasilitasi laporan akuntabilitas kinerja pemerintah	E-Sakip adalah sistem informasi berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur sipil negara dan pengintegrasian informasi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja, dilaksanakan melalui penyelenggaraan, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara online di lingkungan Pemerintah Kab. Kubu Raya	RAL.09.07 Akuntabilitas Kinerja	SETDA Bag Organisasi	Kemenpan-RB	RAB.09.07 Kesekretariat Negara	Seluruh OPD	E-Sakip	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.14	Layanan pengawasan kinerja Organisasi dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Kubu Raya	e-monev adalah sistem monitoring dan evaluasi	Aplikasi untuk monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan	RAL.09.07 Akuntabilitas Kinerja	Setda Bag Organisasi	Kemenpan-RB	RAB.09.07 Kesekretariat Negara	Seluruh OPD	eMonev	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.15	Layanan pemerintah pusat terkait dengan jaminan sosial	aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah	SIKS-NG adalah aplikasi Data Kemiskinan yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos	RAL.01.26 Sosial	DINSOS	Kemensos	RAB.04.02	Masyarakat	Website/ siks.kemensos.go.id	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

KKR-DAL.16	Layanan pencarian kerja untuk masyarakat Kabupaten Kubu Raya	sistem pencarian lowongan pekerjaan	Sistem ini mempermudah dalam pencarian lowongan pekerjaan, pengurusan kartu pekerja, serta memberikan informasi seputar keberadaan industri kecil menengah dan perusahaan industri yang berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya	RAL.01.32 Ketenagakerjaan	DISTRANSNAKER	Kemenaker	RAB.06.02 Ketenagakerjaan	Masyarakat		TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.17	Layanan Pendataan anak putus sekolah	pendataan anak putus sekolah	Sebagai wadah Pendataan terhadap anak yang putus sekolah	RAL.01.31 Pendidikan	DIKBUD	Kemendikbud	RAB.06.01 Pendidikan	Masyarakat		TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.18	Layanan supervisi pengawasan Kependidikan	pengawasan	Untuk memudahkan pengawas dalam proses supervisi dan pelayanan	RAL.01.31 Pendidikan	DIKBUD	Kemendikbud	RAB.06.01 Pendidikan	Pengawas		TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

KKR-DAL.19	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	memberikan kemudahan kepada badan usaha untuk turut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kab Kubu Raya	Sarana/Layanan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing.	RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi	SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	Pelaku Usaha, Masyarakat	website	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.20	Layanan Penilaian Kinerja Penyedia Barang dan Jasa	sistem E-Procurement pengadaan barang / jasa	Sarana/Layanan untuk Menilai Kinerja Penyedia.		SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	Pelaku Usaha, Masyarakat	SPSE	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.21	Layanan terkait pengadaan barang dan jasa	sistem E-Procurement pengadaan barang / jasa	Sarana/Layanan untuk Mengumumkan RUP.	RAL.09.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	Masyarakat	Website/sirup.lkpp.go.id	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.22	Layanan pengaduan	Klinik Aspirasi dan layanan pengaduan	Sarana bagi masyarakat Kabupaten Kubu Raya dalam menyampaikan aspirasi serta berbagai permasalahan dan keluhan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah.	RAL.01.45 Komunikasi	DISKOMINFO	Kemenpan-RB	RB.09.04 Komunikasi	Masyarakat	SP4N Laporan	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.23	Layanan Informasi Satu Data	Sistem informasi satu data	meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk	RAL.01.43 Informasi	DISKOMINFO	BPS			website/data.kuburayakab.go.id	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

			meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan											
KKR-DAL.24	Layanan penginputan laporan masyarakat	laporan penginputan laporan harian setiap bidang	Layanan penginputan laporan harian setiap bidang.	RAL.01.45 Komunikasi	SATPOLPP			Masyarakat	Website/ siap tertib	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.25	Layanan penyediaan informasi terkait pembangunan daerah	IPD adalah sistem informasi pembangunan daerah	Membantu penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah, penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan daerah secara elektronik yang pelaksanaannya oleh pemerintah daerah secara nasional.	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	BAPPEDALITB ANG	Kemendagri	RAB.09.03 Informasi	Seluruh OPD	website/ sipd	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.26	Layanan penyediaan informasi terkait pembangunan daerah	sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengelola data pembangunan daerah	System yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengelola data pembangunan daerah	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	BAPPEDALITB ANG	Kemendagri	RAB.09.03 Informasi	Bakesbangpol	website/ sipd	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

KKR-DAL. 27	Layanan Perencanaan yang diberikan kepada OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Kubu Raya	e-planning adalah sistem perencanaan	Membantu Pihak Bappeda dan SKPD dalam merumuskan rencana kerja sesuai dengan usulan yang ada dalam dokumen hasil Musrenbang. Membantu Bappeda dan SKPD dalam menyusun Indikator Kinerja yang terukur, sistematis dan berkelanjutan.	RAL.09.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	BAPPEDALITB ANG	Bappenas	RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional	Seluruh OPD	Website	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL. 28	Layanan perizinan pembangunan gedung	perizinan bangunan gedung	Pengurusan Izin Bangunan Gedung	RAL.01.17 Pekerjaan Umum	PUPR	KemenPUPR	RAB.03.01 Pekerjaan Umum	Dispurpr	Website/ Simbg	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL. 29	Layanan Uji KIR Online	pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara online	Pendaftaran kendaraan yang akan diuji dan langsung terhubung dengan kementerian	RAL.01.19 Transportasi	DISHUB	Kementrian Perhubungan	RAB.03.03 Transportasi	Masyarakat	Website	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL. 30	P Care	penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan (UKP) tingkat pertama	Pelayanan Kesehatan Faskes tingkat pertama	RAL.01.25 Kesehatan	DINKES	Kementerian Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	Masyarakat	Website	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

KKR-DAL.31	Pelayanan UKM	Pelayanan UKM berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan ke masyarakat	Pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan ke Masyarakat	RAL.01.25 Kesehatan	Puskesmas	Kementerian Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	Masyarakat	Website/ sikda. kemenkes .go.id	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.32	Pelayanan UKP	memberikan pelayanan kesehatan ke pasien (berobat, pemeriksaan penunjang laboratorium, pelayanan surat keterangan berbadan kesehatan, pelayanan rawat inap keperawatan dan kebidanan)	Pelayanan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan) yaitu memberikan pelayanan Kesehatan ke pasien (Berobat, Pemeriksaan penunjang Laboratorium, Pelayanan Surat Keterangan Berbadan Kesehatan, pelayanan rawat inap keperawatan dan kebidanan)	RAL.01.25 Kesehatan	Puskesmas	Kementerian Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	Masyarakat	Website/ sisrute. kemenkes .go.id	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL.33	Layanan pendaftaran pasien rawat jalan	layanan pendaftaran pasien	Aplikasi yang digunakan untuk masyarakat melakukan pendaftaran	RAL.01.25 Kesehatan	RSUD	Kementerian Kesehatan	RAB.04.01 Kesehatan	Masyarakat		TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

KKR-DAL-34	Layanan WBS (Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat)	aplikasi pengelola pengaduan di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah	Layanan Pelaporan masyarakat	RAL.01.45 Komunikasi	Inspektorat	Kemenpan-RB		Masyarakat	WBS	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD
KKR-DAL-35	Layanan informasi umum	mensosialisasikan informasi umum dinas terkait	Menyampaikan Berita, Konten Media dan informasi kegiatan tentang Dinas terkait	RAL.01.44 Informasi	Semua OPD		RAB.09.03 Informasi	Masyarakat	Website/kuburaya kab.go.id	TBD	TBD	TBD	TBD	TBD

4. Atribut Metadata Arsitektur Aplikasi

ID	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Kode Model Referensi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	Luaran	Inputan Data	Supplier Data	Luaran Data	Customer Data	Basis Aplikasi	Server Aplikasi	Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman	Bahasa Pemrograman	Kerangka Pengembangan	Basis Data	Unit Pengembangan	Unit Operasional	ID meta data terkait
KKR-DAA.01	JDIH	Media Sarana Penyampaian Informasi Secara Elektronik berupa produk hukum	Media Sarana Penyampaian Informasi Secara Elektronik berupa produk hukum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan informasi produk hukum Kabupaten Kubu Raya	Produk Hukum	Produk Hukum	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	Web Based	TBA	SETDA Bagian Hukum	TBA

KKR-DAA.02	E-Sakip Reviu	sistem aplikasi yang dibangun untuk peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja	sistem aplikasi yang dibangun oleh Kemenpan RB sebagai upaya peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan pembuatan laporan kinerja organisasi pemerintahan	Dokumen Penilaian Kinerja	Dok. Penilaian Kinerja	TBA	Web Based	TBA	SETDA Bagian Organisasi	TBA								
KKR-DAA.03	Mbiz Market	Marketplace	B2B Marketplace dengan solusi terlengkap untuk pebisnis, mulai dari solusi transaksi bisnis, solusi promosi bisnis, solusi e-procurement, hingga solusi pinjaman modal untuk pebisnis.	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan pembuatan laporan kinerja organisasi pemerintahan	Data pesanan	Pesanan barang dan jasa	TBA	Web Based	TBA	SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	TBA								

KKR-DAA.04	Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)	Aplikasi yang mengelola data informasi melalui data kualifikasi Pelaku Usaha dan Riwayat Kinerja Penyedia Barang dan Jasa	Aplikasi yang mengelola data informasi melalui data kualifikasi Pelaku Usaha dan Riwayat Kinerja Penyedia Barang dan Jasa	RAA.01.02 Aplikasi Umum Adm Pemerintahan	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	data pelaku usaha	pelaku usaha	TBA	Web Based	TBA	SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	TBA								
KKR-DAA.05	e-katalog	Belanja barang dan jasa pemerintah secara e-purchasing	Belanja barang dan jasa pemerintah secara e-purchasing	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Data Barang dan jasa	Data Barang dan jasa	TBA	Web Based	TBA	SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	TBA								
KKR-DAA.06	SiRUP	Pe-rencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pe-rencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah	Pengumuman RUP	RUP	TBA	Web Based	TBA	SETDA Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	TBA								
KKR-DAA.07	ANBK (Assesment Nasional berbasis Komputer)	Pendataan dan Pelaporan Asesmen Nasional	Pendataan dan Pelaporan Asesmen Nasional	RAA.01.02 Aplikasi Umum Adm Pemerintahan	Layanan supervisi pengawasan Ke- pendidikan	Laporan Asesmen nasional	Laporan Asesmen nasional	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TBA								
KKR-DAA.08	ANBK (Assesment Nasional berbasis Komputer)	Pen-daftaran Peserta Asesmen Nasional	Pendaftaran Peserta Asesmen Nasional	RAA.01.02 Aplikasi Umum Adm Pemerintahan	Layanan supervisi pengawasan Ke- pendidikan	peserta asesmen nasional	peserta asesmen nasional	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TBA								

KKR-DAA.09	SIPD BOS (Sistem Informasi Perencanaan Daerah Bantuan Operasional Sekolah)	Pelaporan Dana BOS di Daerah	Pelaporan Dana BOS di Daerah	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan supervisi pengawasan Kependidikan	data mengenai dana BOS	data mengenai dana BOS	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TBA								
KKR-DAA.10	ARKAS (Aplikasi Rencana Anggaran Sekolah)	Pelaporan Dana BOS Pusat	Pelaporan Dana BOS Pusat	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan supervisi pengawasan Kependidikan	Dokumen Rencana Anggaran Sekolah	Dok Rencana Anggaran Sekolah	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TBA								
KKR-DAA.11	SIPINTAR (Sistem Informasi Indonesia Pintar)	Pengelolaan dan pelaporan PIP	Pengelolaan dan pelaporan PIP	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan supervisi pengawasan Kependidikan	Laporan PIP	Laporan PIP	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TBA								
KKR-DAA.12	DAPODIK (Data Pokok Pendidikan)	Verifikasi, Validasi Data Satuan Pendidikan	Verifikasi, Validasi Data Satuan Pendidikan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan supervisi pengawasan Kependidikan	Data Pokok Pendidikan	Data Pokok Pendidikan	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TBA								
KKR-DAA.13	SIMTUN (Sistem Manajemen Informasi Tunjangan)	Verifikasi, Validasi Data PTK usulan Penerima Tunjangan	Verifikasi, Validasi Data PTK usulan Penerima Tunjangan	RAA.01.02 Aplikasi Umum Adm Pemerintahan	Layanan supervisi pengawasan Kependidikan	Data PTK usulan penerima tunjangan	Data PTK usulan penerima tunjangan	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TBA								
KKR-DAA.14	SIM TENDIK (Sistem Manajemen Informasi Tenaga Ke-	Verifikasi, Validasi Data Pengawas usulan Penerima Tunjangan	Verifikasi, Validasi Data Pengawas usulan Penerima Tunjangan	RAA.01.02 Aplikasi Umum AdmPemerintahan	Layanan supervisi pengawasan Kependidikan	Data Pengawas usulan Penerima Tunjangan	Data Pengawas usulan Penerima Tunjangan	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TBA								

	pendidikan																			
KKR-DAA .15	AP4SG/VERVAL GTK	Verifikasi, Validasi Data pengusulan sertifikasi baru, penambahan PTK dan Pembuatan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan pengecekan NRG	Verifikasi, Validasi Data pengusulan sertifikasi baru, penambahan PTK dan Pembuatan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan pengecekan NRG	RAA.01.02 Aplikasi Umum Adm Pemerintahan	Layanan supervisi pengawasan Kependidikan	Data pengusulan sertifikasi	Data pengusulan sertifikasi	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TBA								
KKR-DAA .16	SIMPEG PPPK GURU (Sistem Informasi Manajemen PPPK Guru)	Verifikasi, Validasi Formasi Data Kebutuhan Guru PPPK	Verifikasi, Validasi Formasi Data Kebutuhan Guru PPPK	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan supervisi pengawasan Kependidikan	Data Kebutuhan Guru PPPK	Data Kebutuhan Guru PPPK	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TBA								
KKR-DAA .17	PUSPERNAS (Pusat Prestasi Nasional)	Prestasi Akademik dan non akademik anak	Prestasi Akademik dan non akademik anak	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Pendidikan	data Prestasi Akademik dan non akademik	data Prestasi Akademik dan non akademik	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TBA								
KKR-DAA .18	SIP BOS (Sistem Informasi Pengelolaan BOS)	Pengelolaan BOS	Pengelolaan BOS	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Pendidikan	Data BOS	Data BOS	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	TBA								
KKR-DAA .19	Sibunda	Layanan aplikasi yang sederhana berbasis online yang berfungsi untuk menampung data-data kehamilan	Layanan aplikasi yang sederhana berbasis online yang berfungsi	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	TBA	Data kehamilan ibu	Data kehamilan ibu	TBA	Web Based	TBA	Dinas Kesehatan	TBA								

		ibu yang ada di kabupaten kubu raya juga mengurangi angka kematian pada ibu hamil	untuk menampung data-data kehamilan ibu yang ada di kabupaten kubu raya juga mengurangi angka kematian pada ibu hamil																	
KKR-DAA.20	SIMBER	Sistem Informasi Manajemen Kebersihan	Sistem Informasi Manajemen Kebersihan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	TBA	data Manajemen Kebersihan	data Manajemen Kebersihan	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	TBA								
KKR-DAA.21	MENANJAK	Media Sarana Penyampaian Informasi Secara Elektronik	Media Sarana Penyampaian Informasi Secara Elektronik	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan sosialisasi Informasi Kepada Masyarakat	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	TBA

KKR-DAA.22	SIMBG	Sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.	Sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan perizinan pembangunan gedung	Izin bangun-an gedung	Izin bangun-an gedung	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Per-mukiman	TBA								
KKR-DAA.23	SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation)	Layanan bagi Pemda (leading; Dinsos) mengakses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kubu Raya	Layanan bagi Pemda (leading; Dinsos) mengakses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kubu Raya	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan pemerintah pusat terkait dengan jaminan sosial	laporan penerima bantuan	laporan penerima bantuan	TBA	Web Based	TBA	Dinas Sosial	TBA								

KKR-DAA.24	E-PKH (Elektronik Program Keluarga Harapan)	Layanan bagi pendamping/operator/ Korkab PKH untuk mengakses data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bantuan sosial (PKH)	Layanan bagi pendamping/operator/ Korkab PKH untuk mengakses data KPM (Keluarga Penerima Manfaat) bantuan sosial (PKH)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan pemerintah pusat terkait dengan jaminan sosial	data KPM	data KPM	TBA	Web Based	TBA	Dinas Sosial	TBA								
KKR-DAA.25	Simpelda	Sistem Informasi Pelayanan Desa	Sistem Informasi Pelayanan Desa	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan sosialisasi Informasi Kepada Masyarakat	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TBA
KKR-DAA.26	Siskeudes	Sistem Tata Kelola Keuangan Desa	Sistem Tata Kelola Keuangan Desa	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan Desa	Laporan Keuangan Desa	Laporan Keuangan Desa	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TBA								
KKR-DAA.27	Sipades	Sistem pengelolaan Aset Desa	Sistem pengelolaan Aset Desa	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Desa	laporan pengelolaan Aset Desa	laporan pengelolaan Aset Desa	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	TBA								

KKR-DAA.28	Smart Desa	Layanan Integrasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kubu Raya. Digitalisasi Desa di Kubu Raya wujudkan desa Mandiri, Tangguh dan Berdikari.	Layanan Integrasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Kubu Raya. Digitalisasi Desa di Kubu Raya wujudkan desa Mandiri, Tangguh dan Berdikari.	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Desa	Informasi Desa	Infor masi Desa	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa	TBA								
KKR-DAA.29	Antrian Online	Media Sarana antrian pelayanan Secara Elektronik	Media Sarana antrian pelayanan Secara Elektronik	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Perizinan	Izin berusaha	Data pemohon data permohonan izin usaha	TBA	Mobile	TBA	Dinas Penanamar Modal dan Pelayanan Terpadu Sa Pintu	TBA								

KKR-DAA.30	OSS-RBA	Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha	Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Perizinan	Izin berusaha	Data pemohon data permohonan izin usaha	TBA	Web Based	TBA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TBA									
------------	---------	--	--	--	-------------------	---------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----------	-----	--	-----

KKR-DAA.31	Sicantik	Layanan Perizinan Terpadu untuk publik yang dapat digunakan oleh instansi, baik pusat maupun daerah guna mempermudah pemerintah dalam melakukan perizinan.	Layanan Perizinan Terpadu untuk publik yang dapat digunakan oleh instansi, baik pusat maupun daerah guna mempermudah pemerintah dalam melakukan perizinan.	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Perizinan	Izin berusaha	Data permohonan, data permohonan izin usaha	TBA	Web Based	TBA	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	TBA								
KKR-DAA.32	Ekosistem Data Kubu Raya	Layanan portal integrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses dat bagi warga dan pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Layanan portal integrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses dat bagi warga dan pemerintah Kabupaten Kubu Raya	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	TBA	Web Based	TBA	Diskominfo	TBA								

KKR-DAA.33	Open Data Kubu Raya	Layanan portal integrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses dat bagi warga dan pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Layanan portal integrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses dat bagi warga dan pemerintah Kabupaten Kubu Raya	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	TBA	Web Based	TBA	Diskominfo	TBA								
KKR-DAA.34	Satu Data Kubu Raya	Platform untuk pengelolaan dan berbagi pakai data antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Platform untuk pengelolaan dan berbagi pakai data antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	TBA	Web Based	TBA	Diskominfo	TBA								
KKR-DAA.35	PPID	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kubu Raya	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Kubu Raya	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan pengaduan	TBA		TBA	Web Based	TBA	Diskominfo	TBA								
KKR-DAA.36	Cloud	Layanan penyimpanan file berbasis online atau digital (cloud storage) untuk OPD Kubu Raya	Layanan penyimpanan file berbasis online atau digital (cloud storage) untuk OPD Kubu Raya	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Administrasi Pemerintahan	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	Cloud	TBA	Diskominfo	TBA

KKR-DAA.37	TTE	Layanan tanda tangan elektronik bagi Instansi dan ASN / PNS	Layanan tanda tangan elektronik bagi Instansi dan ASN / PNS	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Administrasi Pemerintahan	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	Mobile	TBA	Diskominfo	TBA
KKR-DAA.38	Statistik	Layanan penyedia data statistik secara elektronik	Layanan penyedia data statistik secara elektronik	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	TBA	Web Based	TBA	Diskominfo	TBA								
KKR-DAA.39	Mail	Layanan Email bagi Instansi dan ASN / PNS	Layanan Email bagi Instansi dan ASN / PNS	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Administrasi Pemerintahan	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	Web Based	TBA	Diskominfo	TBA
KKR-DAA.40	SIGA	sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi keluarga sebagai alat monitoring dan dasar perencanaan, pengukuran kinerja dan peta kerja pada setiap tingkatan wilayah program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi keluarga sebagai alat monitoring dan dasar perencanaan, pengukuran kinerja dan peta kerja pada setiap tingkatan wilayah program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TBA

KKR-DAA.41	SIMFONI PPA	sebuah aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak, yang dapat dikases disemua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara up to date, real time dan akurat, untuk menuju satu data, data kekerasan nasional.	sebuah aplikasi pencatatan dan pelaporan kekerasan perempuan dan anak, yang dapat dikases disemua unit layanan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota secara <i>up to date, real time</i> dan akurat, untuk menuju satu data, data kekerasan nasional.	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TBA											
KKR-DAA.42	SIMDAG ESIT	sistem yang memuat tentang data gender, data pelaku industri rumahan, data kelompok organisasi.	sistem yang memuat tentang data gender, data pelaku industri rumahan, data kelompok organisasi.	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	TBA	Web Based	TBA	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TBA											

KKR-DAA.43	SIPEMUDA Online	Layanan untuk mengurus Administrasi Kependudukan secara online	Layanan untuk mengurus Administrasi Kependudukan secara online	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Adm Kependudukan	Data Kependudukan	Data Kependudukan	TBA	Web Based	TBA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TBA								
KKR-DAA.44	SIMPEL	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Adm Kependudukan	Data Kependudukan	Data Kependudukan	TBA	Web Based	TBA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TBA								
KKR-DAA.45	Siak Terpusat	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Adm Kependudukan	Data Kependudukan	Data Kependudukan	TBA	Web Based	TBA	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	TBA								
KKR-DAA.46	Srikandi	Aplikasi layanan Arsip Nasional RI untuk memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online serta terintegrasi	Aplikasi layanan Arsip Nasional RI untuk memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online serta terintegrasi	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Administrasi Pemerintahan	Data surat menyurat	Data surat menyurat	TBA	Web Based	TBA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TBA								

KKR-DAA.47	SIKN	Sistem Informasi Kearsipan Nasional untuk mengolah informasi kearsipan yang dimiliki dalam rangka membantu temu balik arsip baik dalam format digital maupun lokasi fisik arsip di tempat penyimpanan	Sistem Informasi Kearsipan Nasional untuk mengolah informasi kearsipan yang dimiliki dalam rangka membantu temu balik arsip baik dalam format digital maupun lokasi fisik arsip di tempat penyimpanan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Arsip Statis	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	TBA	Web Based	TBA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	TBA
KKR-DAA.48	Marketing Business Center	Marketing Business Center Kubu Raya merupakan sebuah usaha untuk membantu para Pelaku UMKM dan Profesional Kewirausahaan dalam hal pemasaran secara online.	Marketing Business Center Kubu Raya merupakan sebuah usaha untuk membantu para Pelaku UMKM dan Profesional Kewirausahaan dalam hal pemasaran secara online.	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	TBA	Data Pelaku UMKM	Data Pelaku UMKM	TBA	Web Based	TBA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	TBA								

KKR-DAA.49	SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional)	Tata cara penyampaian data Industri, kawasan industri, data lain dan informasi layanan industri	Tata cara penyampaian data Industri, kawasan industri, data lain dan informasi layanan industri	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	TBA	data Industri	data Industri	TBA	Web Based	TBA	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	TBA								
KKR-DAA.50	Kartu AK.1	Layanan untuk dapat membuat kartu AK.1 secara online	Layanan untuk dapat membuat kartu AK.1 secara online	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan pencarian kerja untuk masyarakat Kabupaten Kubu Raya	Data Pencari Kerja	Data Pencari Kerja	TBA	Web Based	TBA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	TBA								
KKR-DAA.51	Sistem Infomasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Siskotkln)	Layanan Penerbitan Nomor ID dan Surat Rekomendasi Paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Layanan Penerbitan Nomor ID dan Surat Rekomendasi Paspor bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan pencarian kerja untuk masyarakat Kabupaten Kubu Raya	Data Tenaga Kerja Luar Negeri	Data Tenaga Kerja Luar Negeri	TBA	Web Based	TBA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	TBA								
KKR-DAA.52	Bursa Kerja Khusus (BKK)	Sarana Pendaftaran dan Pendataan Bursa Kerja Khusus serta laporan penempatan	Sarana Pendaftaran dan Pendataan Bursa Kerja Khusus serta laporan penempatan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan pencarian kerja untuk masyarakat Kabupaten Kubu Raya	Data Bursa Kerja	Data Bursa Kerja	TBA	Web Based	TBA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	TBA								
KKR-DAA.53	Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (LPTKDN)	Sarana Pendataan dan Pelaporan hasil penempatan LPTKDN	Sarana Pendataan dan Pelaporan hasil penempatan LPTKDN	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan pencarian kerja untuk masyarakat Kabupaten Kubu Raya	Pelaporan hasil penempatan LPTKDN	Pelaporan hasil penempatan LPTKDN	TBA	Web Based	TBA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	TBA								

KKR-DAA.54	Sistem Pelayanan Tenaga Kerja Asing (TKA)	Layanan untuk Memvalidasi Pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)	Layanan untuk Memvalidasi Pembayaran Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing (DKPTKA)	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan pencarian kerja untuk masyarakat Kabupaten Kubu Raya	Data Tenaga Kerja Asing	Data Tenaga Kerja Asing	TBA	Web Based	TBA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	TBA								
KKR-DAA.55	Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Proses Verifikasi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	Proses Verifikasi Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Perizinan	Izin berusaha	Izin berusaha	TBA	Web Based	TBA	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	TBA								
KKR-DAA.56	Valnas	Layanan Validasi Nasional Data Produksi Kelautan dan Perikanan	Layanan Validasi Nasional Data Produksi Kelautan dan Perikanan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	TBA	Data Produksi Kelautan	Data Produksi Kelautan	TBA	Web Based	TBA	Dinas Perikanan	TBA								
KKR-DAA.57	Satudata KKP	Layanan Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) dan Validasi Nasional Data Produksi Kelautan dan Perikanan	Layanan Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Perikanan (KUSUKA) dan Validasi Nasional Data Produksi Kelautan dan Perikanan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	TBA	Data Pelaku Usaha Perikanan	Data Pelaku Usaha Perikanan	TBA	Web Based	TBA	Dinas Perikanan	TBA								

KKR-DAA.58	Geoportal Kubu Raya	Portal berbagipakai katalog data spasial dengan format asli maupun format saji	Portal berbagipakai katalog data spasial dengan format asli maupun format saji	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	TBA	Web Based	TBA	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	TBA								
KKR-DAA.59	WebGIS Kepong Bakol	Portal website GIS yang untuk menyajikan hasil visualisasi, analisis data spasial, dan irisan antar data, baik data spasial dasar maupun tematik	Portal website GIS yang untuk menyajikan hasil visualisasi, analisis data spasial, dan irisan antar data, baik data spasial dasar maupun tematik	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	TBA	Web Based	TBA	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	TBA								
KKR-DAA.60	Geo Informasi	Sistem informasi pendataan berbasis web yang digunakan oleh TPDIGD dan Operator SKPD untuk keperluan pemutakhiran data spasial dan tematik.	Sistem informasi pendataan berbasis web yang digunakan oleh TPDIGD dan Operator SKPD untuk keperluan pemutakhiran data spasial dan tematik.	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	TBA	Web Based	TBA	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	TBA								

KKR-DAA .61	Android Kepong Bakol	Aplikasi pembantu untuk para TPDIGD dalam pengambilan data spasial & data tematik hasil survey, berupa titik koordinat dan foto yang terdapat di lapangan	Aplikasi pembantu untuk para TPDIGD dalam pengambilan data spasial & data tematik hasil survey, berupa titik koordinat dan foto yang terdapat di lapangan	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	Layanan Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	Informasi Satu Data	TBA	Web Based	TBA	Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	TBA								
KKR-DAA .62	SPPD	Aplikasi terkait perjalanan dinas, dengan tujuan mempermudah administrasi dan pengarsipan	Aplikasi terkait perjalanan dinas, dengan tujuan mempermudah administrasi dan pengarsipan	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data Anggaran	Data Anggaran	TBA	Desktop	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								
KKR-DAA .63	SIMPLE	Aplikasi terkait surat-surat kedinasan, dengan tujuan mempermudah pendisposisian dan pengarsipan	Aplikasi terkait surat-surat kedinasan, dengan tujuan mempermudah pen-disposisian dan pengarsipan	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Administrasi Pemerintahan	Surat Menyurat	Surat Menyurat	TBA	Desktop	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								

KKR-DAA .64	SIMAKDA	Aplikasi keuangan dengan output berupa komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Aplikasi keuangan dengan output berupa komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data Anggaran	Data Anggaran	TBA	Desktop	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								
KKR-DAA .65	SIMAKDA SKPD	Aplikasi keuangan dengan output berupa komponen Laporan Keuangan SKPD	Aplikasi keuangan dengan output berupa komponen Laporan Keuangan SKPD	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data Anggaran	Data Anggaran	TBA	Web Based	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								
KKR-DAA .66	e-PERSEDIAAN	Aplikasi untuk mencatat persediaan dan stock opname aset daerah	Aplikasi untuk mencatat persediaan dan stock opname aset daerah	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data Stock opname aset	Data Stock opname aset	TBA	Web Based	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								
KKR-DAA .67	e-RKBMD	Aplikasi untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Aplikasi untuk menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data RKBMD	Data RKBMD	TBA	Desktop	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								
KKR-DAA .68	e-SSH	Aplikasi untuk menyusun Standar Satuan Harga Belanja di APBD	Aplikasi untuk menyusun Standar Satuan Harga Belanja di APBD	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data SSH	Data SSH	TBA	Web Based	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								

KKR-DAA.69	e-GAJI	Aplikasi untuk pembayaran gaji ASN Pemerintah Daerah	Aplikasi untuk pembayaran gaji ASN Pemerintah Daerah	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data Keuangan	Data Keuangan	TBA	Web Based	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								
KKR-DAA.70	e-SPM	Aplikasi untuk memverifikasi kelengkapan dokumen belanja Bendahara SKPD	Aplikasi untuk memverifikasi kelengkapan dokumen belanja Bendahara SKPD	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data Keuangan	Data Keuangan	TBA	Web Based	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								
KKR-DAA.71	e-KONTRAK	Aplikasi untuk memverifikasi kelengkapan dokumen kontrak untuk keperluan pembayaran kontrak pihak ketiga	Aplikasi untuk memverifikasi kelengkapan dokumen kontrak untuk keperluan pembayaran kontrak pihak ketiga	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data Keuangan	Data Keuangan	TBA	Web Based	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								
KKR-DAA.72	SIPD	Sistem milik Kemendagri yang digunakan untuk penganggaran APBD 2023	Sistem milik Kemendagri yang digunakan untuk penganggaran APBD 2023	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data Keuangan	Data Keuangan	TBA	Web Based	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								
KKR-DAA.73	SIPD RI	Sistem milik Kemendagri yang digunakan penganggaran APBD 2024	Sistem milik Kemendagri yang digunakan penganggaran APBD 2024	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data Keuangan	Data Keuangan	TBA	Web Based	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								

KKR-DAA.74	SIMDA BMD	Sistem milik BPKP yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan aset daerah	Sistem milik BPKP yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan aset daerah	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data Aset	Data Aset	TBA	Desktop	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								
KKR-DAA.75	SIKD	Sistem milik Kemenkeu yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan daerah	Sistem milik Kemenkeu yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan keuangan daerah	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan Keuangan	Data Keuangan	Data Keuangan	TBA	Web Based	TBA	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	TBA								
KKR-DAA.76	SIAP	Aplikasi menyimpan berkas secara digital ASN Kabupaten Kubu Raya	Aplikasi menyimpan berkas secara digital ASN Kabupaten Kubu Raya	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.77	SIKARYA	Aplikasi mengelola data ASN Kubu Raya yang diharapkan dapat terintegrasi dengan SI ASN	Aplikasi mengelola data ASN Kubu Raya yang diharapkan dapat terintegrasi dengan SI ASN	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.78	E-ABSEN	Aplikasi mencatat waktu masuk dan pulang ASN Kubu Raya	Aplikasi mencatat waktu masuk dan pulang ASN Kubu Raya	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								

KKR-DAA.79	SIMPEG	Aplikasi mengelola data ASN Kalbar	Aplikasi mengelola data ASN Kalbar	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.80	MYSAPK	Menginformasikan data ASN yang tercatat pada BKN	Menginformasikan data ASN yang tercatat pada BKN	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.81	Human Resourch SAPK	Mengelola nomenklatur	Mengelola nomenklatur	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.82	SIASN	Mengelola layanan kepegawaian pangkat, pensiun, perbaikan SKK, perubahan jabatan dll	Mengelola layanan kepegawaian pangkat, pensiun, perbaikan SKK, perubahan jabatan dll	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.83	E-KINERJA	Pengelolaan kinerja kepegawaian	Pengelolaan kinerja kepegawaian	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								

KKR-DAA.84	I-DIS BKN	Layanan Pelaporan pelanggaran / kedisiplinan	Layanan Pelaporan pelanggaran/ kedisiplinan	RAA.01.02 Aplikasi Umuk-Administrasi Pemerintahan	Layanan ke-pegawaian	Data Ke-pegawaian	Data Ke-pegawaia	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawai-an dan Pe-ngembang-an Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.85	SIPINTER	Menjawab pertanyaan dan menyampaikan eviden	Menjawab pertanyaan dan menyampai kan eviden	RAA.01.02 Aplikasi Umuk-Administrasi Pemerintahan	Layanan ke-pegawaian	Data Ke-pegawaian	Data Ke-pegawaia	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawai-an dan Pe-ngembang-an Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.86	NSPK	Menjawab pertanyaan dan menyampaikan eviden	Menjawab pertanyaan dan menyampai kan eviden	RAA.01.02 Aplikasi Umuk-Administrasi Pemerintahan	Layanan ke-pegawaian	Data Ke-pegawaian	Data Ke-pegawaia	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawai-an dan Pe-ngembang-an Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.87	SIJAPTI	Usulan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Usulan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	RAA.01.02 Aplikasi Umuk-Administrasi Pemerintahan	Layanan ke-pegawaian	Data Ke-pegawaian	Data Ke-pegawaia	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawai-an dan Pe-ngembang-an Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.88	SIDARA	Usulan Jabatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Usulan Jabatan Dinas Kependudu kan dan Catatan Sipil	RAA.01.02 Aplikasi Umuk-Administrasi Pemerintahan	Layanan ke-pegawaian	Data Ke-pegawaian	Data Ke-pegawaia	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawai-an dan Pe-ngembang-an Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.89	E-MUTASI	Proses Mutasi PNS	Proses Mutasi PNS	RAA.01.02 Aplikasi Umuk-Administrasi Pemerintahan	Layanan ke-pegawaian	Data Ke-pegawaian	Data Ke-pegawaia	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawai-an dan Pe-ngembang-an Sumber Daya Manusia	TBA								

KKR-DAA.90	FORMASI MENPAN	Formasi PNS dan PPPK	Formasi PNS dan PPPK	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.91	GURU PPPK KEMEN DIKBUD	Usulan Formasi Guru PPPK	Usulan Formasi Guru PPPK	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.92	RENBUT KEMENKES	Usulan Formasi Tenaga Kesehatan	Usulan Formasi Tenaga Kesehatan	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.93	SSCN BKN	Proses Rekrutment	Proses Rekrutment	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.94	SIONDEL BKN	Kenaikan Pangkat	Kenaikan Pangkat	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.95	SWAJAR	orientasi P3K	orientasi P3K	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								

KKR-DAA.96	SIPENDAR	Pendaftaran peserta PKN TK. II	Pendaftaran peserta PKN TK. II	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Layanan kepegawaian	Data Kepegawaian	Data Kepegawaian	TBA	Web Based	TBA	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	TBA								
KKR-DAA.97	SIORMAS	SIORMAS adalah singkatan dari Sistem Informasi Ormas. Sistem ini merupakan seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi.	SIORMAS adalah singkatan dari Sistem Informasi Ormas. Sistem ini merupakan seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, sumber daya manusia, dan teknologi yang saling berkaitan dan dikelola secara terintegrasi yang berguna untuk mendukung manajemen pelayanan publik dan tertib administrasi	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	TBA	Data Informasi Ormas	Data Informasi Ormas	TBA	Web Based	TBA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	TBA								

8. Atribut Metadata Arsitektur Perangkat Keras Media Penyimpanan

ID	Nama Data Storage	Deskripsi Data Storage	Data yang digunakan	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Data Storage	Lokasi Data Storage	Perangkat Lunak yang Digunakan	Perangkat Lunak yang Digunakan	Metode Akses Data Sharing	ID metadata terkait
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Atribut Metadata Arsitektur Perangkat Keras Jaringan

ID	Nama <i>Network/Communication Device</i>	Deskripsi <i>Network/Communication Device</i>	Tipe <i>Network/Communication Device</i>	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola <i>Network/Communication Device</i>	ID metadata terkait
KKR-DAI.03	JIPD	jaringan intra pemerintah daerah	Multilayer Switch	Sendiri	diskominfo	TIK	

10. Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

ID	Nama <i>Security Device</i>	Deskripsi <i>Security Device</i>	Tipe <i>Security Device</i>	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola <i>Security Device</i>	ID metadata terkait
-	-	-	-	-	-	-	-

11. Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal

ID	Nama Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe Periferal	Lokasi penempatan Periferal	Unit Pengelola <i>Network/Communication Device</i>	ID metadata terkait
-	-	-	-	-	-	-

15. Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

ID	Nama Standar Keamanan	Jenis Standar Keamanan	Deskripsi	Tanggal Mulai Penerapan	Tanggal Akhir Penerapan	ID Metadata Terkait
KKR-DAK.01	Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021	1. Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE	21 Mei 2021	sekarang	
KKR-DAK.02	Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 77 Tahun 2022	3. Regulasi Lainnya	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	14 September 2022	Sekarang	
KKR-DAK.03	Rancangan Peraturan BSSN Tahun 2021	1. Standar Nasional dan/atau Peraturan Terkait Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE			

16. Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Kemanan

ID	Nama Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	ID metadata terkait
KKR-DAK.04	Bimtek Layanan Keamanan Informasi	Bimbingan Teknis Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	26 juni 2023	-

17. Atribut Metadata Kerentanan Keamanan

ID	Nama Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	ID metadata terkait
KKR-DAK.05	Sibunda	Insiden Judi Online Di Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Februari 2023	
KKR-DAK.06	ppid.kuburayakab.go.id	Insiden Judi Online Di Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya		Juli 2023
KKR-DAK.07	Geoinformasi.kuburayakab.go.id	Insiden Judi Online Di Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Mei 2023	Mei 2023
KKR-DAK.08	Website Kecamatan Sungai Kakap	Insiden Judi Online Di Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Mei 2023	
KKR-DAK.09	Website DPMPTSP	Insiden Judi Online Di Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Juli 2023	Juli 2023
KKR-DAK.10	Open Data Kubu Raya	Insiden Judi Online Di Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Juli 2023	Juli 2023
KKR-DAK.11	Sikemas RSUD	Insiden Judi Online Di Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya		Juli 2023
KKR-DAK.12	Website Dinas Pemdes	Insiden Judi Online Di Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Juli 2023	Juli 2023
KKR-DAK.13	Website DKUMPP	Insiden Judi Online Di Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Juli 2023	Juli 2023

KKR-DAK.14	Website Puskesmas	Insiden Judi Online Di Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Juli 2023	Juli 2023
KKR-DAK.15	Website Disbunnak	Insiden Judi Online Di Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	Juli 2023	Juli 2023
KKR-DAK.16	Website Kecamatan Batuampar	Insiden Judi Online Di Website Lingkup Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	24 Agustus 2023	

18. Atribut Metadata Peningkatan Keamanan

ID	Nama Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Peningkatan Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Keamanan Siber	ID metadata terkait
-	-	-	-	-	-

19. Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan

ID	Nama Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Deskripsi Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Nilai Kematangan Penangan Insiden Siber	Nilai Kematangan Penangan Insiden Siber2
-	-	-	-	-	-

20. Atribut Metadata Audit Keamanan

ID	Nama Kegiatan Audit Keamanan SPBE	Hasil Audit Keamanan SPBE	Jenis Audit Keamanan SPBE	Tanggal Kegiatan Audit Keamanan SPBE;	Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE;	ID metadata terkait
-	-	-	-	-	-	-

21. Atribut Metadata Kelaikan Keamanan

ID	Nama Kegiatan Kelaikan Keamanan SPBE	Tanggal Kelaikan Keamanan SPBE	ID metadata terkait
-	-	-	-

